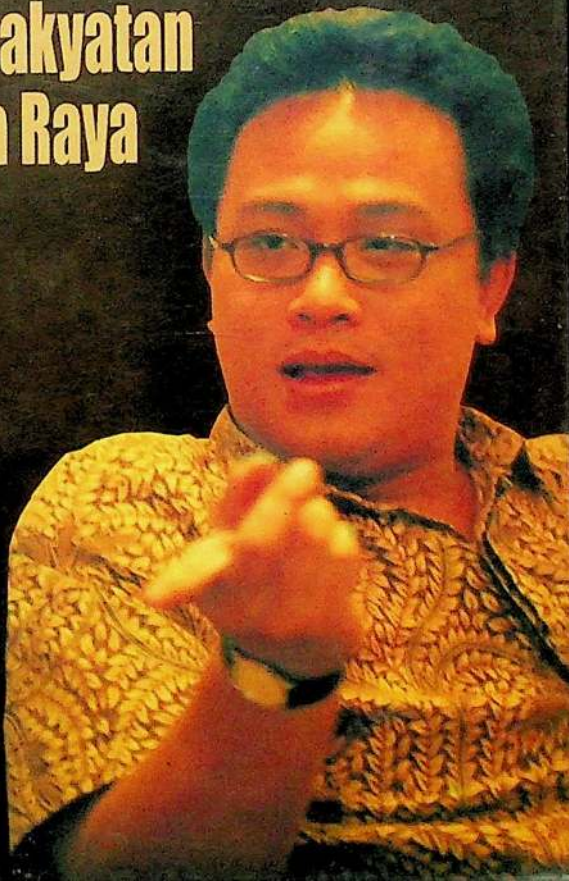
Moh Jumhur Hidayat

MANIFESTO KEKUATAN KETIGA

Mengobarkan Asas Nasionalisme Kerakyatan Menuju Indonesia Raya



AAN KPA
8:1

GASPERMINDO

MOH JUMHUR HIDAYAT, lahir pada tanggal 18 Pebruari 1968 di Bandung, dan kuliah di ITB jurusan Teknik Fisika tahun 1986, yang kemudian dipecat pada tahun 1989 dan divonis penjara selama tiga tahun karena menggerakkan berbagai demonstrasi menentang pemerintahan Orde Baru. Melanjutkan kuliah pada bidang yang sama dan menyelesaikan sarjana di Universitas Nasional (UNAS) tahun 1996. Selain mengikuti berbagai training dan seminar di manca negara, saat ini juga aktif di berbagai organisasi di antaranya menjabat Ketua Umum PDR (Partai Daulat Rakyat), Ketua Umum GASPERMINDO (Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia), Ketua Presidium Nasional PPM (Pusat Peranserta Masyarakat), Penasehat CIDES (Center for Information and Development Studies), Penasehat Yayasan Akhlaqul Karimah (Rehabilitasi Korban NARKOBA), Penasehat APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia), Anggota PUPUK (Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil), Ketua Umum Koperasi Putera Bangsa (Pengamen Jalanan), Ketua Dewan Pengawas Koperasi GASPERMINDO (di antaranya mengadakan jasa taksi), serta berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya.■

PERPUS
1

ISBN:979-97264-0-9

MANIFESTO KEKUATAN KETIGA
Mengobarkan Asas Nasionalisme Kerakyatan
Menuju Indonesia Raya

Penulis: Moh Jumhur Hidayat
Pendesain Muka dan Penata Letak: A Yahya

Cetakan Pertama, Oktober 2002
Diterbitkan oleh Gaspermindo

Jl. Budi No. 3A, Cawang III, Dewi Sartika, Jakarta Timur
Telp./Fax. (021) 8091128

ISBN: 979-97264-0-9

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR vii

BAB I
SEJARAH RAKYAT INDONESIA
ADALAH SEJARAH KETERTINDASAN 1

1.1. Masyarakat yang Membungkuk-Bungkuk 1
1.2. Pengkhianatan terhadap Reformasi 4
1.3. Penjajahan Kembali (Rekolonisasi) 7

BAB II
KEKUATAN KESATU DAN KEKUATAN KEDUA
TELAH MENJADI KEKUATAN LAMA 11

2.1. Kekuatan Lama Berganti Kulit 11
2.2. Kekuatan Kesatu dan Kekuatan Kedua 13

2.2.1. Demokrasi yang Elitis 15
2.2.2. Ekonomi yang Anti Rakyat 18
2.2.3. Hukum yang Menghamba
pada Kekuasaan dan Materi 23
2.2.4. Hilangnya Identitas Sosial-Budaya 25
2.2.5. Strategi Pendidikan,
SDM dan Teknologi yang Tak Terpadu 28
2.2.6. Hubungan Internasional yang Pasif 31
2.2.7. Otonomi Daerah yang Membingungkan 33

BAB III
KEKUATAN KETIGA ADALAH
KEKUATAN YANG AKAN MEMIMPIN 35

3.1. Lingkungan yang Berubah 35

3.1.1. Dorongan Perubahan pada Lingkungan Internasional 36
3.1.2. Dorongan Perubahan pada Lingkungan Domestik 39

3.2. Mengobarkan Asas Nasionalisme-Kerakyatan 41

3.2.1. Melaksanakan Demokrasi Sosial bukan Demokrasi Liberal 43
3.2.2. Melaksanakan Kebijakan Ekonomi Progresif (KEP) 45

1. Menerapkan Kebijakan Moneter dan Fiskal untuk Ekonomi Domestik 46
2. Melaksanakan Land Reform dan Membangun Pertanian 53
3. Menghidupkan Kembali Kejayaan Kelautan 61
4. Memberdayakan UKMK dan Membentuk PNB 64
5. Menciptakan Satu Juta Pengusaha Baru 70
6. Menyejahterakan Buruh dan Melaksanakan ESOP 73
7. Menyeimbangkan Kekuatan Pribumi dan Non-Pribumi 79

3.2.3. Menegakkan Kewibawaan Hukum 85

1. Pengembangan Hukum HAM dan Partisipasi Politik 86
2. Pengembangan Hukum dalam Kegiatan Ekonomi dan Bisnis 89
3. Penerapan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Nasional 90

3.2.4. Menyempurnakan Identitas Sosial-Budaya Ke-Indonesia-an 92

1. Menggali Nilai-nilai Luhur Sosial-Budaya Bangsa 93
2. Menyerap Saripati Nilai-Nilai Budaya Asing 94

3.2.5. Menerapkan Pendidikan, SDM dan Teknologi yang Terpadu 95

1. Pengembangan Pendidikan dan SDM 96
2. Penguasaan Teknologi untuk Kemandirian Bangsa 99

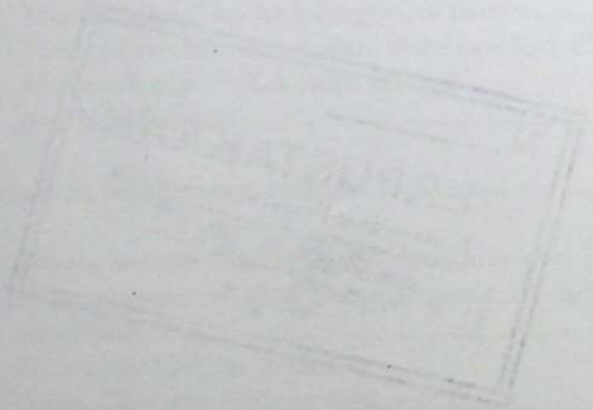
3.2.6. Melaksanakan Hubungan Internasional yang Pro-Aktif 100

1. Membangun Poros Asia 102
2. Mengembangkan Diplomasi Dagang 103

3.2.7. Menerapkan Otonomi Berbasis Sosio-Kultural 105

LAMPIRAN 109





KATA PENGANTAR PENULIS

BUKU ini bisa hadir di hadapan pembaca yang budiman, dimulai dari kegelisahan penulis dalam mengamati kekuatan politik kelompok nasionalis maupun kelompok Islam saat ini, yang semakin menjauh dari cita-cita awalnya. Pada hemat penulis, kelompok nasionalis yang berkuasa saat ini, telah keluar dari pemikiran-pemikiran Bung Karno, sehingga melupakan kaum marhaen atau *wong cilik* yang selalu hidup dirundung kesulitan. Sementara itu, kelompok Islamnya telah keluar dari cara-cara berjuang yang dilakukan oleh HOS. Tjokroaminoto, yang telah dengan setia menerapkan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam membebaskan orang-orang tertindas (*mustadh'afin*).

Kegelisahan penulis itu kemudian diperkuat lagi dengan menyaksikan berbagai bentuk ketidakpuasan rakyat dalam menyikapi kebijakan pemerintah, seperti misalnya perlakuan yang menguntungkan para konglomerat bermasalah, kenaikan harga BBM, listrik dan kebutuhan pokok rakyat lainnya, penegakan hukum yang carut-marut, jaminan pembelian gabah petani yang tersendat, kemudahan melakukan impor gula yang berakibat merugikan petani tebu, penggusuran-penggusuran pedagang kaki lima, pengangguran yang terus meningkat, penyelesaian konflik etnis dan agama yang tidak kunjung usai, serta merebaknya pemakaian narkoba oleh pemuda-pemudi dan banyak lagi yang lainnya.

Dari kegelisahan itulah kemudian penulis merenungkan kembali perjalanan sejarah rakyat Indonesia, yang akhirnya sampailah pada kesimpulan bahwa sejarah rakyat Indonesia adalah sejarah ketertindasan. Masa ketertindasan itu, tidak saja ketika pada masa feodalisme kerajaan dan kolonialisme Belanda, tetapi juga pada masa awal kemerdekaan, masa Orde Baru dan bahkan pada era reformasi saat ini. Karena itulah, penulis berkeyakinan bahwa ketidakpuasan rakyat ini akan mendorong terbentuknya suatu kekuatan baru yang penulis sebut kekuatan ketiga, yaitu suatu kekuatan yang berasaskan nasionalisme kerakyatan. Sedangkan kelompok nasionalis dan kelompok Islam, penulis namakan masing-

masing sebagai kekuatan kesatu dan kekuatan kedua.

Banyak memang kaum cendikia, demikian juga para politisi dan kalangan aktivis gerakan yang telah mengeritisi (*negative campaign*) keadaan sekarang. Namun, penulis melihat bahwa seringkali kritik tersebut berhenti pada kritik, atau paling jauh hanya memberikan pemecahan yang sifatnya terbatas, temporal dan tidak menyeluruh. Oleh karena itu, dalam buku ini penulis lebih menekankan bentuk-bentuk pemecahan yang harus dilakukan oleh pemegang kebijakan, agar bangsa dan negara dapat terselamatkan, baik dari malapetaka saat ini maupun malapetaka yang lebih dahsyat pada masa depan.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, karena rasa cintanya kepada penulis tiada habis-habisnya, baik itu pada waktu suka cita, maupun pada waktu penulis sangat menderita. Dengan penuh harapan akan lahirnya suatu kekuatan pemuda, maka penulis mempersembahkan buku ini untuk mereka, walau tentunya penulis juga berharap bahwa buku ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi orang-orang tua, khususnya para pemegang kebijakan, baik yang berada di pemerintahan mapun parlemen. Selanjutnya, penulis juga menghaturkan buku ini kepada tokoh-tokoh gerakan, baik yang berada di partai politik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi buruh, yang sedang berjuang dengan gigih untuk meningkatkan martabat rakyat dan perbaikan moral bangsa.

Rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada taman-teman dan handai tolan, yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan buku ini di tengah-tengah kesibukan berorganisasi. Penulis berkeyakinan, bahwa bangsa Indonesia merdeka bukanlah untuk menjadi bangsa pinggiran, melainkan menjadi bangsa yang bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah bersama bangsa-bangsa maju lainnya.

Semoga Allah SWT mencatat kehadiran buku ini sebagai amal penulis yang kelak akan dibawa untuk menghadap-Nya. Amin.■

Jakarta, Oktober 2002

BAB I

SEJARAH RAKYAT INDONESIA ADALAH SEJARAH KETERTINDASAN

TIDAKLAH ada ungkapan yang lebih berharga dalam rangka menyusun sebuah masyarakat baru selain daripada ungkapan belajar dari sejarah atau belajar dari masa lalu. Ungkapan ini sangat penting agar kita tahu posisi dan peran kita dalam gejolaknya sejarah perkembangan rakyat Indonesia. Dengan demikian, kita tidak akan tenggelam dalam gegap gempitanya masa sekarang yang pada akhirnya kita lupa akan tugas sejarah untuk membangun masyarakat baru Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, berdaulat dan bermartabat.

Gelora reformasi yang terjadi sekarang, telah melupakan hakikat ketertindasan karena seolah-olah setelah kita mendapatkan kebebasan politik atau demokrasi politik, maka ketertindasan struktural berupa kesengsaraan dan kebodohan pun tidak terjadi lagi. Dengan kebebasan politik itu, seolah-olah rakyat pastilah akan mencapai kebahagiaan.

Setelah diselenggarakan pemilu bebas, seolah-olah rakyat langsung akan bisa makan; bisa bekerja, menyekolahkan anak, mendapat keadilan hukum dan sebagainya. Itulah gegap gempitanya reformasi yang pada akhirnya akan menenggelamkan kesadaran rakyat untuk memperbaiki kualitas kehidupannya. Bahkan tidak sedikit kaum terpelajar yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia telah keluar dari ketertindasan sejak runtuhnya benteng kekuasaan Orde Baru.

1.1. Masyarakat yang Membungkuk-Bungkuk

Perlulah disadari, bahwa ketertindasan rakyat bukanlah terjadi hanya selama 32 tahun saja atau puluhan tahun sebelum Orde Baru berkuasa,

tetapi setidaknya bisa ditelusuri sejak ratusan tahun lalu yaitu, ketika penduduk di katulistiwa ini masih hidup dalam sistem feodalisme kerajaan-kerajaan. Tidak ada satu pun kaum cendikia yang dapat menyangkal, bahwa pada saat itu rakyat Indonesia selalu berada di pinggiran, membungkuk-bungkuk, dan tunduk kepada raja-raja atau kerabat kerajaan secara buta.

Tidaklah jauh berbeda sistem kerajaan yang ada di katulistiwa maupun yang ada di Eropa dan sebagainya, yaitu bahwa sistem ini bersifat elit, segala aspek kehidupan rakyat semuanya diatur oleh kerajaan. Hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya semua dipersembahkan bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan raja atau kerajaan. Dengan menyimbolkan bahwa raja adalah wakil Tuhan atau Dewa, maka semakin tunduklah rakyat kepada titah raja!

Ketertundukan ini bukan saja bersifat sukarela karena memang tingkat kesadaran rakyat masih rendah, melainkan juga karena adanya daya paksa yang bersifat menekan baik secara fisik maupun magis bila tidak mengikuti kehendak raja. Karenanya, dengan tingkat kesadaran yang rendah serta paksaan yang bersifat intimidatif ini maka semakin lengkaplah ketundukkan rakyat terhadap raja atau kaum kerabat kerajaan. Itulah sejarah ketertindasan rakyat pada zaman kerajaan-kerajaan!

Zaman berganti zaman, dan masuklah era kolonialisme di Indonesia yang pada waktu itu merupakan kelanjutan logis dari sistem kapitalisme yang berkembang di Eropa. Pada zaman ini tidaklah ada niat sebesar zarah pun dari para kolonialis untuk meningkatkan martabat rakyat Indonesia! Pada era ini kita mengenal apa yang disebut eksploitasi atau penghisapan secara keji selama 350 tahun terhadap rakyat Indonesia oleh bangsa penjajah khususnya Belanda.

Dengan memanfaatkan sistem feodalisme yang kuat, kaum penjajah bekerjasama dengan kaum feodal menghisap atau mengeksploitasi rakyat. Jadi pada era ini, rakyat mengalami dua kali penghisapan, yaitu oleh penjajah dan oleh golongan feodal. Sistem tanam paksa, kerja paksa, pembuangan, pemenjaraan dan pembunuhan terhadap rakyat maupun para pemimpin rakyat adalah contoh-contoh yang nyata. Pada zaman ini rakyat kembali membungkuk-bungkuk dan tunduk kepada penguasa

absolut yang telah berganti, yaitu penguasa kolonial!

Zaman kemerdekaan politik sebagai sebuah bangsa yang utuh akhirnya dicapai pada tanggal 17 Agustus 1945. Harapan untuk menyusun suatu sistem kemasyarakatan yang dapat menjamin kesejahteraan mulai tampak bagaikan sinar lilin yang menyala di ujung lorong gelap penderitaan. Untuk sekelompok masyarakat, harapan itu memang menjadi kenyataan. Namun, bagi sebagian besar lainnya keadaan kesengsaraan itu tetap saja dirasakan karena struktur masyarakat yang terbentuk dari sistem feodal dan kolonial, tidak serta merta berubah saat kemerdekaan politik diproklamasikan. Dengan kata lain, kemerdekaan yang ada kala itu barulah kemerdekaan politik, bukan kemerdekaan dari struktur kolonial-feodal yang menindas!

Gagasan-gagasan besar para pendiri bangsa untuk menyejahterakan rakyat ternyata ditenggelamkan oleh mereka sendiri ke dalam hiruk-pikuk politik yang tidak produktif akibat perselisihan antar kekuatan politik. Rakyat dibius dan dimobilisasi hanya untuk menjadi pendukung setia dan buta kepada para pemimpinnya. Pada zaman ini sekali lagi rakyat harus membungkuk-bungkuk dan tunduk secara serta-merta kepada penguasa politik yang gegap gempita mengobarkan api revolusi, sementara pembangunan ekonomi belum nyata dirasakan rakyat! Bahkan yang terjadi selanjutnya adalah penderitaan rakyat akibat permusuhan elit yang diimbaskan ke tengah masyarakat, sehingga peristiwa berdarah karena konflik horisontal terjadi di mana-mana, yang mencapai puncaknya pada peristiwa G30S/PKI dan sesudahnya.

Zaman Orde Baru kemudian kita masuki. Kalau pada era sebelumnya gelora revolusi menjadi tema utama, maka pada era ini pembangunan fisiklah yang menjadi tema utamanya, dengan tentunya mengabaikan aspek kebebasan atau kemerdekaan politiknya. Pembangunan fisik memang berjalan tetapi tidak seperti apa yang diinginkan akibat tidak adanya kontrol yang efektif dari rakyat! KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam sistem ini merupakan konsekuensi logis dalam sistem yang tanpa kontrol. Akhirnya, elitisme ekonomi terjadi dan sekali lagi rakyat terpaksa dipinggirkan, membungkuk-bungkuk, dan tunduk kepada kekuasaan represif yang melindungi para koruptor dan perampok berjubah pengusaha sukses!

Nyatalah sekarang bahwa sejarah rakyat Indonesia adalah sejarah ketertindasan. Dari waktu ke waktu, yang ada hanyalah tindakan meminggirkan rakyat oleh segelintir kaum elitnya. Pada masa kerajaan, kaum elitnya adalah raja dan kerabat kerajaan. Pada masa kolonial, kaum elitnya adalah para kolonialis yang berkolaborasi dengan golongan feodal. Pada masa kemerdekaan, kaum elitnya adalah presiden dan para pemimpin revolusi lainnya. Pada masa Orde Baru kaum elitnya adalah presiden dan para penguasa ekonominya. Sementara pada masa kini, kaum elitnya adalah mereka yang berada dalam jajaran eksekutif pemerintahan dan juga para wakil rakyat di parlemen.

Dengan kata lain, rakyat Indonesia telah berada dalam suatu sistem elitisme yang telah berurat berakar. Hal ini dapat pula dikatakan bahwa feodalisme lama hanya berganti baju menjadi feodalisme baru. Oligarki lama digantikan dengan oligarki baru, begitulah seterusnya yang terjadi hingga hari ini!

1.2. Pengkhianatan terhadap Reformasi

Dengan menyadari sejarah rakyat seperti dijelaskan di atas tersebut, maka janganlah sekali-sekali kita meyakini bahwa runtuhnya rezim Orde Baru sebagai kepastian berakhirnya sistem elitisme, feodal dan kolonial untuk selama-lamanya. Kita harus tetap waspada, bahwa upaya sistematis peminggiran rakyat terutama yang dimulai dari peminggiran ekonomi dan berujung pada peminggiran politis adalah tetap ada, karena inilah sejatinya ideologi yang berkembang di negeri kita. Kita harus menganggap bahwa era reformasi saat ini adalah seperti bayi merah yang sangat rentan, ringkih dan rawan terhadap gangguan kekuatan-kekuatan lama.

Reformasi dalam pengertian yang sebenarnya yaitu berjalannya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi secara bersamaan, saat ini tidak berjalan. Apabila demokrasi hanya diartikan sebagai kebebasan politik sementara pemberdayaan kehidupan ekonomi rakyat diabaikan, maka penderitaan rakyat pada masa depan akan merupakan suatu kepastian. Secara bertahap saat ini pun rakyat sudah mulai menunjukkan ketidakpuasannya, karena ternyata kebebasan politik

tidak diikuti dengan kesejahteraan ekonomi.

Hampir dapat dipastikan bahwa semua orang di Indonesia saat ini sedang menikmati demokrasi politik. Namun sebaliknya, hampir bisa dipastikan bahwa sebagian besar pengambil keputusan di Republik ini bersama dengan kaum elit ekonomi yang saat ini disebut konglomerat atau para pengusaha besar terutama yang diperoleh dengan cara KKN, akan keberatan apabila demokrasi ekonomi dilaksanakan. Terlebih lagi apabila demokrasi ekonomi tersebut harus memotong berbagai keuntungan yang tidak wajar yang telah mereka nikmati bertahun-tahun.

Karena itu tidaklah heran apabila dengan segala kemampuan dana dan pengaruhnya, diciptakanlah suatu kesan seolah-olah demokrasi adalah hanya kebebasan politik atau demokrasi politik, sementara kesejahteraan ekonomi sepenuhnya bergantung pada masing-masing individu dan semata-mata bergantung nasib. Tidaklah heran pula apabila mereka yang pada era Orde Baru sangat menikmati fasilitas ekonomi sehingga bisa disebut sebagai milyarder atau bahkan triliuner, akan bersekongkol dengan berbagai kekuatan politik dominan yang ada untuk memenangkan pemilu. Hal ini bisa terjadi dengan memanfaatkan keadaan rakyat kita yang masih feodal dan percaya takhyul atau mistik dengan tingkat pendidikan yang rendah, serta kehidupan ekonominya yang sangat miskin!

Keadaan masyarakat seperti ini, akan menjadi objek mobilisasi dan manipulasi bagi kaum yang punya uang yang bersekutu dengan petualang-petualang politik baru dengan mengatasnamakan demokrasi (*money politic*). Akibatnya sangatlah jelas, yaitu dengan telah dilaksanakannya pemilu bebas tahun 1999 lalu, ternyata penderitaan rakyat secara umum bukannya tambah berkurang tetapi tambah meningkat. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun!

Marilah sekarang kita melihat keadaan bangsa kita secara utuh. Nampaklah sudah, bahwa perkembangan masyarakat kita kian hari kian mengkhawatirkan. Cita-cita pemulihan ekonomi, pemberantasan KKN, stabilitas politik dan keamanan serta persatuan nasional terasa semakin menjauh dan semakin susah digapai. Dalam keadaan inilah kita kembali mempertanyakan makna sesungguhnya dari reformasi yang dengan segala

pengorbanan telah kita perjuangkan.

Mengapa dengan reformasi kehidupan kita justru semakin sulit? Mengapa reformasi yang telah berjalan empat tahun semakin menambah tenaga kerja yang di PHK sehingga menambah barisan pengangguran hingga berjumlah 40 juta orang termasuk lebih dari 2 juta kaum sarjana? Ada apakah dengan reformasi sehingga KKN berkembang dengan lebih dahsyat dan terjadi pada setiap lapisan birokrasi dan politisi? Mengapa dengan reformasi, kaum tani semakin sulit mendapatkan harga jual gabah yang layak sementara harga pupuk semakin mahal dan langka sehingga kaum tani semakin miskin? Di manakah hak upah yang layak bagi kaum buruh, sehingga mereka semakin sulit menjangkau harga-harga bahan pokok? Ada apa gerangan dengan reformasi sehingga gejolak daerah, konflik antar etnis, antar agama dan kebringasan sosial semakin menggejala? Ke manakah sesungguhnya reformasi diarahkan sehingga martabat bangsa kita semakin merosot dalam kancah pergaulan internasional?

Apabila kemelaratan dan ketidakadilan seperti di atas adalah bagian dari reformasi, maka dengan jelas kita menolak reformasi tersebut! Karena reformasi tersebut pastilah reformasi gadungan. Kenyataan-kenyataan itu adalah bukti adanya pengkhianatan terhadap reformasi yang sesungguhnya. Kita membutuhkan reformasi sejati, yaitu reformasi yang bisa mengangkat harkat dan martabat kita sebagai bangsa, mengangkat kesejahteraan dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa pandang bulu. Itulah reformasi sejati yang harus terus kita perjuangkan!

Kita sangat menyesalkan, bahwa orientasi kebijakan para penguasa dan wakil rakyat saat ini semakin menjauh dari harapan rakyat. Golongan *mustadh'afin* terpinggirkan, *wong cilik* semakin tercekik dan rakyat marhaen berubah menjadi kaum peminta-minta. Perlulah ditegaskan di sini bahwa apabila keadaan ini tidak juga berubah, maka rakyat dengan pasti akan frustrasi sehingga akan menimbulkan keresahan serta anarkhi di mana-mana! Akan munculnya keresahan dan anarkhi ini adalah sama pastinya dengan matahari yang akan terbit esok hari dari ufuk Timur. Bahkan sekarang pun, kita sudah bisa menyaksikan keresahan dan anarkhi tersebut di mana-mana.

1.3. Penjajahan Kembali (Rekolonisasi)

Apabila kita melihat berjalannya sistem kolonialisme di Indonesia sebelum kemerdekaan, maka setidaknya kita akan menemui tiga hal utama bekerjanya sistem kolonialisme tersebut, yaitu *pertama*, negeri kita menjadi sumber bahan baku, *kedua*, bangsa kita menjadi penyedia buruh yang sangat murah, *ketiga*, bangsa kita menjadi pasar bagi produk-produk asing. Ketiga hal tersebut akhirnya menjadikan tanah air kita sebagai tempat berkembangnya surplus modal asing yang pada gilirannya dibawa kembali ke negeri asal penjajah!

Saat ini kita menyaksikan semakin banyaknya industri pertambangan yang terjajar dari sabang hingga merauke yang dikuasai asing sementara buruh murahnya adalah orang Indonesia. Barisan pabrik-pabrik yang berada di kota-kota telah banyak yang dikuasai asing sementara buruh murahnya adalah orang Indonesia. Perkebunan-perkebunan yang subur juga secara bertahap telah dimiliki asing, sementara orang Indonesia hanya menjadi buruh upahan yang murah. Barisan hotel-hotel berbintang yang indah dipandang juga dimiliki oleh asing, sementara orang Indonesia tidaklah lebih sebagai pegawai rendahan atau penyedia jasa pelacuran (*the taste of Indonesia*).

Demikian juga dengan bisnis eceran dalam sekala besar seperti Carrefour, Makro, Hero dan sebagainya, semuanya telah dikuasai oleh asing. Bahkan yang lebih menyakitkan hati, usaha kerajinan ukir yang ada di berbagai daerah pun, sekarang sudah dikuasai oleh modal asing, sementara seniman-seniman jenius yaitu para pengukirnya telah berubah menjadi buruh upahan saja!

Dampak dari penguasaan modal asing ini adalah tersedotnya surplus atau penghasilan dari sumberdaya ekonomi bangsa kita, baik akibat investasi maupun perdagangan yang timpang yang kemudian dibawa ke negeri asalnya. Akibatnya, negeri-negeri tersebut semakin kaya sementara bangsa kita semakin miskin. Di sinilah kita perlu mengingat kembali wejangan Bung Karno, agar kita selalu berhati-hati sehingga tidak menjadi bangsa kuli atau kuli di antara bangsa-bangsa!

Mengenai bahan baku, Indonesia adalah sumber bahan baku yang

paling berharga. Tidak ada yang bisa menolak, bahwa tanah kita adalah tanah yang subur yang dapat menghasilkan berbagai bahan baku olahan. Namun, karunia Tuhan ini ternyata juga belum bisa banyak memberi manfaat karena sebagian besar pengolahannya dilakukan bukan oleh bangsa kita sendiri sehingga keuntungan terbesar sekali lagi untuk bangsa asing.

Sebagai pasar bagi produk-produk asing, Indonesia adalah pasar yang sangat luas karena penduduknya sekitar 220 juta jiwa. Dengan alasan globalisasi serta berlindung di balik WTO dan persetujuan IMF, produk-produk asing semakin menguasai pasar dalam negeri termasuk produk-produk pertanian sehingga meminggirkan puluhan juta petani di negeri kita. Kedelai, gula, bahkan beras dan sebagainya yang merupakan kebutuhan pokok rakyat pun, bangsa kita mengimpornya. Secara umum, produk-produk asing telah mampu merubah orientasi pemimpin dan masyarakat kita untuk tidak mencintai produknya sendiri!

Masyarakat kita lebih suka menggunakan produk-produk asing, walau sesungguhnya mutunya tidak lebih baik dari buatan bangsa sendiri. Alat-alat rumah tangga harus asing, sandang harus asing, serta keperluan konsumsi pun harus asing. Bahkan yang sangat menyakitkan hati, suatu produk asing dengan bangga dibeli oleh masyarakat kita, padahal barang tersebut diproduksi di Indonesia, hanya saja di beri cap atau stempel asing. Nyatalah di sini bahwa kita telah kehilangan kebanggaan sebagai suatu bangsa!

Karena itu wajarlah apabila kita menyatakan bahwa sekarang ini, kita sedang menghadapi ancaman rekolonisasi. Apabila kita perhatikan hal-hal di atas, maka sesungguhnya bangsa kita secara ekonomi tidak berbeda dibanding pada zaman kolonialisme dulu. Hanya saja, presidennya, wapresnya, gubernur-gubernurnya, panglima-panglima militernya, dan pejabat-pejabat tinggi negaranya masih orang Indonesia. Namun isinya, saripatinya atau substansinya, tidak lain dan tidak bukan adalah sama dengan zaman kolonialisme! Kalau dulu penjaga sistem ini adalah militer yang berseragam dan berkumpul di benteng-benteng pertahanan, maka sekarang kaum berdasi dan berjas yang berkumpul di pusat-pusat keuangan. Kalau dulu yang menjajah kita adalah negara tunggal yaitu

Belanda, maka sekarang dilakukan berbagai negara, melalui perusahaan-perusahaan multi nationalnya (MNCs). Dengan kata lain, VOC telah digantikan oleh MNCs.

Kita memang tidak anti terhadap modal asing. Namun janganlah modal asing membuat kita terlena sehingga kita mengobral semua kekayaan kita kepada mereka, padahal kita sesungguhnya mampu mengelolanya dan mendapatkan keuntungan daripadanya. Saat krisis seperti ini, kita memang membutuhkan modal asing, kita membutuhkan investasi asing, namun jadikanlah hal tersebut sebagai upaya untuk memacu diri, sambil terus-menerus memperbaiki kemampuan sendiri, sehingga suatu saat bisa berdikari.

Modal asing haruslah kita sikapi sebagai fenomena kesementaraan, bukan fenomena ketergantungan. Kita harus yakin, bahwa suatu hari kita pun sanggup untuk mengerjakan sendiri dan dengan modal sendiri berbagai bentuk kegiatan ekonomi. Kita harus mencari keseimbangan baru (*new equilibrium*) antara modal asing dengan modal sendiri. Janganlah semuanya menjadi serba asing sehingga kita semakin malu dan kehilangan harga diri sebagai bangsa!

Keadaan yang semakin tidak pasti ini, sesungguhnya diakibatkan dari tidak jelasnya visi orang yang mengaku dirinya sebagai pemimpin. Bahkan mereka pun bukannya menyatukan visi kenegarawanan untuk lebih mengangkat harkat dan martabat bangsa, tetapi sebaliknya bertengkar satu sama lain untuk sekedar merebut kursi kekuasaan! Sebagian dari mereka memang bersatu tetapi bukan di bawah payung penderitaan rakyat. Mereka bersatu di bawah payung golongan, payung aliran, payung etnis, payung kelompok dan sebagainya sehingga akibatnya sebagian besar rakyat tetap saja menderita!

Payung penderitaan rakyat adalah getirnya kehidupan kaum buruh dan keluarganya yang serba melarat. Payung penderitaan rakyat adalah keadaan petani yang semakin miskin padahal telah bekerja dengan sangat giatnya. Payung penderitaan rakyat adalah masyarakat yang terluka dan mati akibat pertentangan etnis, agama atau tindakan terorisme. Payung penderitaan rakyat adalah bayi-bayi yang kekurangan gizi sehingga sel-sel otaknya tidak tumbuh sehingga menjadi ancaman

hilangnya sebuah generasi. Payung penderitaan rakyat adalah anak-anak jalanan yang berjumlah semakin banyak yang seharusnya mereka berada di taman bermain di sekolah-sekolah. Payung penderitaan rakyat adalah ketergantungan jutaan pemuda kepada narkoba. Payung penderitaan rakyat adalah usaha kecil dan menengah serta sektor informal yang bukan didorong untuk berkembang tetapi justru semakin sekarat dan tergusur. Payung penderitaan rakyat adalah ancaman globalisasi dan rekolonisasi yang akan membawa bangsa kita ke jurang kesengsaraan.■

BAB II

KEKUATAN KESATU DAN KEKUATAN KEDUA TELAH MENJADI KEKUATAN LAMA

SUDAH pasti ada banyak keganjilan yang timbul dalam benak kita setelah menyaksikan jalannya reformasi yang ternyata tidak mampu mengatasi berbagai krisis sosial, politik, keamanan dan ekonomi bangsa kita. Keganjilan-keganjilan ini tentu ada sebabnya, dan karena itulah kita perlu menyelidikinya dengan lebih kritis. Dengan sekejap dapat kita katakan, penyebab yang utama di antaranya adalah karena era reformasi saat ini hanya diartikan dengan penggantian pemegang kekuasaan tetapi melupakan bahwa kekuatan-kekuatan lama telah membentuk suatu sistem dan tata nilai yang begitu kuat dan kokoh! Karena itulah kita perlu menyelidiki bagaimana bekerjanya sistem dan nilai yang membentuk kekuatan-kekuatan lama itu.

2.1. Kekuatan Lama Berganti Kulit

Gagalnya pelaksanaan agenda reformasi setelah lebih dari empat tahun sudah pasti karena adanya kekuatan-kekuatan lama yang bekerja untuk menghalanginya. Kita seringkali menganggap bahwa kekuatan lama adalah identik dengan orang-orang atau aktor-aktor lama. Sehingga, setelah kita berhasil menjatuhkan orang-orang lama tersebut, kita beranggapan bahwa reformasi pasti berjalan.

Anggapan ini jelaslah salah karena kekuatan lama seharusnya kita artikan sebagai sistem dan nilai-nilai lama yang diterapkan. Karena itu, apabila sistem dan nilai yang diterapkan itu adalah sistem dan nilai lama tetapi dijalankan oleh orang atau aktor baru, maka kita dengan

pasti dapat mengatakan bahwa kekuatan lama sedang dijalankan kembali. Ini artinya, sampai matahari terbit dari Barat pun kita tidak akan pernah menyaksikan jalannya reformasi secara efektif! Bahkan yang pasti terjadi adalah pengkhianatan demi pengkhianatan terhadap reformasi.

Kekuasaan Orde Baru yang disimbolkan oleh Soeharto sebagai presiden memang telah jatuh. Namun, bahaya pertama yang kita hadapi adalah saat kita beranggapan bahwa jatuhnya Presiden Soeharto juga berarti runtuhnya sistem, karakter dan jiwa Orde Baru. Bahaya itu ternyata dilanjutkan oleh bahaya berikutnya yaitu banyaknya kaum oportunis yang anti rakyat yang kemudian berganti kulit menjadi kaum reformis dadakan dan bahkan ikut menjalankan pemerintahan-pemerintahan berikutnya!

Tanpa kita sadari, karakter dan jiwa Orde Baru telah merasuk ke berbagai lapisan dan golongan masyarakat. Tidak saja pada mereka yang berada di puncak-puncak birokrasi, tetapi juga sampai pada aparat yang paling rendah misalnya di kelurahan-kelurahan. Bahkan sifat-sifat feodal, serakah, culas, maling dan sebagainya juga sudah merasuk dan menjadi kebiasaan para tokoh sampai pada masyarakat yang paling bawah. Dengan kata lain, karakter dan jiwa yang tidak bermartabat ini telah mentradisi dan berurat berakar dalam masyarakat Indonesia.

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru memang diikuti oleh bermunculannya berbagai kekuatan politik secara lebih semarak. Kekuatan-kekuatan politik ini ternyata tidak jauh berbeda dengan kekuatan-kekuatan politik sebelum Orde Baru berkuasa, yaitu ditandai dengan adanya politik aliran atau golongan. Walaupun kemunculan kekuatan politik tersebut begitu banyak, namun secara kategoris, kita bisa membedakan adanya dua kekuatan utama yaitu kekuatan nasionalis sekuler yang kita sebut sebagai Kekuatan Kesatu dan kekuatan nasionalis religius yang kita sebut sebagai Kekuatan Kedua. Kekuatan lainnya yaitu internasionalisme yang dijalankan oleh kaum sosialis-komunis, tidak muncul secara berarti karena telah dihancurkan selama era Orde Baru yang diperlemah lagi oleh semakin surutnya kekuatan ideologi ini di tingkat internasional.

Walaupun kedua kekuatan ini merupakan warisan dari para pendiri bangsa (*founding fathers*), namun dapatlah kita pastikan bahwa isi atau

ruh dari kekuatan-kekuatan politik itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita awalnya. Bahkan dengan seyakin-yakinnya pula kita bisa mengatakan bahwa tokoh-tokoh yang sekarang memanggul panji-panji kedua kekuatan tersebut telah mengkhianati para penggagas awalnya. Pemimpin kaum nasionalis yang berkuasa saat ini telah mengkhianati pemikiran-pemikiran Bung Karno sehingga melupakan kaum marhaen. Para pemimpin ummat Islam telah pula mengkhianati cara berjuang HOS Tjokroaminoto yang sangat setia menjalankan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu membela kaum *mustadh'afin*!

Saat ini, kedua kekuatan tersebut sedang berada di tampuk kekuasaan, baik itu yang berada dalam tubuh pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, maupun yang berada dalam MPR/DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kita harus menyelidiki bagaimana kedua kekuatan ini bekerja dan mempertanyakan mengapa kedua kekuatan ini ternyata tidak mampu menjalankan agenda reformasi terutama sekali kegagalan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.2. Kekuatan Kesatu dan Kekuatan Kedua

Di Indonesia, pemikiran tentang nasionalisme lahir akibat adanya penjajahan khususnya oleh Belanda. Keinginan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan inilah yang kemudian semakin mengkristalkan pemikiran nasionalisme yaitu sebagai dasar pembentukan negara modern. Hal ini memang berbeda dari proses pembentukan nasionalisme khususnya di Eropa yaitu yang muncul sebagai perlawanan terhadap sistem feodal untuk membentuk negara modern.

Pemikiran nasionalisme ini kemudian tumbuh dan berkembang pada saat kehendak untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda begitu kuat. Para pemimpin dari berbagai daerah bersepakat untuk membangun kekuatan bersama secara nasional dan mengusir penjajah agar tidak lagi mengeksploitasi bangsa Indonesia. Pengerukan sumber-sumber bahan baku olahan, penghisapan tenaga kerja dan pengekangan secara politik dan militer, telah menyadarkan para pemimpin dan rakyatnya untuk segera membebaskan diri dari penjajahan.

Ketika itu, kekuatan-kekuatan politik semakin bahu-membahu untuk mencapai Indonesia merdeka dan membentuk suatu bangsa (*nation*) dan negara modern. Kesamaan untuk mencapai Indonesia merdeka inilah yang kemudian memperkecil konflik-konflik pemikiran yang bersifat ideologis dari berbagai kekuatan politik. Karena itulah kemudian nasionalisme Indonesia menjadi asas yang memimpin dalam proses kemerdekaan hingga beberapa tahun pasca kemerdekaan.

Benih-benih perbedaan sebelum kemerdekaan muncul kembali pada era pasca kemerdekaan yang kemudian di antaranya membagi tiga kekuatan besar yaitu kekuatan nasionalis sekuler, kekuatan nasionalis religius dan kekuatan sosialis-komunis. Secara umum, perbedaan dari dua kekuatan nasionalis di atas adalah kaum nasionalis sekuler menolak masuknya syariat agama dalam hal ini Islam ke dalam kehidupan bernegara, sedangkan kaum nasionalis religius bertindak sebaliknya. Sementara itu, kekuatan sosialis-komunis dengan asas internasionalismenya menghendaki adanya suatu perjuangan kolektif di tingkat internasional untuk membangun masyarakat komunis secara bersamaan tanpa harus terjebak oleh sekat-sekat nasionalisme. Kekuatan nasionalis sekuler pada waktu itu didukung terutama oleh PNI, kekuatan nasionalis religius didukung terutama oleh Masyumi dan NU, sedangkan kekuatan internasionalis didukung oleh PKI.

Kita menyaksikan dalam perjalanannya, ternyata kekuatan-kekuatan politik tersebut tidak berhasil mengisi kemerdekaan dengan optimal karena pertarungan ideologi mendominasi dinamika politik yang menyebabkan jatuh bangunnya kekuasaan pemerintahan. Karena itulah pada waktu itu, bangsa kita dapat dikatakan bangsa yang tidak produktif hingga kemudian melahirkan Orde Baru.

Pada tahap awal perkembangannya, Orde Baru memang bisa dikatakan sebagai alternatif dari upaya mengisi kemerdekaan. Kita juga menyaksikan bahwa pada era ini hubungan dengan negeri-negeri penjajah dalam hal ini negara-negara Barat, mulai dibina kembali untuk memulihkan keadaan ekonomi bangsa yang sangat murat-marit, bahkan mencapai inflasi hingga 650%. *Open door policy* menyebabkan para penanam modal asing berdatangan ke tanah air untuk secara bertahap

menguasai berbagai kegiatan ekonomi. Karena itu tidaklah heran, jika dikatakan ide-ide nasionalisme pada tahap ini telah mulai kehilangan pengikutnya dan digantikan dengan ide-ide pragmatisme, yang tiada lain adalah cara bermasyarakat dalam sistem kapitalisme.

Cara berpikir pragmatis dan kapitalistis ini kemudian dipaksakan dengan kekuatan represifnya untuk disebarkan ke seluruh tubuh kekuatan-kekuatan politik yang ada, baik ke dalam tubuh kekuatan nasionalis sekuler maupun kekuatan nasionalis religius, dan berlangsung selama 32 tahun atau selama Orde Baru berkuasa. Sementara itu, kekuatan sosialis-komunis telah dihancurkan hingga ke akar-akarnya juga dalam periode yang sama, sehingga tidak muncul secara berarti pasca pemerintahan Orde Baru.

Karena itulah kaum nasionalis sekuler yang muncul kembali saat ini merupakan kaum nasionalis sekuler yang mewariskan watak Orde Baru walaupun masih tetap memakai simbol-simbol para pendiri bangsa khususnya Bung Karno dengan tujuan sebatas mencari dukungan massa. Kesimpulan ini juga dapat dibuktikan dengan melihat pewaris utama kekuatan nasionalis sekuler yaitu PDI-P yang ternyata dapat bekerjasama dan bahu-membahu bersama kekuatan-kekuatan Orde Baru dalam menetapkan keputusan-keputusan penting.

Demikian juga dengan kemunculan kembali kaum nasionalis religius yang dipelopori oleh partai-partai Islam, ternyata tidak jauh berbeda dengan kaum nasionalis sekuler dalam hal mengambil keputusan-keputusan penting yaitu bisa berkerjasama dengan kekuatan-kekuatan Orde Baru. Hanya saja yang membedakan, mereka menyisipkan suatu agenda untuk memasukkan prinsip-prinsip syari'ah dalam konstitusi. Lebih jauh dari itu, kedua kekuatan ini hanya berkutat pada hal-hal yang bersifat bagi-bagi kekuasaan tanpa memikirkan lebih jauh fungsi kekuasaan untuk penyejahteraan, pencerdasan, dan pembudayaan rakyat!

2.2.1. Demokrasi yang Elitis

Terberangusnya demokrasi telah dapat diakhiri saat gerakan reformasi mencapai puncaknya dengan menjatuhkan Presiden Soeharto.

Saat itu, kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul berjalan dengan baik hingga dilaksanakannya pemilu multi partai tahun 1999. Bulan demi bulan, tahun demi tahun ternyata tidak meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Bahkan tahun ini, laporan UNDP mengenai Index Pembangunan Manusia (*Human Development Index*), Indonesia masuk dalam urutan ke 110 dari 173 negara atau menurun dari urutan 102 jika dibanding tahun sebelumnya.

Kaum nasionalis sekuler maupun kaum nasionalis religius saat ini memahami demokrasi hanya sebagai demokrasi politik. Mereka beranggapan bahwa dengan sudah adanya demokrasi politik, maka seolah-olah tugas kepemimpinan juga sudah selesai. Bagi mereka, jika semua orang sudah memiliki hak yang sama untuk memilih atau dipilih adalah sudah cukup. Apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah dia pemuda atau orang jompo, apakah dia suku Batak atau suku Sunda, apakah dia beragama Islam atau Kristen atau Hindu, apakah dia kaum buruh atau majikan, apakah dia petani atau tuan tanah dan sebagainya, semuanya memiliki hak politik yang sama! Itulah semangat demokrasi yang diyakini oleh kedua kekuatan politik yang sekarang ada.

Karena itu, setelah pemerintahan terbentuk secara demokratis, maka negara boleh berbuat apa saja atau tidak berbuat apa saja asal tidak melanggar peraturan. Apabila negara menafsirkan bahwa para konglomerat tidak bersalah walau secara kasat mata kita jelas-jelas dapat melihat kesalahannya, maka negara boleh saja tidak menghukum konglomerat tersebut. Demikian juga para pembobol BLBI yang jumlahnya hingga Rp. 144,5 trilyun, kalau negara menafsirkan itu tidak membobol, maka protes sebesar apapun dari kaum cendikia dan rakyat, akan dianggap angin lalu saja. Ini semua karena setiap keputusan negara dianggap keputusan mayoritas rakyat. Demikian juga, mereka menganggap bahwa aparatur-aparatur negara dipilih secara mayoritas oleh rakyat!

Dengan kata lain orientasi demokrasi yang demikian itu adalah orientasinya demokrasi liberal, yaitu demokrasinya kaum borjuis Eropa pasca runtuhnya sistem feodalisme kerajaan-kerajaan tepatnya pasca Revolusi Perancis tahun 1789. Demokrasi demikian lahir bukan karena perjuangan rakyat semesta melainkan karena dorongan kaum elit pedagang dan

usahawan agar pengelolaan bisnisnya tidak serba diatur oleh raja. Karena itu, sistem demokrasi liberal ini tidak mampu bertahan lama karena ternyata dengan melaksanakan demokrasi yang demikian, sebagian rakyat jauh tertinggal, sementara segelintir elit ekonomi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

Lebih membahayakan lagi, dengan anggapan bahwa berkembangnya perekonomian harus terjadi di atas stabilitas politik, maka penguasa dapat memanfaatkan kekuasaan politiknya untuk meredam gerakan-gerakan populis kerakyatan. Hal ini berarti kecendrungan untuk mengarah pada pemerintahan ototoriter akan terjadi lagi. Hanya saja, kalau pada era Orde Baru kita mengalami otoritarianisme berbasis senjata, maka pada era demokrasi yang demikian, kita mengalami otoritarianisme berbasis massa. Namun keduanya tetaplah sama yaitu otoritarianisme!

Dengan gamblang kita bisa menyaksikan kembali kemunculan otoritarianisme ini misalnya dengan pemberlakuan kembali pasal-pasal *haatzai artikelen* atau pasal-pasal karet seperti pasal penghinaan terhadap presiden dan sebagainya. Beberapa aktivis gerakan saat ini telah ditahan dan diadili dengan tuduhan melanggar pasal tersebut karena mencorat-coret dan menginjak-injak foto Presiden dan Wakil Presiden.

Apabila pada era Orde Baru kita seringkali menyaksikan penggusuran terhadap kaum marhaen, petani, pedagang kaki lima dan sebagainya yang dilakukan oleh petugas negara yang didukung oleh tentara, maka saat ini penggusuran itu juga dilakukan oleh petugas negara tetapi didukung oleh satgas partai yang berkuasa. Apabila pada era Orde Baru gerakan mahasiswa dihadang oleh tentara, maka pada era sekarang gerakan mahasiswa dihadang oleh massa fanatik dan massa satgas partai yang berkuasa!

Melaksanakan sistem demokrasi liberal di tengah-tengah masyarakat yang masih bercorak feodal tidak akan menghasilkan suatu *check and balance* atau kontrol dari parlemen terhadap kekuasaan pemerintahan. Bahkan yang terjadi justru adanya suatu persekongkolan antara DPR dengan pemerintah antara DPRD Propinsi dengan Gubernur dan antara DPRD Kabupaten/Kota dengan Bupati/Walikota. Karena itu kita tidak perlu heran apabila ada keputusan pemerintah yang nyata-nyata meru-

gikan rakyat, tetapi mendapat dukungan yang kuat dari parlemen!

Kalau pada era Orde Baru KKN merebak karena birokrasi yang otoriter dan tertutup sehingga menimbulkan KKN, maka pada era sekarang, KKN tidak saja dilakukan oleh birokrasi tetapi juga bisa oleh politisi, anggota-anggota parlemen, pengurus-pengurus teras partai dan sebagainya. Karena itulah kita seringkali mendengar kaum cendikia, yang mengatakan bahwa dalam era reformasi ini, KKN semakin menjadi-jadi dan dilakukan oleh jauh lebih banyak orang!

Kalau pada era Orde Baru kita menyebutnya dengan istilah otoriter-birokratik-rente maka pada era sekarang ini kita menyebutnya konspiratif-birokratik-rente. Kata konspiratif ini bisa antara DPR-birokrasi, DPR-birokrasi-pengusaha, birokrasi-politisi dan sebagainya, sehingga mereka yang berkonspirasi akan mendapatkan dana dari hasil rente atau keuntungan yang tidak diperoleh dari hasil kegiatan ekonomi produktif.

Dapatlah sekarang kita menyimpulkan bahwa baik kekuatan kesatu maupun kekuatan kedua, atau kekuatan nasionalis sekuler maupun nasionalis religius, mengartikan demokrasi sebatas pemenuhan hak-hak politik saja. Sementara hak-hak yang lainnya terutama hak-hak ekonomi adalah urusan masing-masing individu. Karena itu, saat ini kita sering menyaksikan perdebatan-perdebatan yang dilakukan oleh kedua kekuatan tersebut hanyalah yang menyangkut hal-hal politik kekuasaan. Sementara hal-hal penting yang menyangkut kesejahteraan sosial, ekonomi rakyat, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya yang diluar politik kekuasaan, tidak menarik untuk mereka perbincangkan.

2.2.2. Ekonomi yang Anti Rakyat

Tidak ada hal lain yang paling ditunggu-tunggu oleh rakyat pada era reformasi selain keberhasilan pembangunan ekonomi yang dapat mengangkat harkat dan martabatnya dari keterpurukan dan kesengsaraan. Pertumbuhan ekonomi pada era Orde Baru yang tumbuh secara menakjubkan, ternyata tidak ditopang oleh fondasi ekonomi rakyat yang kuat, sehingga dengan adanya badai krisis mata uang, langsung dapat menghancurkan sendi-sendi perekonomian lainnya. Hal ini tidak terjadi

pada negara-negara tetangga kita yang ternyata mampu pulih kembali hanya dalam hitungan satu atau dua tahun.

Gagalnya pemulihan ekonomi ini di antaranya karena tidak adanya perencanaan ekonomi yang terpadu, melainkan hanya melaksanakan kebijakan ekonomi tambal-sulam dalam kerangka ekonomi pasar bebas. Para perancang ekonomi selama ini sangat percaya kepada sistem ekonomi pasar bebas dan bahkan terkesan menuhankannya. Dengan penerapan prinsip ini, maka upaya pemberdayaan ekonomi rakyat oleh pemerintah tidak mendapat perhatian serius, karena dalam sistem pasar bebas, intervensi pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat dibuat sekecil-kecilnya. Pemerintah yang paling baik adalah pemerintah yang paling sedikit mengatur (*the best government is the one who govern least*). Itulah motto dari mereka yang menganut prinsip pasar bebas atau yang kita kenal sekarang penganut paham neo-liberal!

Karena itulah apabila sistem ini diterapkan dalam sebuah masyarakat yang para pelaku ekonominya belum setara (*same level playing field*) baik dalam hal pengetahuan dan manajemen, teknologi, permodalan, dan sebagainya, maka akan selalu terjadi si kuat memakan si lemah, si besar memakan si kecil, si pintar memakan si bodoh dan sebagainya. Inilah yang sekarang sedang berlangsung di negeri kita!

Penerapan prinsip-prinsip pasar bebas di mana si kuat memakan si lemah ini tidak saja terjadi di dalam negeri tetapi juga dalam hubungannya dengan perekonomian internasional. Negara kuat akan memakan negara lemah, atau negara maju akan memakan negara berkembang. Lebih parah lagi, dalam keadaan perekonomian dalam negeri yang masih sangat rapuh, kita seolah-olah telah berani berlagak untuk tampil mengikuti liberalisasi perdagangan dan investasi di tingkat dunia yang dikomandani WTO (*World Trade Organisation*). Padahal dalam ketentuan-ketentuan WTO tersebut, kita masih dimungkinkan untuk melakukan proteksi atau campur tangan pemerintah dalam rangka melindungi perekonomian dalam negeri.

Kasus-kasus keributan akibat perdagangan internasional saat ini semakin merebak. Kita masih ingat bagaimana para petani tebu protes beramai-ramai karena adanya kebijakan impor gula dengan harga yang

lebih murah sehingga akan mematikan usaha jutaan petani dan buruh dalam negeri. Impor paha ayam dari Amerika Serikat yang sempat menghebohkan itu, adalah juga bukti dari para pemegang kebijakan sangat mendukung perdagangan bebas dunia walaupun harus mengorbankan nasib peternak dan produsen dalam negeri. Kita juga menyaksikan bagaimana buah-buahan impor begitu menguasai perdagangan di negeri kita. Belum lagi barang-barang lainnya, yang sesungguhnya pemerintah masih memiliki kekuasaan untuk melakukan proteksi dalam rangka mengembangkan produk dalam negeri sehingga kelak bisa lebih efisien dan mampu bersaing dengan terhormat.

Kebijakan pemerintah yang demikian itu, sesungguhnya merupakan bagian kecil saja dari agenda tersembunyi masyarakat kapitalis internasional dalam rangka menguasai negara-negara dunia ketiga. Dengan menggunakan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan seperti IMF, World Bank dan WTO, serta jeratan hutang luar negeri, mereka dapat menekan negara-negara dunia ketiga untuk mengikuti agenda mereka tersebut. Kita mengenal apa yang disebut SAP (*structural adjustment policy*) atau penyesuaian struktural dari pelaksanaan kegiatan ekonomi negara-negara berkembang, yang tidak lain adalah daftar perintah untuk mengikuti agenda mereka!

Dengan SAP inilah agen-agen kapitalis internasional menekan pemerintah kita untuk membebaskan impor atau mengurangi bea masuk, melaksanakan kebijakan uang ketat (*tight money policy*) sehingga bunga menjadi tinggi dan terjadi pembatasan kredit termasuk untuk sektor usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK). Demikian juga dengan penghapusan subsidi dan peningkatan harga-harga keperluan umum seperti listrik, telepon, transportasi dan BBM. Sementara harga-harga melonjak dengan cepat, kaum buruh ditekan sedemikian rupa untuk tetap bertahan dengan upah yang sangat rendah. Bahkan yang juga menggetirkan adalah perintahnya untuk tidak terlalu memperhatikan biaya pelayanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan, serta jaring pengaman sosial bagi keluarga yang sangat miskin.

Pada saat-saat kesulitan begitu mencengkram rakyat, maka diperintahkanlah para pemegang kebijakan pemerintahan kita untuk menjual

aset-aset penting yang dimiliki negara berupa BUMN maupun aset-aset negara yang telah dikuasai BPPN, dengan alasan untuk mengatasi defisit anggaran belanja. Dengan tekanan yang kuat tersebut, maka pemodal swasta baik lokal maupun asing dengan leluasa serta dengan harga yang sangat murah membeli aset-aset negara tersebut. Swastanisasi BUMN ini juga merambah kepada usaha-usaha yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti bank, industri-industri strategis, jalan tol, perkebunan, listrik, air minum dan sebagainya.

Dengan berbagai kebijakan liberal yang dilaksanakan dari pemerintahan Orde Baru hingga kini, sampailah kemudian kita pada keadaan kesengsaraan seperti sekarang. Jumlah penganguran meningkat menjadi lebih dari 40 juta orang termasuk lebih dari 2 juta orang di antaranya adalah sarjana, belum lagi ditambah dengan jumlah ter-PHK akibat swastanisasi, bangkrutnya perusahaan-perusahaan bermasalah, pemulangan TKI dari Malaysia, dan yang terakhir, peristiwa baru di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 lalu. Jumlah orang miskin terus bertambah, yang apabila memakai standar Bank Dunia berjumlah lebih dari 120 juta orang.

Pada tahun 2000, UNICEF melaporkan terdapat 10 juta anak Indonesia kekurangan energi protein (KEP), tahun 1998 SUSENAS melaporkan sekitar 2,4 juta bayi di bawah umur lima tahun (balita) menderita gizi buruk dan 7 juta lainnya kekurangan gizi. Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI 1997) dari sekitar 4,3 juta bayi yang dilahirkan terdapat sekitar 305.000 balita meninggal sebelum ulang tahun ke-5. Dengan fakta-fakta ini, sudah pasti kita akan terancam oleh hilangnya sebuah generasi (*lost generation*) pada masa depan, yaitu peristiwa yang paling menakutkan bagi suatu bangsa!

Kita menyaksikan bagaimana kemudahan-kemudahan diberikan kepada konglomerat dan usaha besar bermasalah hingga membebani rakyat dengan mengalokasikan dana APBN sekitar Rp. 60 trilyun per tahun untuk pembayaran bunga obligasi rekapnya. Sementara itu bagi UKM yang meminjam di bawah Rp. 5 milyar banyak yang dikejar-kejar bahkan hingga didatangi penagih utang (*debt collector*) agar segera menyerahkan jaminan seperti misalnya rumah dan sebagainya, padahal usahanya masih berjalan dengan baik.

Demikian juga kita menyaksikan semakin banyaknya petani kita yang tidak memiliki tanah karena tergusur oleh pemodal besar sehingga mereka menjadi buruh tani atau petani gurem saja. Bahkan, hasil penelitian Departemen Pertanian tahun 2000, mengungkapkan bahwa sekitar 80% rumah tangga petani dari sekitar 21 juta petani, memiliki tanah kurang dari 0,5 hektar, di mana hal ini jauh meningkat bila dibanding tahun 1993 yang berjumlah 57%. Sementara itu pada tahun 1993 juga, sekitar 28% petani tidak menguasai tanah atau menguasai hanya kurang 0,1 hektar. Belum lagi kita mengetahui bahwa nilai tukar (*term of trade*) petani Indonesia yang bernilai sangat kecil dan bahkan beberapa kali mengalami negatif, akibat semakin mahalnya harga input pertanian seperti pupuk sementara harga jual hasil panennya semakin rendah!

Mahalnya biaya pendidikan, telah mengancam jutaan anak usia belajar terpaksa putus sekolah sehingga menambah jumlah anak rawan terlantar. Dari hasil Survai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh BPS dan Depsos tahun 1998, menunjukkan jumlah anak terlantar usia 6 – 18 tahun di seluruh Indonesia sebanyak 2.767.629 anak, 492.281 di perkotaan dan 2.275.348 di pedesaan. Jumlah anak yang rawan terlantar adalah 10.322.674 orang, 2.996.253 di perkotaan dan 7.326.421 di pedesaan.

Itulah beberapa fakta kesengsaraan rakyat kita, yang tentunya membuat bulu kuduk kita berdiri. Apabila gaya pemerintahan masih tetap saja bertahan seperti sekarang, maka terobosan untuk segera memulihkan perekonomian hampir pasti menemui jalan buntu. Dengan jebakan hutang saja, termasuk hutang luar negeri dan domestik, pemerintah sudah sulit untuk bergerak, mengingat hampir 40% APBN tahun 2002 ini digunakan untuk membayar hutang yang jumlahnya sekiktar Rp. 130 trilyun termasuk menalangi hutang dalam negeri swasta konglomerat yang dibebankan kepada pemerintah. Dengan hutang pemerintah yang demikian besar di tambah lagi hutang luar negeri swasta yang berjumlah US$ 67 milyar, maka semakin sempurnalah kesulitan dalam pemulihan ekonomi!

Terlalu banyak memang fakta-fakta penderitaan yang sedang dialami oleh rakyat Indonesia. Namun demikian, di tengah-tengah fakta penderi-

taan ini, tidak kurang kita menyaksikan semakin bertambahnya sekelompok masyarakat yang hidup bermewah-mewahan. Mobil-mobil impor yang maha mewah berharga di atas Rp. 1 milyar sungguh takjub dipandang terlebih lagi di luar kaca jendelanya terdapat anak-anak yang seharusnya berada di taman bermain sedang merintih meminta-minta. Demikian juga di tempat-tempat perbelanjaan yang super megah, kita menyaksikan pengunjung datang berduyun-duyun membeli barang impor yang mahal seolah-olah sedang tidak terjadi keprihatinan yang mendalam di Republik ini!

2.2.3. Hukum yang Menghamba pada Kekuasaan dan Materi

Pelaksanaan hukum di negeri kita secara umum mengalami tiga kali ketidakadilan. *Pertama*, adalah ketidakadilan dalam materi atau substansi, *kedua*, ketidakadilan dalam pelaksanaan karena perilaku aparatur penegak hukumnya, dan *ketiga*, ketidakadilan karena kelembagaannya.

Seringkali dalam pelaksanaan hukum, kita menyaksikan suatu materi hukum tidak berpihak pada orang-orang kecil. Misalnya saja kita sering menyaksikan aturan hukum yang membenarkan terjadinya proses penggusuran tanah-tanah rakyat dengan mengatasnamakan kepentingan umum. Demikian juga kita seringkali menyaksikan dengan mudahnya para aktivis ditangkap dan ditahan karena memang aturan hukum membenarkannya!

Dalam pelaksanaannya, aparatur penegak hukum termasuk polisi, jaksa, hakim dan bahkan pengacara, seringkali menyulitkan rakyat, karena tidak terbebasnya mereka dari perilaku KKN dan penghambaan terhadap kekuasaan dan materi. Dengan keadaan yang sedemikian hancur, maka semakin sulitlah rakyat kita untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum!

Dalam hal kelembagaan hukum, berbagai kasus seringkali menemui jalan buntu atau tidak terselesaikan karena mekanisme kelembagaan hukumnya yang tidak memadai. Berbagai kasus perburuhan misalnya, seringkali tertunda-tunda karena harus mengikuti begitu banyak jenjang

dari tingkat pegawai perantara, P4D, P4P, Veto Menteri sampai dengan tingkat PTUN dan Kasasi. Akibatnya, karena buruh tidak memiliki tabungan yang cukup untuk membiayai hidupnya, maka seringkali mereka akhirnya memenuhi keputusan hukum yang tercepat walaupun tidak menguntungkan, asalkan segera dapat kepastian. Karena itu, secara umum masalah kelembagaan hukum ini berkaitan erat dengan munculnya ketidakpastian hukum.

Gerakan reformasi memang terus mengumandangkan pentingnya supremasi hukum di atas supremasi politik. Namun sangat disayangkan karena kumandang tersebut ternyata berhenti sampai tingkat wacana. Kita masih seringkali menyaksikan bahwa supremasi politik berada di atas supremasi hukum. Berbagai kasus yang menimpa pejabat negara atau orang-orang yang memiliki atau terkait dengan orang yang penting, seringkali lolos dari jeratan hukum. Kalaupun mereka harus diperiksa oleh polisi atau jaksa, maka tidak lama kemudian berita pemeriksaan itu lenyap tertiup angin sampai akhirnya rakyat melupakan. Memang ada beberapa terdakwa yang akhirnya divonis bersalah oleh hakim, tetapi itu hanya beberapa saja dibanding banyaknya indikasi pelaku kejahatan yang bisa dijadikan terdakwa tetapi berhasil diloloskan oleh mafia penegak hukum.

Hal yang sama juga kita saksikan misalnya dalam penanganan para koruptor yang telah membobol uang negara, baik itu berupa penyalahgunaan pinjaman maupun penyelewengan dana BLBI yang jumlah keseluruhannya sekitar Rp. 800 trilyun. Mereka yang dituduh menggelapkan dana hingga trilyunan rupiah sampai saat ini masih hidup dengan mewah dan selalu bisa lolos dari jeratan hukum dengan berbagai alasan, di antaranya yang paling sering adalah sakit! Pertanyaan-pertanyaan kritis kemudian muncul, mengapa maling kelas teri dapat segera tertangkap sementara maling kelas kakap sulit ditangkap? Jawaban dari pertanyaan ini pastilah karena penjahat kelas kakap memiliki dana yang berlebihan untuk menyuap para penegak hukum. Dalam hal ini hukum telah menghamba pada materi!

Dalam kaitannnya dengan hukum kekuasaan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan perekonomian, sampai saat ini masih belum tegas

mana yang menjadi kewenangan pusat dan daerah. Keadaan ini tentunya dapat menimbulkan biaya tinggi (*high cost economy*) karena harus "berbaik-baik" dengan berbagai tingkat dan sektor kekuasaan di daerah maupun di pusat, yang pada akhirnya menghambat laju investasi. Dari berbagai media kita menyaksikan bahwa penurunan investasi baik itu berupa PMA maupun PMDN di antaranya adalah karena tidak adanya kepastian hukum.

Apabila para investor enggan berinvestasi karena tidak adanya kepastian hukum ini, maka hal yang lebih parah adalah ketika rakyat tidak mempercayai adanya penegakan hukum. Karena itu, kita juga seringkali menyaksikan sekelompok masyarakat yang main hakim sendiri bahkan hingga menimbulkan korban harta dan jiwa dalam jumlah yang besar. Sangat sulit bagi rakyat untuk bertindak sesuai aturan hukum, karena mereka melihat contoh nyata bahwa penegak hukum saja seringkali menodai aturan hukum. Karena itulah, masyarakat kita terkesan kurang beradab karena seringkali dengan sengaja melanggar kaidah-kaidah hukum bahkan yang paling dasar sekalipun!

Secara umum sistem hukum nasional masih belum sistematis sehingga tidak mampu menangkap apalagi memicu perkembangan masyarakat. Ketidaksistematisan ini terutama yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan bisnis yang bisa mengakibatkan tersendatnya pembangunan ekonomi, hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang bisa menimbulkan masalah-masalah sosial, serta hukum dalam bidang politik yang bisa mengganjal partisipasi politik. Untuk yang terakhir ini, kita sekarang sedang menghadapi RUU politik dan pemilu, di mana dalam naskah yang diajukan pemerintah jelas sekali mengisyaratkan pembatasan partisipasi politik rakyat dengan dipersulitnya persyaratan pendirian partai politik maupun persyaratan keikutsertaan dalam pemilu.

2.2.4. Hilangnya Identitas Sosial-Budaya

Kehilangan identitas diri adalah kata yang paling tepat untuk menilai masyarakat kita saat ini. Berkembangnya kebudayaan modern-rasional, sesungguhnya sudah mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat kita. Namun, proses bertransformasinya nilai-nilai sosial-budaya ini, ternyata

tidak berjalan secara alamiah akibat tidak sedikit para pemimpin kita yang justru dengan sengaja mempertahankan nilai-nilai lama yang feodalistis. Hal ini bisa dilihat misalnya dengan mempertahankan anggapan masyarakat kita bahwa garis keturunan merupakan hal yang mutlak, sehingga saat memilih pemimpin, mereka melihatnya atas dasar turunan siapa dan bukan karena program yang ditawarkan.

Di satu sisi rakyat telah meninggalkan nilai-nilai lama dan di sisi lainnya nilai-nilai baru tidak berhasil ditanamkan. Karena itulah kita tidak perlu heran jika melihat rakyat saat ini mengalami disorientasi nilai. Adanya disorientasi nilai-nilai sosial-budaya ini menyebabkan ketidakmampuan rakyat kita untuk dengan percaya diri menghadapi berbagai tantangan. Proses penyeleksian nilai-nilai budaya yang datang dari luar, tidak berkoherensi atau saling menguatkan dengan nilai-nilai luhur budaya lokal. Karenanya tidaklah heran, jika sebagian masyarakat kita telah sama sekali tercerabut dari akar budayanya, atau sebagian yang lain justru hidup dengan cara menghindari masuknya nilai-nilai kemodernan!

Dengan tidak adanya suatu perencanaan sosial-budaya yang mengarah pada pembentukan kembali identitas bangsa yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, maka saat ini rakyat tersekat-sekat dalam pencarian identitas baru budayanya. Sebagian kelompok mengindentifikasikan diri dengan budaya Barat, yang menyebabkan kelompok ini terkesan lebih Barat dari orang Barat sendiri. Ada lagi yang mengidentifikasikan diri dengan kebudayaan Timur Tengah. Ada pula yang beranggapan perlunya kembali pada identitas daerah sehingga terbangunlah rasa kedaerahan yang mengarah pada chauvinisme. Demikianlah, akhirnya masyarakat kita lupa bahwa yang perlu kita bangun adalah identitas ke-Indonesia-an.

Semakin memudarnya identitas sosial-budaya ini tentunya tidak terlepas dari keadaan krisis multidimensi bangsa Indonesia saat ini. Banyaknya pemimpin yang tampak semakin tidak bermartabat, krisis ekonomi yang berkepanjangan, perilaku KKN yang semakin meluas, perilaku mengemis-ngemis kepada negara-negara asing, berkembangnya pemakaian narkoba secara massal, serta tindakan-tindakan kekerasan yang ganas yang melanda berbagai daerah konflik dan sebagainya, telah menum-

buhkan rasa malu untuk mengaku sebagai orang Indonesia!

Pendidikan moral dan nilai-nilai ke-Indonesia-an walaupun telah diajarkan sejak kita masih anak-anak ternyata belum mampu membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, beretos kerja keras dan siap menghadapi berbagai tantangan. Ketidakberhasilan ini pastilah karena ada yang menjegalnya. Dengan sekejap kita bisa mengatakan bahwa yang menjegal itu di antaranya adalah gagalnya membangun ketauladanan dan pendidikan yang disuguhkan di luar sekolah. Bangsa ini telah kehilangan ketauladanan, dan karenanya sebaik apapun nilai-nilai yang diajarkan di bangku sekolah tidak pernah mencapai hasil yang diidamkan.

Kita diajarkan untuk tidak mengambil hak orang lain, tetapi dalam keseharian kita menyaksikan berbagai kasus manipulasi dan korupsi oleh orang yang kita anggap pemimpin. Demikian juga kita diajarkan untuk bekerja keras membangun negeri, berkarya dan berkompetisi, tetapi kita menyaksikan bagaimana para pemimpin kita lebih menikmati barang-barang impor daripada mengembangkan dengan tekun barang-barang dalam negeri. Kita diajarkan untuk berhemat tetapi kita menyaksikan para wakil rakyat di berbagai jenjang begitu menikmati gaya hidup foya-foya dan hedonistik. Kita diajarkan untuk berlaku saleh tetapi kita melihat langsung kemaksiatan dilakukan di mana-mana secara terbuka. Kita juga diajarkan untuk mencintai orang kecil, tetapi kita menyaksikan bahwa semakin banyak mereka yang mengaku pemimpin tidak peduli dengan nasib orang kecil!

Hal yang juga kita sesalkan adalah karena pendidikan yang diperoleh di luar sekolah seringkali berbeda dengan suguhan-suguhan yang diberikan di tengah masyarakat. Celakanya, masyarakat kita lebih mudah menyerap pendidikan dari luar sekolah, seperti yang disuguhkan oleh media televisi. Suguhan-suguhan yang ditampilkan dalam televisi, biasanya berkisar pada pengksploitasian instink primitif manusia atau instink yang juga dimiliki oleh binatang! Instink primitif itu adalah mencari makan yang dalam hal ini ditunjukan dengan pameran kekayaan, kebutuhan seks yang dalam hal ini ditunjukkan dengan pornografi dan mempertahankan diri dari serangan musuh yang dalam hal ini ditunjukkan dengan bentuk-bentuk kekerasan fisik.

2.2.5. Strategi Pendidikan, SDM dan Teknologi yang tak Terpadu

Penerapan pendidikan memang bukan semata untuk menambah kepandaian seseorang. Lebih dari itu, pendidikan juga dimaksudkan untuk membudayaan rakyat. Proses pembudayaan yang ideal adalah apabila apa yang diajarkan di ruang-ruang pendidikan berkesesuaian dengan apa yang dilihat dalam kehidupan keseharian. Mereka yang memiliki ilmu dan keterampilan tetapi tidak disertai dengan budi pekerti yang memadai akan menjadikan kepandaiannya semata untuk kepentingan diri sendiri yang sempit.

Proses pembudayaan juga berkaitan erat dengan apa yang akan dilakukan oleh para siswa lulusan sekolah maupun universitas. Apabila mereka yang telah lulus tetapi kemudian mereka tidak bisa mendapat pekerjaan yang layak atau mereka bisa bekerja tetapi tidak mendapatkan upah yang layak, maka proses pembudayaan yang telah dibangun sejak di bangku sekolah akan menemui hambatan besar. Bahkan tidak jarang, karena sulitnya untuk mendapat nafkah, mereka akhirnya mengorbankan akhlak mulia yang telah dibangun sejak di bangku sekolah. Dengan kata lain, kita telah bersusah payah menanam rasa kasih sayang, tetapi kemudian kemarahan yang kita tuai!

Sampai saat ini perencanaan pendidikan yang dikaitkan dengan kebutuhan pasar kerja tidaklah tertata dengan baik atau dengan kata lain, perencanaan SDM (sumberdaya manusia) dalam rangka membangun kemandirian bangsa tidak memiliki arah yang jelas. Di satu sisi kita memiliki tenaga kerja tidak trampil dengan jumlah begitu banyak, dan di sisi lainnya kita juga memiliki tenaga ahli yang bergelar S1 sampai S3 dengan jumlah yang cukup. Sementara itu, tenaga terampil pada tingkat menengah masih sangat langka, padahal pada tingkat ini, peluang kerja baik di dalam maupun luar negeri masih sangat terbuka luas.

Rendahnya kualitas SDM yang berjumlah banyak, hanya akan menjadikan pertumbuhan ekonomi secara dominan disumbang oleh faktor modal. Dengan cara demikian, maka pertumbuhan tentulah tidak akan diikuti dengan pemerataan. Bahkan, industri yang dikembangkan pun akan bercorak mudah pindah (*foot loose*), karena industri demikian akan

selalu mencari tempat yang upah buruhnya rendah. Ditambah lagi selama ini, keamanan berusaha yang rawan dan berbagai pungutan terselubung (*invisible cost*) begitu besar, maka semakin mudahlah industri-industri itu berpindah. Untuk Indonesia, adanya relokasi usaha ke negeri-negeri tetangga lebih merupakan karena ketidakpastian berusaha dan banyaknya pungutan tidak resmi ketimbang masalah perburuhan. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya upah buruh kita dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan, upah buruh kita masih lebih rendah dibanding Vietnam.

Bagi para tenaga ahli yang menguasai teknologi, bangsa kita belum bisa memanfaatkan keberadaan mereka secara optimal. Sehingga, banyak sekali tenaga-tenaga ahli kita yang justru berkembang ketika mereka berada di negeri orang, karena mereka mendapat penghargaan dan kerja yang layak. Karena itulah saat ini semakin banyak tenaga ahli kita yang lebih senang tinggal di luar negeri (*brain drain*). Sebaliknya, apabila mereka berada di sini, tenaga mereka tidak banyak dimanfaatkan. Karena itu akhirnya, kita sering mendengar bahwa bangsa Indonesia kekurangan SDM dan penguasaan teknologi. Untuk hal tertentu dan bersifat spesifik mungkin hal ini bisa dibenarkan. Namun yang terjadi sesungguhnya, bukanlah kekurangan SDM dan penguasaan teknologi, melainkan tidak adanya visi nasional atau tepatnya visi pemimpin yang dapat menciptakan keadaan di mana para pakar dan ahli dapat berkerja keras dalam kapasitasnya!

Ribuan sarjana dan doktor dalam bidang pertanian telah dicetak, ternyata tetap saja tidak dapat membangkitkan pertanian kita. Ribuan sarjana dan doktor dalam bidang keinsinyuran telah diciptakan, tetap saja tidak mampu membangkitkan industri manufaktur nasional. Demikian juga, ribuan sarjana dan doktor dalam bidang ekonomi telah dilahirkan bangsa ini, tetapi perekonomian kita tidak juga berkembang. Cukup banyak sutradara, penulis skenario dan bintang film yang jenius serta bekerja dengan tekun dan serius, tetapi industri perfilman nasional tetap saja terpuruk. Dalam keadaan ini, janganlah sekali-sekali kita menyalahkan para sarjana, doktor-doktor ahli dan para seniman tersebut, karena sesungguhnya, mereka merindukan pula untuk bisa berkarya

tetapi visi nasional atau visi para pemimpin kita tidak memberikan mereka tempat untuk berkarya. Sebaliknya, mereka lebih senang memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan barang-barang impor. Terlebih lagi barang-barang impor tersebut, banyak yang merupakan hasil selundupan yang nyata-nyata merugikan negara.

Selama ini, penggunaan teknologi sangat disesuaikan dengan permintaan pasar, sehingga kita tidak merasa penting untuk melakukan penemuan-penemuan baru. Namun sayangnya, bahwa dalam mekanisme pasar pada tinggkat dunia, kita mengenal apa yang disebut dengan pembagian kerja secara internasional (*international division of labor*), yang menempatkan negara-negara berkembang hanya sebagai penyedia bahan mentah atau paling tinggi bahan setengah jadi, sementara negara-negara maju sebagai negara pengolah. Kita tahu bahwa nilai tambah yang tertinggi diperoleh dari hasil teknologi olahan. Karena itulah dalam sistem ini, negara-negara berkembang tetap miskin sementara negara-negara maju terus bertambah kaya!

Teknologi yang seharusnya kita perankan sebagai faktor endogenus yaitu faktor yang turut mempengaruhi corak pembangunan ekonomi, ternyata yang dilakukan adalah sebaliknya, yaitu sebagai faktor eksogenus yang semata-mata mengikuti selera pasar. Padahal kita tahu bahwa seringkali pasar terbentuk setelah adanya penemuan-penemuan baru yang memanfaatkan teknologi sebagai ujung tombaknya. Karena itu, akhirnya bangsa kita hanyalah sebagai pasar bagi barang-barang hasil temuan baru yang memanfaatkan teknologi yang notabene adalah barang-barang impor.

Berbagai akibat buruk yang sekarang kita rasakan, khususnya pengangguran yang meluas, adalah karena tidak adanya perencanaan yang terpadu antara sektor pendidikan, pengembangan SDM dan teknologi serta kebutuhan pasar kerja. Tidak adanya perencanaan yang terpadu ini dapat pula dilihat dari kurangnya dana pendidikan. Apabila kita melihat APBN 2002, tampaklah bahwa anggaran untuk sektor pendidikan tidak lebih dari 3,5% saja. Angka ini jauh dibanding dengan negara-negara yang saat ini maju dengan pesat, seperti misalnya Malaysia yang menganggarkan sekitar 20% dalam APBN-nya.

Belum lagi anggaran yang disediakan untuk penelitian dan pengembangan yang relatif sangat kecil. Pada sektor industri swasta, hal sama juga terjadi, yaitu mereka pada umumnya tidak terlalu serius untuk mengalokasikan anggarannya bagi investasi dalam penelitian, pengembangan SDM dan teknologi. Karena itulah, sangat jarang sekali kita menyaksikan adanya penemuan-penemuan baru yang dilakukan oleh sektor swasta ini.

2.2.6. Hubungan Internasional yang Pasif

Dinamika hubungan internasional yang pernah dilakukan Indonesia memang cukup mengesankan. Beberapa tahun pasca kemerdekaan, tepatnya pada periode tahun 1951-1957, hubungan internasional lebih condong ke Blok Barat yang ditandai dengan diserapnya sistem demokrasi parlementer pada periode itu. Jatuh bangunnya pemerintahan pada periode tersebut mendesak Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin dan sekaligus mencela sistem politik liberal sebelumnya. Kemudian dibawalah Indonesia ke arah Blok Timur sehingga hubungan luar negeri dengan negara-negara Blok Timur ini semakin kokoh, yang secara tidak langsung akhirnya meninggalkan Blok Barat.

Politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan sendirinya ditinggalkan. Puncak dari politik yang condong ke Blok Timur ini berakhir saat Orde Baru berkuasa. Dengan anggapan bahwa kekuatan komunis adalah kekuatan Blok Timur, maka orientasi hubungan luar negeri pun diarahkan kembali ke Barat dan ini terjadi sampai sekarang. Dengan kata lain politik luar negeri yang bebas dan aktif sekali lagi ditinggalkan. Dengan runtuhnya negera-negara Blok Timur yang didahului oleh Uni Soviet, maka sistem Barat dianggap sebagai model yang paling berhasil.

Kalau pada era pemerintahan Soekarno, Indonesia berhasil sebagai pelopor Gerakan Non-Blok (GNB), maka pada era pemerintahan Soeharto, khususnya pada dua dekade pertamanya, menghindari politik luar negeri yang pro-aktif. Setelah merasa pembangunan dalam negeri mulai kokoh, barulah Indonesia tampil kembali dalam GNB yang ditandai sebagai ketuanya pada periode 1992-1995.

Namun demikian, GNB pada era Soeharto telah sama sekali berbeda dengan masa sebelumnya, mengingat pada era tersebut, GNB tidak lagi dalam kerangka pertentangan ideologi sosialis-komunis dengan kapitalis, melainkan antara negara terbelakang atau negara berkembang dengan negara maju, atau biasa disebut juga antara negara-negara Selatan dan Utara. Untuk yang terakhir ini, GNB lebih terkesan gerakan memohon belas kasihan terhadap negara-negara Barat yang sudah maju. Hal itu tercermin dari keadaan bangsa kita saat ini, yang selalu mengemis-ngemis kepada Barat!

Hubungan luar negeri merupakan cerminan dari kebijakan pembangunan yang dikembangkan di dalam negeri. Apabila di dalam negeri, politik-ideologi dijadikan panglima maka demikian pula dalam hubungan luar negerinya. Baik pada era pemerintahan Soekarno maupun Soeharto, sesungguhnya politik selalu dijadikan panglima. Karenanya orientasi hubungan luar negeri pun menjadikan politik sebagai panglima. Kalau pada era Soekarno politiknya mengarah pada kekuatan sosialis-komunis, pada era Soeharto adalah anti terhadap kekuatan sosialis-komunis. Berpuluh-puluh tahun diplomasi luar negeri Indonesia dijalankan dalam kerangka politik sehingga diplomasi ekonomi atau diplomasi dagang tidak terlalu dihiraukan. Karena itulah, Indonesia akhirnya tertinggal dari dinamika perekonomian atau perdagangan global, yang menyebabkan fondasi ekonomi bangsa kita tidak kunjung kokoh.

Dengan keadaan yang lemah secara ekonomi atau tepatnya bergantung pada kekuatan ekonomi global yang didominasi Barat, maka secara sosial-politik pun bangsa kita tidak lagi terdengar dalam kancah pergaulan politik internasional. Adanya berbagai penindasan hak asasi manusia baik yang terjadi di Bosnia-Herzegovina, Palestina, Chechnya, Irak, Afghanistan dan sebagainya, para pemimpin kita tidak mengambil sikap yang pro-aktif secara politik. Bangsa kita menjadi bangsa yang pasif di tengah-tengah terjadinya penindasan hak-hak asasi manusia yang dirasakan oleh banyak bangsa!

Potensi-potensi hubungan internasional yang bisa lebih memperkokoh fondasi ekonomi bangsa, sampai saat ini kurang tergarap dengan seksama, melainkan hanya mengandalkan kekuatan ekonomi Barat yang

sesungguhnya juga sudah jenuh. Abad Asia-Pasifik yang memunculkan kekuatan-kekuatan ekonomi baru di lautan Pasifik, tidak dianggap sebagai peluang yang sangat besar. Hal ini berbeda dengan negara-negara tetangga kita yang telah lebih dulu siap menangkap peluang besar di wilayah ini.

Dengan semakin terpuruknya keadaan perekonomian bangsa kita yang di antaranya disebabkan karena kurangnya diplomasi dagang, maka terasalah bahwa bangsa kita semakin kehilangan martabat di kancah pergaulan internasional. Kebesaran bangsa Indonesia yang pernah menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang begitu menggelora membangun kepercayaan diri bangsa-bangsa yang baru dan akan keluar dari kolonialisme Barat, seakan secara bertahap meredup ditelan zaman!

2.2.7. Otonomi Daerah yang Membingungkan

Dilaksanakannya otonomi daerah sebagai jalan untuk memberdayakan daerah dan masyarakatnya memang telah mendapat sambutan luas. Sambutan luas ini khususnya datang dari pimpinan pemda Kabupaten/Kota karena otonomi tersebut diletakkan pada tingkatan daerah tersebut.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah seperti ini, memang terkesan bahwa pemerintah pusat telah memenuhi tuntutan sebagian besar masyarakat daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, otonomi daerah ini seringkali menimbulkan kebingungan bukan saja bagi pelaksana pimpinan-pimpinan daerah tetapi juga membingungkan masyarakat dunia usaha, terutama yang berkaitan dengan kewenangan memutuskan suatu kegiatan usaha. Dengan berlakunya otonomi daerah seperti sekarang ini, tidak memicu perkembangan dunia usaha khususnya UKMK tetapi justru malah memperlambat. Sebelum otonomi daerah diberlakukan, untuk mendirikan suatu usaha diharuskan melewati 17 meja. Namun setelah berlakunya otonomi, di beberapa daerah bahkan diharuskan melewati hingga 43 meja birokrasi.

Kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan otonomi daerah seperti

sekarang ini, terutama karena ada keterputusan antara wawasan atau visi nasional dengan visi daerah, yang disebabkan karena tidak tertibnya tingkatan-tingkatan dalam otonomi daerah tersebut. Kita tahu bahwa dalam UU No. 22 tahun 1999 disebutkan bahwa tidak ada hirarki antara propinsi dengan kabupaten/kota. Hal ini berarti pemda kabupaten/kota tidak merasa perlu untuk berkoordinasi dengan pemda propinsi.

Para bupati/walikota saat ini lebih baik berhubungan langsung dengan pemerintah pusat khususnya Departemen Keuangan untuk bisa mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena itu tidak perlu heran kalau di kantor Departemen Keuangan berkeliaran para calo dari berbagai kabupaten/kota untuk bisa mendapatkan DAU dan DAK sesuai keinginan daerahnya, dan tidak memperdulikan lagi rencana pemerintah propinsi. Bahkan dengan menganggap bahwa kabupaten/kota adalah wilayah yang sangat otonom, seringkali perda-perda yang dihasilkan tidak saja bertentangan dengan wawasan propinsi tetapi juga bertentangan dengan wawasan nasional!

Karena itu, yang terjadi kemudian bukanlah sumbangan peradaban sosio-kultural suatu daerah kepada Indonesia Raya tetapi malah terbenamnya peradaban sosio-kultural daerah itu sendiri, dengan tidak adanya sinergi sosio-kultural antara kabupaten/kota dalam suatu wilayah propinsi. Wilayah kesatuan sosio-kultural sesungguhnya berada pada tingkat propinsi walaupun boleh jadi jumlah propinsi tersebut bisa diperbanyak hingga mencapai 40 buah atau bahkan lebih.

Secara umum, akibat dari pelaksanaan otonomi daerah seperti ini, disadari ataupun tidak, akan menjadikan politik pecah belah di antara berbagai tingkatan pemerintahan, yang pada akhirnya mereka menghamba kembali kepada pemerintah pusat. Seringkali kita mendengar kabar bahwa dalam rapat-rapat koordinasi yang diadakan gubernur, para bupati cukup mewakilkan kepada kepala dinasnya saja. Demikian juga telah terjadi kecemburuan suatu kabupaten kepada kabupaten yang lainnya dalam suatu propinsi, karena menganggap salah satu kabupaten tersebut terdapat sumber daya alam yang bernilai tinggi. Jelaslah bahwa sistem otonomi yang demikian, selain akan menimbulkan kekacauan wawasan nasional dalam pembangunan, juga akan membuat pelaksanaannya menjadi terhambat!■

BAB III

KEKUATAN KETIGA ADALAH KEKUATAN YANG AKAN MEMIMPIN

PASCA runtuhnya Orde Baru, secara sosio-politik dan historis, telah memunculkan kembali dua kekuatan besar yaitu kaum nasionalis sekuler yang kita sebut kekuatan kesatu dan kaum nasionalis religius yang kita sebut kekuatan kedua. Kekuatan kesatu yang dulu disebut kaum nasionalis sekuler, saat ini disebut kelompok nasionalis. Sedangkan kekuatan kedua yang dulu disebut kaum nasionalis religius itu, saat ini disebut kelompok Islam. Namun, kedua kekuatan yang lahir kembali ini telah bergeser dari gagasan awal lahirnya kekuatan sosial-politik tersebut. Pergeseran itu, adalah karena orientasi kerakyatan yang juga menjadi tema utama perjuangan pada awal-awal lahirnya gagasan kedua kekuatan tersebut, tidak muncul secara berarti pada saat ini. Dengan kata lain, mereka telah melupakan asas penting dalam perjuangannya yaitu asas kerakyatan!

Karena itulah, dengan gamblang saat ini kita bisa menyaksikan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat yang menginginkan asas kerakyatan ditumbuhkan kembali sesuai keinginan para pendiri bangsa, dengan tentunya mendapatkan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan zaman. Kegelisahan ini akhirnya bermuara pada kekecewaan rakyat terhadap kedua kekuatan utama tersebut, sehingga memunculkan gerakan-gerakan arus bawah sebagai cikal bakal dari lahirnya kekuatan baru, yaitu kekuatan ketiga, yang juga merupakan kekuatan yang kelak akan memimpin.

3.1. Lingkungan yang Berubah

Kita akan mengamati lingkungan yang sedang berubah (*the changing environtment*) baik dalam tataran internasional maupun nasional sebelum

mendalami lebih jauh apa dan bagaimana kekuatan ketiga ini. Hal ini penting, karena perubahan yang terjadi pada suatu negara-bangsa, dapat terdorong oleh perubahan pada tingkat internasionalnya. Demikian juga sebaliknya, perubahan pada tingkat negara-bangsa dapat pula mendorong perubahan pada tingkat internasional atau setidaknya tingkat regional. Terlebih lagi Indonesia, negara-bangsa ini merupakan negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia, berada di antara dua benua dan samudera yang sangat strategis dalam pergaulan internasional, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah.

3.1.1. Dorongan Perubahan pada Lingkungan Internasional

Dalam lingkungan internasional, saat ini kita sedang mengalami adanya pergeseran geografis kekuatan ekonomi. Apabila beberapa puluh tahun sebelumnya kegiatan ekonomi secara aktif masih terjadi antar negara-negara di lautan Atlantik yang terutama meliputi pantai timur Amerika Serikat, Kanada dan Eropa, maka sekarang terjadi pergeseran menuju negara-negara di lautan Pasifik. Negara-negara besar dan maju di Pasific seperti Amerika Serikat khususnya pantai baratnya, RRC, Jepang dan juga sekarang Korea Selatan, saling memperkuat pengaruhnya di kawasan ini. Demikian juga dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN termasuk Indonesia, mereka terus mengembangkan kegiatan ekonominya dalam rangka menyambut kesempatan besar di abad Pasifik ini.

Dengan semakin kompetitif atau sengitnya persaingan antara bangsa dalam perdagangan dunia, maka ketegangan dunia bukan lagi ditandai oleh ketegangan ideologis antara negara-negara komunis dan kapitalis, melainkan lebih ditandai oleh interaksi perdagangan dan investasi antar bangsa. Namun demikian, interaksi perdagangan itu tidaklah seimbang khususnya antar negara-negara maju dengan negara-negara berkembang atau miskin, mengingat negara-negara maju yang bekas penjajah ini jauh lebih siap baik dalam sistem manajemen, SDM maupun teknologi dibanding dengan negara-negara berkembang yang bekas dijajah ratusan tahun.

Kalau saat perang dingin, dunia terbelah menjadi Blok Timur dan Blok

Barat, maka saat ini dunia terbagi antara Blok Utara dan Blok Selatan. Negara-negara Utara adalah negara-negara kaya, sementara negera-negara Selatan adalah negara-negara berkembang atau miskin. Sebagian besar negara-negara Selatan adalah negara-negara bekas jajahan negara-negara Utara. Kalaupun di negara-negara Utara sistem perekonomian domestiknya tidak terlalu menerapkan eksploitasi atas kaum buruhnya, akan tetapi mereka tetap saja memperlakukan negara-negara Selatan sebagai objek untuk dieksploitasi, bukan saja kepada kaum buruhnya tetapi juga sumberdaya alam serta potensi pasarnya. Karenanya, situasi ini telah memicu ketidakpuasan negara-negara Selatan.

Di samping adanya pemisahan antara Utara dan Selatan, kecendrungan global saat ini juga adalah memperkuat posisi regionalnya. Blok-blok ekonomi telah dimotori oleh EU (European Union), kemudian diikuti dengan NAFTA (North American Free Trade Area), AFTA (Asean Free Trade Area) serta APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), MERCOSUR (Kerjasama Ekonomi Negara-Negara Amerika Selatan), dan sebagainya. Berkembangnya regionalisme atau blokisme ini telah pula memunculkan kembali chauvinisme regional sehingga menimbulkan berbagai proteksi baik berupa subsidi, hambatan tarif maupun non-tarif dan sebagainya. Terlebih lagi ketentuan-ketentuan WTO masih banyak yang belum diberlakukan untuk komoditi-komoditi tertentu khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, maka dunia seakan terasa bagaikan kampung kecil, di mana orang di dalamnya dapat dengan mudah berinteraksi satu sama lain. Proses globalisasi ini tidak saja terjadi pada bidang informasi, tetapi juga pada barang, modal uang (*financial capital*) dan bahkan pada manusianya. Oleh karena itulah dalam proses globalisasi ini, negera-negara maju akan dengan sendirinya menguasai negara-negara berkembang atau miskin, atau dengan kata lain negara-negara maju membangun hegemoninya terhadap negara-negara berkembang atau miskin, yaitu dengan berlindung di balik liberalisasi perdagangan dan investasi. Liberalisasi ini mengharuskan sistem ekonomi dunia mengarah kepada apa yang disebut neo-liberalisme yang tidak lain adalah anak kandung dari sistem kapitalisme yang telah memperbarui diri.

Memang kita ketahui bahwa kapitalisme telah mengalami berbagai masa krisis, namun karena kekuatan memperbarui dirinya begitu cepat, maka sistem ini telah mengalami perubahan-perubahan yang penting, yang jauh berbeda dibanding kurun waktu pada awal abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-20. Karena itulah seringkali kita mendengar istilah tambahan yang dikaitkan dengan kapitalisme seperti kapitalisme yang manusiawi (*human capitalism*), kapitalisme rakyat (*popular capitalism*), kapitalisme dengan kepedulian sosial (*commpassionate capitalism*) dan sebagainya. Walaupun telah berubah, sistem kapitalisme yang diterapkan dalam hubungan antar negara, tetap saja masih bercorak lama, yaitu sejauh mungkin mengeksploitasi negara yang lemah!

Munculnya gerakan buruh, telah memaksa kaum kapitalis untuk memperlakukan manusia secara lebih beradab. Bahkan di negara-negara Eropa dan Amerika, akibat adanya gerakan buruh di satu sisi dan kesadaran pemilik modal di sisi lainnya, telah menyebabkan banyak perusahaan yang memberikan saham kepada buruhnya dengan program pemilikan saham atau yang sering disebut dengan ESOP (*Employee Stock Ownership Program*). Dengan jalan ini maka antagonisme atau pertentangan antara kekuatan modal dan kerja atau antara buruh dan majikan telah berkurang secara drastis, karena buruh pun telah menjadi majikan dengan memiliki saham perusahaan.

Namun demikian, dalam sistem neo-liberal yang sekarang sedang menghinggapi sistem ekonomi dunia, aspek sosial dari kapitalisme bagai tenggelam kembali, dan dalam sistem ini, kekuatan suatu bangsa diukur dari seberapa jauh bangsa tersebut dapat menguasai pasar dan mengembangkan investasi, yang kesemuanya sangat ditunjang oleh kekuatan modal, teknologi dan SDM. Peran pemerintah yang sebelumnya cukup dominan, secara bertahap tergeser oleh kekuatan modal dan teknologi ini dan kemudian didesak sedemikian rupa untuk mengurangi intervensinya dalam perekonomian. Bahkan desakkan ini juga diarahkan pada pemerintahan negara-negara Dunia Ketiga. Karena itulah dalam sistem ini, semakin tertinggalnya masyarakat di negara-negara berkembang atau miskin sudah merupakan keniscayaan!

Melihat perkembangan dunia yang sedang menuju sistem neo-liberal

ini, maka gerakan yang bersifat menuntut kepada negara-negara maju oleh negara-negara berkembang seperti misalnya pemotongan hutang luar negeri (*hair cut*), kemudahan transfer teknologi dan sebagainya perlu dilakukan, di samping adanya suatu keharusan bagi negera-negara berkembang atau miskin untuk segera berbenah diri dan bekerja keras. Hal-hal yang bersifat kontra produktif terhadap kegiatan ekonomi, pengembangan SDM dan teknologi seperti misalnya ketidakstabilan politik dan rawannya keamanan, harus segera diakhiri!

3.1.2. Dorongan Perubahan pada Lingkungan Domestik

Dalam tataran domestik atau nasional, perubahan yang sedang berlangsung adalah transisi dari masyarakat tradisional agraris menuju masyarakat industri yang modern. Sudah menjadi hukum besi sejarah bahwa dalam setiap transisi selalu akan ditandai oleh berbagai krisis. Adapun rangkaian reformasi yang sesungguhnya telah didesakkan oleh masyarakat termasuk mahasiswa jauh hari sebelum jatuhnya presiden Soeharto hingga saat ini dapat kita lihat sebagai bagian dari masa pancaroba atau masa krisis ini.

Terjadinya proses perubahan dalam masyarakat ini tidak terjadi mendadak sontak melainkan suatu peristiwa yang menahun bahkan bergenerasi seiring dengan berkembangnya industrialisasi dan perkembangan pendidikan modern. Adapun apabila saat ini kita merasa seolah-olah perubahan begitu cepat terjadi, hal ini bukanlah pada tataran masyarakatnya melainkan pada tataran kelembagaan politik negaranya. Keterlambatan penguasa Orde Baru dalam memandang perubahan masyarakat inilah sesungguhnya yang menjadi pangkal runtuhnya kekuasaan Orde Baru, yaitu karena sistem kelembagaan politiknya tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi.

Salah satu hal penting dari perubahan ini adalah bahwa masyarakat secara rata-rata telah meningkat kesadaran dirinya termasuk kesadaran politik, ekonomi dan kulturalnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat telah jauh semakin cerdas. Karenanya dalam situasi ini, pemimpin tidak bisa lagi dengan gegabah menelurkan kebijakan karena

bisa langsung mendapat protes dari masyarakat. Adapun apabila kebijakannya sangat merugikan rakyat, maka tidak mustahil pemimpin itu akan dijatuhkan dengan cara yang kurang terhormat sekalipun masih dalam koridor konstitusional atau kalaupun tidak dijatuhkan, pemimpin tersebut akan kehilangan dukungan!

Dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa masyarakat kita juga sedang menuju masyarakat yang terbuka (*open society*). Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan teknologi angkutan telah merubah sebagian besar wajah masyarakat kita. Pertukaran informasi yang dapat dengan semakin mudah diperoleh akan menyebabkan kesadaran rakyat jauh meningkat. Apabila kesadaran yang meningkat ini dikaitkan dengan kesadaran kehidupan ekonominya yang masih terbelakang secara struktural, maka kesadaran ini akan mengubah orientasi politiknya juga.

Keterbukaan politik saat ini masih belum diikuti oleh pemberdayaan ekonomi rakyat secara memadai, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat yang akan terus berlangsung sampai tercapainya keseimbangan baru (*new equilibrium*), yaitu keseimbangan yang juga memberikan kesempatan ekonomi yang lebih merata kepada rakyat banyak. Perspektif ketidakseimbangan ini bila dikaitkan dengan geopolitik, maka dengan sangat mudah kita memahami mengapa saat ini timbul berbagai ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap terlalu dominan dalam penguasaan alokasi sumberdaya ekonomi.

Isu ketidakseimbangan ini juga sedang menerpa hubungan desa-kota. Di satu sisi seringkali masyarakat perkotaan yang bercorak industri mendapat kemudahan-kemudahan dalam alokasi sumberdaya ekonomi seperti permodalan, sarana dan prasarana serta informasi, sementara di sisi lainnya masyarakat pedesaan termasuk petani dan nelayan mengalami banyak kesulitan dalam mengakses pada sumberdaya ekonomi ini.

Dalam masyarakat perkotaan ini pun ketidakseseimbangan sedang dan akan terus menerpa hubungan buruh dan pengusaha. Dengan dibebaskannya buruh untuk mengorganisasikan diri, maka upaya penyadaran pada komunitas ini pun semakin dirasakan secara massal, yang pada akhirnya akan meningkatkan banyak tuntutan. Upaya penyadaran terhadap kaum buruh ini adalah upaya yang relatif mudah karena buruh

biasanya terkonsentrasi dalam lokasi tertentu yang mudah dicapai, di samping kaum buruh ini relatif berpendidikan lebih tinggi dibanding mereka yang bekerja di sektor pertanian dan nelayan.

Bahkan yang cukup berbahaya bila ketidakseimbangan ini menerpa hubungan etnis pri-nonpri. Ketegangan yang terjadi sebenarnya bukan karena perbedaan etnisnya, melainkan karena etnis nonpri tampak bisa lebih maju sementara pribumi kebanyakan tidak demikian. Terlebih lagi rakyat telah terbuka matanya, bahwa selama ini, khususnya pengusaha kakap dari kalangan nonpri telah kabur membawa modal meninggalkan tanah air dengan merugikan negara hingga ratusan trilyun rupiah terutama melalui kredit macet dan kasus BLBI-nya. Kita tentunya harus menghindari segala bentuk ketegangan antar etnis karena hal tersebut akan memukul wajah kita sebagai bangsa. Namun demikian, perlu disadari oleh kita semua termasuk para pemimpin dan pengambil kebijakan, agar tidak mengguyurkan bensin pada saat semua orang ingin memadamkan api ketegangan antar etnis ini!

3.2. Mengobarkan Asas Nasionalisme Kerakyatan

Jelaslah sekarang bahwa dorongan perubahan baik yang sedang terjadi pada lingkungan internasional maupun nasional, tiada lain akan mempercepat proses transformasi masyarakat kita. Apabila bangsa kita tidak segera berbenah menyiapkan diri, maka dorongan perubahan itu akan menjadi ancaman yang sangat serius. Sebaliknya jika kita cepat mengonsolidasi diri sebagai bangsa, maka dorongan perubahan itu bisa menjadi peluang untuk kemajuan, kemandirian dan kemartabatan rakyat dan bangsa.

Di antara yang terpenting untuk membangun kesiapan kita sebagai bangsa adalah dengan cara menumbuhkan kembali rasa nasionalisme di sanubari kita. Diperlukan usaha serius untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai nasionalisme kita yang baru, sehingga mampu membelokkan arah perjalanan bangsa yang pada akhirnya dapat menghindar dari malapetaka yang lebih besar pada masa depan. Lunturnya nilai-nilai nasionalisme saat ini mengharuskan kita untuk kembali pada gerak-

an *nation and character building*!

Ternyata, pembangunan karakter bangsa masih belum selesai akibat tidak diikuti oleh pembangunan kemandirian bangsa dalam berbagai bidang. Ketidakmandirian ini telah menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang selalu bergantung kepada bangsa-bangsa maju, terlebih lagi ketergantungan itu hanya untuk keperluan makan. Karena itu, wajarlah bila ketidakmandirian atau ketergantungan ini telah menjadikan bangsa kita semakin kehilangan martabat! Di samping untuk membangun kemandirian, gerakan *nation and character building* juga harus diarahkan untuk menghapus dekadensi moral bangsa yang semakin hancur seperti prilaku KKN, tipu daya dan gandrung kekerasan seperti yang saat ini sering kita saksikan.

Para pemimpin dan rakyat saat ini perlu diyakinkan kembali bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki berbagai budaya *adiluhung*, bangsa yang merdeka karena merebut dan bukan karena pemberian atau hadiah, serta bangsa yang pernah terkenal menjelajah belahan dunia. Kebesaran ini perlu terus dikobar-kobarkan kembali kepada rakyat khususnya generasi muda untuk membangun patriotisme, seiring dengan usaha serius dan tiada henti untuk memberdayakan rakyat.

Majunya suatu bangsa bukanlah ditandai oleh sekelompok masyarakat yang sudah bisa hidup serba kecukupan dan mampu membangun jaringan ekonomi pada tingkat global, sementara sebagian besar rakyatnya dibiarkan hidup dalam kemiskinan dan kebodohan. Pembangunan bangsa harus diartikan pembangunan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Untuk mengejar keterbelakangan rakyat, maka kita perlu menghidupkan kembali asas kerakyatan yang selama ini terlupakan!

Asas kerakyatan harus dikobar-kobarkan bukan saja dalam bidang politik tetapi juga dalam lapangan ekonomi. Apabila dalam lapangan politik rakyat bisa mendapatkan kesempatan untuk berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat, maka dalam lapangan ekonomi, rakyat pun harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya sehingga bisa hidup secara wajar dan bermartabat. Janganlah kita beranggapan bahwa dengan telah dibebaskannya kehidupan politik, maka urusan kesejahteraan rakyat pasti akan tercapai. Kita perlu menyadari, bahwa

kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat materialistik ini, memiliki karakternya sendiri yaitu karakter untuk melupakan orang lain demi keuntungan pribadi (*homo homini lupus*). Sehingga, jika kita tidak merancang dan mengendalikannya, maka kesengsaraan dan kenestapaan mayoritas rakyat seperti sekarang ini akan terus kita rasakan.

Asas nasionalisme yang terlupakan telah menempatkan bangsa kita menjadi bangsa pinggiran dan bahkan bangsa kuli di antara bangsa-bangsa. Asas kerakyatan yang terlupakan yang notabene merupakan warisan luhur pendiri bangsa, telah menempatkan sebagian besar rakyat kita hidup dalam kesulitan dan kenestapaan, sementara segelintir masyarakat lainnya hidup dalam kemewahan yang tiada tara.

Karena itulah, untuk menuju Indonesia Raya yang gilang gemilang, maka kita perlu mengobarkan kembali asas nasionalisme dan asas kerakyatan secara bersama-sama! Kedua asas ini apabila kita persatukan maka jadilah suatu asas Nasionalisme Kerakyatan, yang tiada lain adalah asas yang juga telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Seluruh kekuatan politik yang sekarang sedang ataupun yang belum berkuasa, baik dari kubu nasionalis sekuler maupun kubu nasionalis religius, juga harus menghidupkan kembali semangat Nasionalisme Kerakyatan ini!

3.2.1. Melaksanakan Demokrasi Sosial bukan Demokrasi Liberal

Sejak awal pembentukan Indonesia sebagai negara modern, tidaklah pernah ada keinginan menerapkan pemikiran demokrasi yang liberal. Terlebih lagi, rasa penderitaan yang dialami bangsa Indonesia selama ratusan tahun adalah akibat berkembangnya paham liberalisme di Eropa. Demokrasi liberal yang tidak lain adalah demokrasinya kaum borjuasi telah memisahkan secara nyata antara kehidupan politik, ekonomi dan aspek-aspek sosial lainnya, sehingga dengan menerapkan demokrasi liberal ini, telah terbukti membawa malapetaka pada sebagian besar masyarakatnya. Demikianlah keadaan yang terjadi di Eropa pada masa-masa awal pertumbuhan demokrasinya.

Demokrasi liberal ini adalah suatu demokrasi yang bersendikan pa-

ham individualisme, yaitu paham yang mengutamakan kepentingan pribadi dalam cara bermasyarakatnya. Karena itu, kaum nasionalis kerakyatan haruslah meninggalkan jauh-jauh sistem demokrasi liberal ini. Sebaliknya, yang harus kita bangun adalah suatu sistem demokrasi yang dengan seluas-luasnya memberikan dorongan penuh kepada rakyat untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonomi dan berbagai kegiatan sosial lainnya di samping kegiatan politik. Sistem demokrasi yang harus kita terapkan adalah demokrasi dalam bidang politik, demokrasi dalam bidang ekonomi serta demokrasi dalam bidang-bidang sosial lainnya secara sekaligus, tanpa dipisah-pisahkan! Sistem demokrasi inilah yang kita sebut dengan demokrasi sosial. Dengan penerapan sistem ini, maka kesejahteraan rakyat akan mengiringi kebebasan politik. Bukan sebaliknya, kebebasan politik meninggalkan kesejahteraan rakyat jauh di belakang seperti sekarang ini!

Penerapan demokrasi sosial dalam bidang ekonomi yaitu dengan cara meningkatkan peran pemerintah sehingga lebih efektif dalam mengatur alokasi sumberdaya ekonomi. Terlebih lagi, keadaan ekonomi bangsa kita saat ini sangat timpang, baik itu ketimpangan yang bersifat regional, sektoral, desa-kota dan kaya-miskin. Kaum nasionalis-kerakyatan harus berkeyakinan bahwa tidak pernah ada dalam sejarah eknomi bangsa-bangsa di dunia, pemberdayaan rakyat dapat terjadi hanya dengan menyandarkan pada mekanisme pasar bebas semata! Bahkan sebaliknya yang terjadi adalah berupa krisis yang bersifat periodik yang pada akhirnya juga mengundang intervensi pemerintah.

Apabila dalam demokrasi liberal kehidupannya bersendikan paham individualisme, maka dalam demokrasi sosial bersendikan paham kolektivisme atau kebersamaan. Paham kolektivisme yang pernah dikemukakan Bung Hatta ini, sesungghunnya merupakan paham dasar dari masyarakat Indonesia. Karena itulah, paham kolektivisme ini harus juga mewarnai semua bidang kehidupan dan haruslah menganggap bahwa seluruh masyarakat Indonesia bagaikan satu tubuh! Apabila ada bagian-bagian tubuh tertentu sakit, maka kita harus berlomba-lomba menyembuhkannya. Apabila ada bagian-bagian tubuh tertentu tertinggal jauh di belakang, maka kita harus mendorongnya maju. Setiap ketertinggal-

galan yang dirasakan masyarakat kita harus pula dirasakan sebagai ketertinggalan kita semua. Karena itu, kemajuan, kemandirian, dan kemartabatan harus dirasakan serentak oleh seluruh rakyat. Tidak dibenarkan dalam paham kolektivisme ini kemajuan hanya dirasakan oleh segelintir orang, sementara sebagian besar yang lainnya hidup dalam keterbelakangan!

Walaupun pengertian demokrasi sosial utamanya dimaksudkan untuk menyeimbangkan kehidupan politik dan kesejahteraan ekonomi, namun bukanlah berarti aspek-aspek kehidupan sosial lainnya diabaikan. Pengertian sosial yang melekat kepada kata demokrasi, berarti juga harus dapat mengembangkan aspek-aspek sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Peradaban-peradaban lokal yang ada apalagi pernah mengalami masa *adiluhung*, tidak boleh terbunuh dalam sistem demokrasi sosial ini, bahkan pertumbuhannya harus dapat didorong. Hal ini sangat berbeda dengan demokrasi liberal yang menjadikan segelintir elit menjadi agen peradaban. Terlebih lagi peradaban yang dilahirkannya semata-mata berasal dari paham yang materialistis!

Nilai-nilai keagamaan yang sejak dulu telah berkembang dalam masyarakat kita tidak boleh dikecilkan artinya kemudian diganti secara serta merta dengan kehidupan yang materialistis. Karena itu, nilai-nilai keagamaan harus terus didorong pertumbuhannya, terutama nilai-nilai moralnya harus dipaksakan bermukim di hati sanubari seluruh rakyat terutama para pemimpin yang memiliki amanah dan tanggungjawab utama untuk membangun bangsa! Kaum nasionalis-kerakyatan harus menyadari bahwa terjadinya krisis yang berkepanjangan ini adalah juga akibat langsung dari para pemimpin yang telah meninggalkan ajaran akhlak mulia dan nilai-nilai moral keagamaannya. Mereka telah dengan leluasa melakukan berbagai kecurangan seolah-olah Tuhan tidak menyaksikan dan bahkan menganggap-Nya tidak ada! Karena itu pula, dapatlah kita katakan bahwa asas nasionalisme kerakyatan adalah asas yang religius!

3.2.2. Melaksanakan Kebijakan Ekonomi Progresif (KEP)

Para birokrat, anggota DPR/DPRD, kaum profesional, pengusaha,

pejabat BUMN dan sebagainya mungkin masih dapat hidup secara wajar dalam beberapa tahun ke depan, walaupun krisis ekonomi nasional masih terus melanda. Namun tidaklah demikian dengan rakyat kebanyakan yang tidak memiliki tabungan cukup, sementara pendapatan riilnya terus menurun akibat harga-harga yang terus melambung maupun karena perputaran usahanya yang terus menerus memakan modalnya, atau bahkan sama sekali tidak berpendapatan karena terkena gelombang PHK yang terus berjalan.

Situasi ekonomi domestik saat ini menunjukkan keadaan yang stagnan atau tidak bergerak secara wajar. Padahal suatu ekonomi domestik dikatakan wajar apabila dapat menggerakkan semua sektor produksi yang seimbang dengan permintaan agregat khususnya untuk barang-barang keperluan umum (*wage goods*). Untuk menggerakkan perekonomian domestik ini maka diperlukan langkah-langkah progresif baik berupa kebijakan moneter maupun fiskal serta yang terpenting adalah upaya serius menggerakkan sektor riil yang berbasis pada dukungan sumberdaya alam (*resources base*), sehingga bisa mengurangi ketergantungan pada impor. Di samping itu, kebijakan ekonomi progresif ini, harus diarahkan pada upaya peningkatan daya beli, khususnya bagi kaum buruh, dengan tentunya terlebih dulu menciptakan efisiensi usaha berupa penghapusan berbagai bentuk pungutan yang tidak terkait dengan kegiatan produksi!

1. Menerapkan Kebijakan Moneter dan Fiskal untuk Ekonomi Domestik

Sistem perekonomian yang ideal bisa kita ibaratkan seperti tubuh manusia, yang terdiri dari peredaran darah, fungsi jantung dan sel-sel tubuh. Darah dengan bantuan jantung, haruslah mengalir ke seluruh tubuh dan memberikan makan berupa oksigen dan gizi kepada sel-sel yang membentuk seluruh jaringan tubuh. Apabila darah tidak mengalir pada bagian tubuh tertentu, maka sel-sel dalam tubuh tertentu itu pasti mengalami gangguan, yang akhirnya bisa mengganggu keseimbangan tubuh secara keseluruhan.

Dalam perekonomian, kebijakan moneter kita ibaratkan dengan

peredaran darah, sementara kebijakan fiskal kita ibaratkan dengan jantung. Adapun sektor riil atau sektor produktif kita ibaratkan dengan sel-sel tubuh. Seperti juga antara peredaran darah dan fungsi jantung yang harus terdapat keseimbangan, maka kebijakan moneter dan fiskal juga harus mencapai keseimbangan. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang berkait dengan peredaran uang serta di wilayah mana saja uang itu beredar. Sementara kebijakan fiskal, berkaitan dengan sejauh mana pemerintah perlu membelanjakan uangnya atau menarik uang dari masyarakat terutama melalui pajak. Apabila peredaran darah dapat berjalan ke seluruh tubuh yang dikombinasikan dengan fungsi jantung untuk dapat memompa dan meyerap darah, maka sel-sel tubuh pun akan mampu tumbuh dan berkembang secara wajar. Demikian juga yang terjadi dengan kebijakan moneter dan fiskal yang seimbang, maka niscaya akan mampu menumbuhkan dan mengembangkan sektor produktif masyarakat.

Selama ini, kebijakan peredaran uang jelas menunjukkan ketimpangan yang dahsyat. Kebijakan keuangan yang diterapkan telah menyebabkan uang hanya beredar pada segelintir kelompok masyarakat. Hal ini bisa dilihat misalnya dari kebijakan permodalan yang hanya menguntungkan segelintir pengusaha-pengusaha besar. Sementara itu pengusaha kecil yang jumlahnya sekitar 40 juta unit hanya mendapat sekitar 20% dari kredit yang dikucurkan secara nasional. Karena itulah, pengusaha kecil dan koperasi tidak pernah beranjak dari kekerdilan volume usahanya, sementara pengusaha besar melesat semakin besar ditambah lagi dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah!

Ketimpangan uang beredar tersebut secara nasional juga terjadi antar sektor, misalnya antara sektor kota dan desa di mana kota lebih dibanjiri uang ketimbang desa. Demikian juga antar wilayah di mana wilayah Indonesia Barat tepatnya Jawa lebih dibanjiri uang dibanding Indonesia Timur. Bahkan menurut perkiraan para ahli, uang yang beredar itu sebanyak 70% berada di Jakarta, sementara di Jakarta pun 70% uang yang beredar berada di daerah segitiga emas. Karena itulah jangan merasa heran jika tempat-tempat atau kelompok-kelompok yang dibanjiri uang, akan tampak hidup sangat berkecukupan bahkan berlebih-lebihan. Pada

saat krisis ini, keadaan timpang itu semakin nampak. Kita menyaksikan bahwa pada saat semakin banyak orang kesulitan mencari makan atau menyekolahkan anak, tetapi semakin banyak pula mobil-mobil mewah berkeliaran, pertokoan-pertokoan mewah dan berbagai barang komsumsi yang serba mewah!

Meperhatikan ketimpangan peredaran uang itulah maka kaum nasionalis kerakyatan harus mengarahkan kembali peredaran uang ke arah yang diperlukan seluruh rakyat, sehingga seluruh rakyat seperti juga sel-sel tubuh, bisa lebih produktif dan mendapat makan. Aliran modal yang selama ini hanya sekitar 20% untuk sekitar 40 juta unit usaha kecil yang tersebar di berbagai sektor harus dibesarkan secara berarti! Pengalokasian tersebut bisa dimulai dengan 25% kemudian 30% pada tahun berikutnya, kemudian 40% pada tahun berikutnya lagi dan seterusnya hingga mungkin mencapai angka 50% atau tepatnya mencapai keadaan yang optimal dan seimbang. Hal ini berarti, jika ada sekitar Rp. 600 trilyun kredit yang dikucurkan, maka sektor UKMK bisa mendapat kucuran hingga Rp. 300 trilyun.

Sektor pertanian dan kelautan yang selama ini terlupakan, harus dapat dilalui peredaran uang yang layak sehingga sektor-sektor ini bisa berkembang dan menjadi andalan dalam membangun kemandirian kita sebagai bangsa! Demikianlah seterusnya, kita perlu mengarahkan peredaran uang ke Indonesia Bagian Barat, ke pedesaan-pedesaan, ke sektor industri manufaktur, ke sektor perumahan rakyat, ke orang-orang kreatif dan produktif yang selama ini kurang dihiraukan, ke sektor pertambangan rakyat, ke sektor pariwisata yang terlebih saat ini relatif masih terpuruk, ke pedagang-pedagang kaki lima, ke pedagang-pedagang pasar, ke sektor industri berteknologi tinggi dan sebagainya. Tidak boleh ada satu sel tubuh pun yang tidak teraliri darah. Demikian juga tidak boleh satu pun sektor ekonomi produktif yang tidak teraliri uang!

Dalam keadaan resesi ekonomi yang ditandai dengan berkurangnya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif seperti sekarang ini, kebijakan uang ketat (*tight money policy*) adalah kebijakan yang sungguh keliru! Justru sebaliknya, yang perlu dilakukan adalah lebih melonggarkannya agar masyarakat produktif bisa bekerja menghasilkan produk yang berarti

juga bisa menyerap tenaga kerja. Tentunya, kebijakan uang longgar ini harus diarahkan pada sasaran yang tepat, sehingga mereka yang mendapat kemudahan mendapat permodalan ini tidak kemudian berspekulasi dengan menyimpan dalam bentuk valuta asing khususnya dalam bentuk US dollar. Ini artinya, sektor UKMK perlu mendapatkan prioritas pada masa krisis ini.

Kebijakan uang ketat yang dikontrol melalui instrumen SBI (serifikat bank Indonesia), dengan bunga yang tinggi harus terus diturunkan. SBI yang merupakan suku bunga yang dibayarkan BI kepada bank-bank yang menitipkan uangnya di BI ini, bila nilainya diturunkan, maka bunga pinjaman dari bank-bank umum juga akan turun, sehingga pada akhirnya dapat menggerakkan dunia usaha. Kalau sekarang suku bunga SBI sebesar 13% lebih, sehingga bunga pinjaman rata-rata bank sebesar 22%, maka jika suku bunga SBI dikecilkan menjadi 10%, bunga bank tentunya menjadi lebih kecil lagi. Perlu juga dilakukan kontrol terhadap bank-bank umum agar selisih antara bunga SBI dengan bunga pinjaman bank tidaklah sebesar sekarang hingga mencapai 9% bahkan 10%. Hal ini perlu diperkecil misalnya menjadi 6% saja, sehingga jika nilai SBI sebesar 10% maka bunga pinjaman bank menjadi sekitar 16% saja. Angka ini pun, jika dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju masih jauh lebih tinggi, karena suku bunga pinjaman bank di negara-negara tersebut biasanya berkisar 4% hingga 7% saja.

Lebih jauh dari itu, kaum nasionalis kerakyatan harus mendidik mereka yang mengaku dirinya sebagai pengelola bank (*bankers*), agar tidak sekedar menikmati selisih bunga dari uang simpanan masyarakat dengan bunga SBI dan surat berharga lainnya termasuk obligasi. Saat ini, LDR (*loan to deposit ratio*) hanya sekitar 40%. Ini berarti hanya sekitar 40% saja dari dana masyarakat yang dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kegiatan usaha. Janganlah sebagian besar dana masyarakat itu disimpan dalam bentuk SBI, surat berharga lainnya atau kegiatan yang tidak menimbulkan produktivitas di masyarakat seperti misalnya berspekulasi dengan valuta asing dalam hal ini US dollar. Keadaan inilah di antaranya penyebab utama dari tidak bergeraknya sektor riil atau sektor produktif masyarakat. Dengan kata lain, fungsi utama perbankan

sebagai intermediator antara masyarakat yang menabung dan masyarakat yang mau berproduksi dan berdagang tidak berjalan dengan wajar. Pada saat ini, harus diupayakan agar LDR bisa mencapai angka yang optimal yaitu sekitar 80%!

Katakanlah sekarang ini dana tabungan masyarakat yang dapat dihimpun sebesar Rp. 900 trilyun. Dengan bunga rata-rata yaitu termasuk tabungan dan deposito sebesar 11% sementara suku bunga SBI, surat berharga lainnya sebesar 13% maka terdapat selisih sebesar 2%. Jadi, apabila dana masyarakat disimpan dalam bentuk SBI, surat berharga dan kegiatan lainnya sebesar 40% dari dana yang terhimpun atau berjumlah Rp. 360 trilyun maka keuntungan tanpa kerja yang diperoleh perbankan adalah sebesar 2% dari Rp. 360 trilyun yaitu sebesar Rp. 7,2 trilyun. Dengan kata lain, para pengelola bank khususnya para direktur cukup dengan berdiam diri dan berpangku tangan saja sudah dapat menikmati keuntungan dan hidup dengan fasilitas yang serba mewah seperti main golf, menikmati mobil dinas yang mewah, berlibur ke manca negara, dan sebagainya.

Adapun mengenai kebijakan fiskal, sudah seharusnya tidak perlu dipertentangkan dengan kebijakan moneter, mengingat antara keduanya terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Kebijakan fiskal yang utamanya berkaitan dengan pajak dan pendapatan negara lainnya serta pengeluaran pemerintah, harus diarahkan agar bisa memicu produktivitas masyarakat. Terlebih lagi dengan tingkat pengangguran yang sekarang sekitar 40 juta orang, maka pengeluaran pemerintah untuk pembangunan harus mendapat porsi yang cukup besar, agar lebih mampu menyerap tenaga kerja produktif!

Penerapan pajak misalnya, harus dipilah-pilah secara lebih terencana sehingga kegiatan produksi yang bisa menyerap secara luas tenaga kerja tidak perlu terlalu berat dibebani oleh pajak. Demikian juga yang menyangkut pajak ekspor, apabila kegiatan produksinya menyerap lapangan kerja dalam jumlah besar harus pula dikurangi besaran pajaknya. Adapun yang harus dilakukan dengan segera adalah memangkas berbagai bentuk pungutan baik yang ada di daerah maupun pusat. Terlebih lagi pungutan-pungutan itu tidak langsung berkaitan dengan kegiatan produksi atau

tepatnya biaya siluman (*invisible cost*), yang jumlahnya dirasakan sangat besar oleh kalangan dunia usaha. Besarnya pengeluaran siluman yang bahkan bisa mencapai 30% dari biaya total produksi, bukan saja membuat perusahaan tidak efisien, tetapi juga telah menyebabkan rendahnya upah buruh, sehingga daya beli kaum buruh ini tetap rendah, yang pada akhirnya mengurangi permintaan agregat!

Pajak harus diterapkan secara progresif pada penghasilan individu dan hasil keuntungan yang besar dari perusahaan padat modal. Semakin besar seseorang menerima upah, harus semakin tinggi pula dikenakan pajaknya, tentunya apabila upahnya tersebut dirasakan telah jauh melewati kebutuhan wajar untuk memenuhi keperluan hidup diri dan keluarganya. Demikian juga, pajak yang berkaitan dengan barang-barang mewah seperti mobil-mobil impor yang super mewah serta rumah-rumah mewah, harus dikenakan pajak setinggi-tingginya. Sementara itu, untuk menggalakkan pemanfaatan lahan-lahan tidur yang telah dikuasai oleh pengembang (*developer*) tetapi belum mendapat sentuhan pengembangan dalam jangka waktu yang cukup lama, juga harus dibebankan pajak yang tinggi.

Selanjutnya, hal yang perlu diusahakan secara serius oleh pemerintah adalah pelaksanaan ekstensifikasi pajak. Kita tahu bahwa selama ini belum banyak wajib pajak yang terjaring oleh petugas pajak, sehingga pendapatan negara dari pajak masih belum mampu menutupi kebutuhan APBN. Padahal, jika saja pelaksanaan pajak ini diekstensifkan dan sekaligus diintensifkan, maka APBN tidak perlu lagi mengalami defisit hingga mencapai 2,5% dari PDB. Dengan kata lain, bisa mencapai rasio pajak (*tax ratio*) sebesar 20% atau lebih, tidak seperti sekarang ini yang hanya mencapai 12% saja dari PDB. Dengan demikian, bangsa kita tidak perlu lagi mengemis-ngemis untuk mendapat pinjaman luar negeri yang saat ini sudah di luar batas kemampuan membayar, serta mengobral dengan murah atau melakukan privatisasi BUMN!

Masalah privatisasi BUMN, sesungguhnya bukanlah hal yang haram, terlebih lagi sebagian besar BUMN kita sangat tidak efisien. Karena itu, privatisasi BUMN perlu dilakukan untuk mengefisienkannya, bukan untuk keperluan konsumsi dalam APBN, yang tidak lain adalah sama

seperti menjual barang untuk "makan". Di antara alasan privatisasi ini adalah untuk menghilangkan KKN karena dengan masuknya pihak swasta, maka BUMN tidak bisa lagi menjadi sapi perahan. Demikian juga privatisasi ini harus dimaksudkan untuk mengembangkan pasar seandainya BUMN tersebut dibeli oleh unsur asing. Dengan alasan-alasan tersebut, maka penjualan saham BUMN tersebut tidak boleh berjumlah besar tetapi cukup dibatasi hingga katakanlah 10% sampai 30% saja, agar pemilik utamanya tetaplah rakyat Indonesia.

Dengan adanya kebijakan moneter yang sinergis dengan kebijakan fiskal, diharapkan pergerakan ekonomi domestik dapat berjalan dengan baik. Adapun mengenai kegiatan ekspor terlebih lagi impor, seharusnya dilakukan sebagai komplemen dari kegiatan ekonomi dalam negeri yang telah mencapai keseimbangan. Janganlah keadaan itu dilakukan sebaliknya, yaitu berbagai alokasi sumberdaya ekonomi dikerahkan untuk menunjang kegiatan ekspor-impor, sehingga akhirnya pergerakan barang dan perputaran uang yang terjadi hanyalah antara sekelompok elit masyarakat dengan kaum pedagang yang berada di luar negeri seperti yang terjadi sekarang ini, sementara sebagian besar rakyat hanyalah menjadi penopang atau penonton saja! Fenomena pertumbuhan konsumsi barang-barang mewah impor (*non-wage goods*) oleh segelintir masyarakat adalah suatu bukti dari keadaan tidak berjalannya ekonomi domestik ini.

Keadaan ideal ekonomi domestik adalah apabila rakyat sebagai konsumen mampu membeli barang-barang yang diproduksi oleh rakyat sebagai produsen, dalam sebuah pola konsumsi yang sehat. Apabila kaum buruh bisa memperoleh upah yang layak dan UKMK dapat berkembang dengan baik, maka berarti akan meningkatkan daya beli masyarakat secara umum. Dengan daya beli yang meningkat ini tentunya akan memacu produksi dalam negeri karena mereka harus membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, pertumbuhan konsumsi untuk barang-barang keperluan umum yang tidak mewah (*wage goods*) akan terus meningkat. Hal ini berarti pula akan mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi pada sektor rill.

Berkaitan dengan hal ini maka proses industrialisasi secara bertahap pun akan berkembang dengan tentunya pertama-tama harus berbasis

pada sumberdaya lokal, sehingga bisa mengurangi kebutuhan akan impor. Industri substitusi impor harus dikembangkan bukan dengan sekedar menjadi "industri penjahit" di mana berbagai komponen utama produksinya berasal dari impor. Produk-produk industri dalam negeri haruslah diarahkan agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat dalam negeri secara luas. Adapun apabila segala kegiatan ekonomi dalam negeri relatif telah stabil di mana penawaran agregat dari sektor industri dalam negeri dan permintaan agregat telah mencapai batas keseimbangan yang dinamis, maka barulah pelaksanaan ekspor hasil industri perlu dikembangkan. Jadi, janganlah kita bekerja keras mati-matian untuk memacu ekspor industri sementara sebagian besar masyarakat kita justru kekurangan pasokan barang!

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pula untuk membangun industri yang dapat menghasilkan nilai tambah tinggi (*high value added*) sekiranya memang perkembangan teknologi dan SDM di tanah air telah begitu pesat. Berbagai industri yang berbasis teknologi tinggi seperti industri mobil dan motor, pesawat terbang, perkapalan, bioteknologi, semikonduktor dan *chips* untuk keperluan produk-produk elektronika seperti komputer dan sebagainya yang sesungguhnya sudah mampu dikerjakan sendiri, sebaiknya terus dikembangkan namun dengan skema yang sangat hati-hati dan efisien. Karena sesungguhnya, berbagai produk teknologi tinggi tersebut tidak saja dibutuhkan untuk diekspor, sehingga bisa meningkatkan nilai tambah yang tinggi di dalam negeri (*retained value added*) tetapi juga dapat diserap langsung oleh konsumen dalam negeri.

2. Melaksanakan *Land Reform* dan Membangun Pertanian

Setiap anak yang belajar sejarah di sekolahnya pasti mengetahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa agraris. Dikatakan sebagai bangsa agraris, karena tanah Indonesia adalah tanah yang subur, sehingga banyak sekali sumberdaya tanaman yang dapat hidup subur di tanah Indonesia ini. Namun sebaliknya, apabila saat ini kita ingin menyaksikan komunitas masyarakat yang hidupnya miskin dan tidak mampu menye-

kolahkan anak-anaknya, maka jawabnya adalah kaum tani! Demikianlah paradoks atau keanehan besar yang dialami bangsa kita. Padahal, saat ini terdapat lebih dari 21 juta rumah tangga petani, yang berarti apabila dalam rumah tangga tersebut terdapat 5 orang, maka tidak kurang dari 100 juta jiwa hidup dari sektor ini.

Kaum nasionalis kerakyatan, harus menyadari bahwa keadaan yang aneh tersebut adalah suatu kerugian besar bagi bangsa kita yang berarti penyia-nyiaan terhadap karunia Tuhan. Karena itu, tidak ada jalan lain, agar kita tidak menjadi bangsa yang terus menerus merugi, maka pembangunan harus diarahkan secara sungguh-sungguh pada sektor pertanian ini. Handalnya sektor pertanian ini, sesungguhnya juga bisa dilihat ketika bangsa kita mengalami krisis khususnya pada tahun 1998, di mana hampir semua sektor mengalami masa pertumbuhan negatif, sektor ini tetap menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 0,26%. Sementara itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan -12%, sektor perdagangan -21,4% dan sektor jasa -5,7%.

Menyadari potensi besar dalam sektor pertanian ini, maka reformasi dalam bidang pertanian yang harus kita tempuh bukanlah reformasi yang sifatnya hanya polesan. Tetapi, reformasi yang benar-benar menyentuh sampai ke akar-akarnya persoalan, sehingga hasil yang akan dicapai pun dapat dirasakan dengan nyata. Karena itu, reformasi dalam bidang pertanian haruslah juga meliputi masalah kepemilikan tanah (*land reform*), permodalan bagi petani, pengembangan SDM petani, penggunaan teknologi termasuk teknologi pembibitan dan pasca panen, pengaturan sistem distribusi yang berkeadilan serta penerapan asas-asas manajemen modern dan sebagainya.

Selama ini, pola penguasaan hak atas tanah yang selalu timpang adalah karena diperlakukannya tanah sebagai komoditi (*tradable goods*) dalam sistem pasar bebas. Perlakukan terhadap tanah disamakan seperti kita memperlakukan barang dagangan biasa. Padahal lebih jauh dari itu, sesungguhnya tanah memiliki fungsi sosial yang luas. Jika terjadi suatu proses pemindahan penguasaan barang dalam mekanisme pasar bebas adalah hal biasa dan dibenarkan, maka semestinya tidak secara serta merta dapat diterapkan dalam urusan tanah. Terlebih lagi bila

pencabutan hak atas tanah rakyat itu dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi yang pasti akan merusak sistem kehidupan sosio-kultural masyarakat setempat!

Berpuluh-puluh tahun hingga saat ini kita selalu menyaksikan terjadinya peminggiran rakyat dalam penguasaan tanah ini. Berkembangnya pertanian dan perkebunan berskala besar serta konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) telah menggusur kepemilikan rakyat setempat atau masyarakat adat atas hak ulayatnya dan hanya menjadikan mereka sebagai buruh upahan saja. Demikian juga penggusuran tanah rakyat akibat konversi tanah-tanah pertanian untuk industri, lapangan golf, real estat, bendungan, dan resor atau tempat peristirahatan, telah menjadikan semakin berkurangnya rakyat yang memiliki tanah!

Apalagi dalam proses konversi tersebut, rakyat seringkali dipaksa dan diintimidasi agar menjual tanahnya dengan harga yang sangat murah. Karena itu, tidak sedikit rakyat yang menjual tanahnya dengan harga Rp. 10.000,-/m2 kepada spekulan atau pengembang, kemudian hanya dalam sekejap, setelah diolah (*land clearing*) untuk keperluan industri atau perumahan, harga tanah tersebut bisa menjadi 30 kali lipatnya yaitu Rp. 300.000,-/m2 atau bahkan 50 kali lipatnya yaitu Rp. 500.000,-/m2.

Redistribusi tanah merupakan keharusan untuk pembangunan masyarakat pedesaan. Artinya, program tanah untuk petani harus menjadi dasar dari dilaksanakannya pembangunan pedesaan. Pemilikan tanah ini, tidak saja akan memberikan potensi bagi peningkatan pendapatan petani tetapi juga membuat petani mendapatkan kembali harga diri, martabat dan kedaulatannya. Dengan sendirinya, apabila telah timbul kembali harapan untuk berpenghidupan yang lebih layak, mereka akan bekerja lebih produktif.

Pelaksanaan *land reform* yang harus dilakukan bukanlah *land reform* model komunis yang mengambil alih seluruh tanah milik rakyat, baik itu milik tuan tanah sekala besar maupun petani pemilik tanah skala kecil. Tujuan *land reform* yang kita lakukan bukanlah menghapuskan kepemilikan pribadi rakyat atas tanah, sehingga seluruh tanah menjadi milik negara dan diorganisasikan secara kolektif atas perintah negara. Sebaliknya, *land reform* yang harus dilakukan adalah meredistribusikan penguasaan hak atas tanah

kepada para petani atau masyarakat adat yang selama ini telah bekerja dan hidup puluhan bahkan ratusan tahun di atas tanah tersebut. Karena itulah, kita menyebutnya sebagai *land reform* model populis atau model kerakyatan. Dengan kata lain, pelaksanaan *land reform* ini bukanlah serba negara, melainkan serba rakyat!

Apabila kaum tani dapat bekerja lebih produktif lagi, maka dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan serta daya belinya. Sebagian dari pendapatan tersebut, selain dibelanjakan untuk keperluan hidup, juga tentunya akan menciptakan tabungan yang diperlukan untuk investasi pembangunan, termasuk pembangunan di sektor pertanian itu sendiri. Karenanya, pelaksanaan *land reform* ini akan meningkatkan perputaran uang, menumbuhkan sektor industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa di pedesaan. Dengan demikian, maka ketimpangan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan akan semakin berkurang, yang pada akhirnya akan menghambat laju perpindahan penduduk desa ke kota atau urbanisasi. Dalam kaitan dengan pendapatan negara, maka berkembangnya sektor pertanian juga akan meningkatkan pajak dalam jumlah yang besar karena sektor ini merupakan sektor yang menghidupi sebagian besar penduduk. Untuk melaksanakan *land reform*, terlebih dahulu kita harus menetapkan objek-objek *land reform* ini yang di antaranya adalah:

a. Tanah publik atau tanah negara, seperti yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan negara yang ternyata menunjukan ketidakefisienan di satu sisi dan tidak mengangkat secara berarti masyarakat setempat di sisi lainnya. Tanah-tanah milik PTP, PT Perhutani, PT Inhutani serta tanah-tanah negara yang telah digarap oleh masyarakat atau bahkan tanah-tanah negara yang terbengkalai, harus segera dijadikan objek *land reform* ini;

b. Tanah-tanah tidur skala besar yang telah dikuasai oleh swasta tetapi diterlantarkan atau sangat tidak produktif. Dalam hubungan ini, banyak sekali tanah-tanah perkebunan sekala luas yang masih diterlantarkan, sementara masyarakat setempat telah terusir. Demi-

kian juga tanah-tanah untuk pembangunan real estate, atau pembangunan kota baru swasta yang masih belum dapat dibangun dalam waktu lama, harus menjadi objek *land reform*;

c. Tanah-tanah pemilikan pribadi yang jumlahnya sangat luas, dan tidak dikerjakan secara produktif apalagi tanah tersebut bersifat guntai, di mana pemiliknya jauh berada di lokasi tanah tersebut (*absentee landlords*). Redistribusi tanah dalam kaitan ini bisa dilakukan langsung dengan menghibahkan tanah tersebut sebagian kepada anak-anak, isteri atau famili, dan kepada para petani yang selama ini telah menggarap tanah tersebut bertahun-tahun.

Memang, melaksanakan *land reform* ini tidaklah mudah seperti kita membalik telapak tangan, terlebih lagi masalah tanah ini adalah masalah yang sangat peka atau sensitif. Karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan berbagai instrumen atau cara yang bijaksana dan hati-hati sehingga daripadanya akan dapat ditumbuhkan rasa keadilan yang setinggi-tingginya. Di antara instrumen tersebut misalnya, dengan menyediakan dana atau skema keuangan untuk membeli tanah-tanah milik pribadi yang menjadi objek *land reform* kemudian menjualnya kembali kepada para penggarap.

Instrumen lain dapat pula dengan cara pembangunan distrik agribisnis dan agroindustri yang melibatkan baik pemilik tanah maupun petani penggarapnya, sehingga tanah-tanah tersebut menjadi produktif dan hasilnya dirasakan oleh seluruh pihak yang terkait (*stake holders*). Dalam hubungan ini, ketika rencana pengembangan lahan tersebut dilakukan, maka para petani penggarap langsung diberikan kesempatan untuk turut memiliki saham dalam perusahaan agribisnis tersebut di mana tanah yang ditempatinya adalah salah satu asetnya. Dengan demikian, para petani penggarap bukan saja turut memiliki perusahaan tetapi juga turut memiliki tanah tersebut.

Sehubungan dengan pelaksanaan *land reform* ini, maka kaum nasionalis kerakyatan, harus sudah mempersiapkan diri untuk membentuk wadah-wadah di berbagai wilayah dan pelosok tanah air guna mendaftar tanah-tanah yang kelak bisa menjadi objek dari *land reform*, serta

mendaftar calon-calon penerima tanah. Dengan demikian, ketika kebijakan *land reform* diputuskan pada tingkat nasional dan berkekuatan hukum tetap, kita tidak terjebak lagi oleh pendataan-pendataan yang biasanya memakan waktu lama.

Pelaksanaan *land reform* tentunya tidak akan mencapai hasil yang memuaskan apabila tidak diikuti oleh usaha-usaha nyata dalam pengembangan pertanian. Sebagai misal, setelah petani memiliki tanah, tetapi tidak didukung dengan cara-cara pemanfaatan tanahnya, maka tanah tersebut kelak tidak akan produktif dan bahkan bisa kembali dijual atau disewakan kepada pihak-pihak lain dengan harga yang sangat murah, sehingga petani tetap saja miskin. Karena itulah, diperlukan beberapa tindakan kongkrit sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan *land reform* ini.

Permodalan untuk pertanian harus menjadi kebijakan utama setelah *land reform*. Dengan mengalirnya permodalan untuk sektor ini, maka dengan sendirinya faktor-faktor pendukung seperti teknologi dan SDM yang unggul akan pula mendatangi sektor ini. Permodalan bagi sektor pertanian yang selama ini hanya sekitar 10% saja dari total kredit yang dikucurkan, harus secara bertahap ditingkatkan misalnya hingga menjadi 40% dalam lima tahun mendatang. Karena itu, pendirian bank dan lembaga keuangan lainnya seperti modal ventura dan asuransi pertanian baik model konvensional maupun model syari'ah yang khusus diperuntukan bagi usaha tani adalah suatu keharusan!

Pendapat yang menyatakan bahwa adalah sulit membantu petani karena mereka berjumlah banyak dan meminjam sedikit serta kurang berpendidikan, haruslah ditinggalkan jauh-jauh oleh kaum nasionalis kerakyatan. Karena justru keadaan seperti itulah yang menjadi tantangan bagi kita untuk mengatasinya! Kita harus kembali mengingat bahwa tujuan kemerdekaan bangsa ini, yang tentunya menjadi tanggung jawab para pemimpinnya, adalah untuk meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan dan kemartabatan rakyat tanpa kecuali. Kemerdekaan republik ini bukanlah hanya untuk segelintir orang yang cerdas, terampil dan memiliki uang!

Penerapan teknologi dan kemampuan SDM untuk sektor pertanian

sesungguhnya sudah cukup berkembang. Hanya saja karena sektor pertanian tidak mendapat perhatian yang serius selama ini, maka para ahli pertanian atau sarjana-sarjana pertanian kurang bisa mengabdikan dirinya pada sektor ini sesuai kapasitasnya. Karena itu, gagalnya pembangunan sektor pertanian bukanlah karena kegagalan para sarjana pertanian, melainkan karena dangkalnya wawasan para pemimpin dalam sektor ini.

Dengan penerapan tekonologi dan pengembangan SDM yang unggul, maka nilai tambah yang akan dihasilkan oleh sektor pertanian akan jauh meningkat. Teknologi budidaya yang mencakup pembenihan, penanaman dan pemeliharaan misalnya bisa meningkatkan produktivitas lahan hingga dua bahkan tiga kali lipat dari yang sekarang biasa diperoleh petani. Kalau sekarang misalnya setiap hektar panen padi bisa menghasilkan 4 ton gabah maka dengan teknologi budidaya yang unggul, tiap hektar bisa mencapai 8 bahkan hingga 12 ton. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk komoditi lainnya seperti kedelai, jagung, tebu, dan sebagainya.

Pendekatan produksi tentunya harus diseimbangkan dengan perbaikan distribusi dan pemasaran. Jangan sampai terjadi lagi, ketika hasil produksi melimpah ternyata pasar tidak mampu menyerapnya, sehingga harga produk pertanian anjlok yang pada akhirnya merugikan kaum tani itu sendiri. Karena itu, sistem informasi pertanian yang juga meliputi informasi pemasaran harus dikembangkan, sehingga jangan sampai di suatu propinsi terjadi kelebihan produksi pertanian dan tidak mampu menjualnya kemudian merugikan petani, sementara di propinsi yang bertetangga kekurangan pasokan barang tersebut kemudian harganya menjulang tinggi. Dalam kaitan ini, maka sistem informasi pemasaran harus pula dikaitkan dengan sistem distribusi yang handal, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sesungguhnya sudah kita kuasai.

Mengenai peranan tengkulak atau pengijon, kita tahu bahwa mereka selama ini telah mengambil keuntungan yang tinggi dengan cara menekan petani. Namun, kaum nasionalis kerakyatan tidak boleh begitu saja menyalahkan keberadaan mereka tanpa mencari alternatif yang lebih manusiawi. Para tengkulak dan pengijon itu, walaupun mereka

mendapat keuntungan tinggi, telah berjasa kepada petani dengan menyediakan kebutuhan uang para petani dalam waktu yang singkat tanpa berbelat-belit. Pada masa panen misalnya, para tengkulak sudah berada dipinggir sawah sambil membawa uang dan siap membeli hasil panen petani. Demikian juga para pengijon, mereka selalu siap mengucurkan uang kepada petani yang tidak memiliki tabungan tetapi sangat memerlukan uang untuk keperluan hidupnya.

Karena itulah, lembaga-lembaga keuangan baik dalam bentuk koperasi maupun bentuk lainnya yang dapat masuk hingga ke pelosok-pelosok desa sangat dibutuhkan untuk menggantikan para tengkulak dan pengijon ini. Dengan hadirnya lembaga-lembaga keuangan secara profesional di pedesaan ini, maka secara umum akan dapat meningkatkan keuntungan petani. Di samping itu, harus pula diciptakan sistem distribusi dan tata niaga yang lebih berkeadilan, sehingga jangan sampai nilai tambah atau keuntungan yang sangat besar jatuh di tangan pedagang, sementara kaum tani tetap saja hidup dalam kemiskinan!

Harus diatur, perbedaan harga antara harga di petani, pedagang pengumpul, pasar induk hingga konsumen. Jangan sampai kita melihat harga produk pertanian yang harganya di tingkat petani Rp. 1000,- tetapi bisa mencapai harga Rp. 5000,- di tingkat konsumen. Padahal, harga dasar produksinya saja sudah mencapai Rp. 800,-. Hal ini berarti petani hanya mendapat margin Rp. 200,- sementara pedagang bisa mencapai Rp. 3000,- setelah dikurangi biaya transportasi Rp. 1000,-. Jelaslah sekarang bahwa keuntungan terbesar bukan pada petani tetapi pada pedagang. Karena itu, adalah suatu keharusan untuk menciptakan sistem yang dapat memperkuat posisi kaum tani di hadapan para pedagang!

Pengembangan sektor pertanian ini, tentunya bukan saja bersifat *on farm* tetapi juga *off farm* atau lebih tepatnya teknologi pasca panen. Teknologi pemrosesan hasil pertanian akan memberikan nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibanding hasil pertanian berupa bahan mentah saja atau apa yang disebut pertanian primer. Sesungguhnya, teknologi ini pun sudah berkembang dengan baik, hanya saja penerapan teknologi ini tidak dilakukan secara intensif dan terencana. Akibatnya secara nasional, nilai tambah sektor agribisnis pedesaan jauh tertinggal diban-

ding produk-produk yang dihasilkan industri manufaktur perkotaan. Dengan kata lain kegiatan perekonomian desa menjadi jauh tertinggal dari perekonomian perkotaan.

3. Menghidupkan Kembali Kejayaan Kelautan

Bukan saja manusia Indonesia tetapi bahkan manusia-manusia di berbagai penjuru dunia mengetahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim atau bangsa pelaut. Namun begitu, juga hampir seluruh masyarakat Indonesia maupun masyarakat pelaut dari berbagai penjuru dunia mengetahui bahwa untuk mencari orang miskin dengan perkampungan kumuh serta hidup terbelakang di Indonesia, tidak lain dan tidak bukan adalah masyarakat nelayan. Padahal, jumlah nelayan kita tidak kurang dari 4 juta jiwa, yang berarti apabila mereka menghidupi tiga anak dan seorang istri, maka sekitar 20 juta jiwa hidup dalam kemiskinan.

Indonesia adalah negara kepulauan yang dipersatukan oleh laut. Panjang garis pantai negeri katulistiwa ini adalah terpanjang kedua di dunia yaitu 81000 km. Namun demikian, keadaan masyarakat yang hidup dari laut maupun sumber devisa laut kita jauh sekali dari cerminan sebagai bangsa maritim. Tentunya, ada yang salah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di negeri ini. Padahal, potensi perikanan tangkap Indonesia lebih dari USD 15 miliar, perikanan air tawar lebih dari USD 6 miliar dan perikanan budidaya payau (tambak) untuk udang windu bisa mencapai USD 10 miliar.

Secara total, potensi perikanan laut maupun darat bisa mencapai lebih dari USD 31 miliar. Belum lagi ditambah dengan potensi bioteknologi kelautan yang memiliki nilai ekonomi sebesar USD 40 miliar. Sehingga secara total, devisa dari kelautan dan perikanan bisa mencapai lebih dari USD 71 miliar setiap tahunnya. Sungguh suatu jumlah yang menakjubkan, karena ini berarti sekitar dua kali dari APBN saat ini!

Dibandingkan dengan potensi yang ada, hasil yang bisa diperoleh saat ini sangat jauh di bawahnya, yaitu dari produk perikanan kita baru mampu mencapai USD 1,76 miliar. Padahal, Thailand yang memiliki

garis pantai sepertigapuluh dari garis pantai Indonesia, pada tahun 2000 lalu telah mampu memompa devisa dari perikanannya sebesar USD 4,2 miliar. Filipina telah mampu menghasilkan devisa dari industri rumput laut sebesar USD 700 juta, sementara kita baru mampu mencapai USD 15 juta. Padahal, 65% bahan baku dari industri rumput laut di Filipina tersebut berasal dari Sulawesi.

Ketimpangan antara potensi kelautan yang ada dengan perolehan yang bisa diraih ini tentunya harus menggerakkan kaum nasionalis kerakyatan. Berbagai pemborosan energi bangsa yang selama ini terlalu tersedot di daratan dan industri yang ternyata tidak berarah ini, harus diatur kembali dan sebagian di arahkan pada pemberdayaan laut. Sama halnya dengan pengembangan sektor pertanian, kita harus memadukan antara dukungan permodalan, teknologi dan SDM, penerapan manajemen modern dan pemasaran. Di samping itu, dalam pemberdayaan laut ini, kita juga harus senantiasa memperhatikan keberlangsungan ekosistemnya. Karena itu, menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi sangat penting dalam proses eksplorasi sumberdaya kelautan.

Sebagian besar nelayan kita yaitu sekitar 83% masih hidup dan berusaha dengan cara yang tradisional yang tidak mengenal teknologi penangkapan modern. Hal ini bisa dilihat dari armada-armada penangkapan yang sangat sederhana, sehingga hasil tangkapannya hanya sanggup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Karena itulah sebagian besar nelayan kita tetap hidup miskin. Keadaan tradisional ini sudah seharusnya secara bertahap ditingkatan menjadi lebih modern dengan mengalirkan sumberdaya khususnya permodalan dan teknologi kepada nelayan. Alokasi kredit perikanan selama Orde Baru yang hanya mencapai 0,02% harus secara bertahap dan cepat dibesarkan hingga 20% katakanlah dalam 10 tahun ke depan, sehingga bisa meningkatkan investasi domestik pada sektor ini secara besar-besaran, yang sebelumnya hanya mencapai 1,37% dalam kurun waktu 1967-1999. Padahal, dalam kurun waktu yang sama persentase investasi domestik sebesar 68,66% telah dilaksanakan pada sektor industri.

Dengan adanya investasi yang diarahkan pada sektor kelautan ini, maka dengan sendirinya pengadaan armada-armada penangkapan ikan,

pelabuhan-pelabuhan ikan serta pengembangan industri perikanan di wilayah pesisir akan tumbuh berkembang. Dengan demikian, wilayah pesisir kelak akan menjadi wilayah pertumbuhan baru, yang berbasis pada keungggulan sumberdaya kelautan (*resources base*).

Karena tidak didukung oleh permodalan, teknologi dan manajemen modern, posisi nelayan menjadi sangat lemah di hadapan para pedagang. Nilai ikan hasil tangkapan nelayan sangat dihargai rendah oleh pedagang, sementara pedagang mampu menjualnya dengan harga tinggi kepada konsumen akhir. Misalkan saja nelayan bisa menjual hasil tangkapannya seharga Rp. 10.000,-/kg dan hanya beberapa puluh meter dari dermaga terdapat restoran yang menjual ikan yang sama seharga Rp. 30.000,-. Dapat dibayangkan apabila ikan tersebut dijual di pusat-pusat kota, yang tentunya harganya akan terus meningkat. Demikian juga misalnya dengan produsen ikan hias, harga ikan mereka hanya dihargai Rp. 500,-/ekor oleh pedagang dan beberapa hari kemudian katakanlah dengan pemeliharaan Rp. 2000,-/ekor, pedagang tersebut sudah bisa menjualnya dengan harga Rp. 15.000,-/ekor. Belum lagi bila ikan hias itu jatuh ke tangan eksportir, di mana di negara tujuan ekspor, ikan hias tersebut bisa bernilai ratusan ribu rupiah!

Contoh di atas, adalah yang berkaitan dengan harga hasil jual, di mana tampak nalayan hanya memiliki keuntungan yang sangat kecil. Sementara itu, dalam memperoleh input seperti jaring, pakan, pancing, pupuk, benih dan sebagainya, mereka memperolehnya dengan harga tinggi karena harus melewati beberapa pedagang perantara dari produsen input tersebut. Dengan demikian, nyatalah bahwa dari sisi input mereka harus membayar dengan harga tinggi, sementara dari sisi output mereka harus menjual dengan harga rendah, sehingga nilai tukar nelayan menjadi sangat rendah sekali yang tiada lain hanya sekedar untuk dapat bertahan hidup. Hal yang sama juga terjadi pada kaum tani, di mana nilai tukar petani tidak pernah menghasilkan surplus yang wajar untuk bisa meningkatkan harkat dan martabatnya secara ekonomi!

Penerapan teknologi yang tentunya berkaitan dengan pengembangan SDM di sektor kelautan dan perikanan ini, harus dikembangkan secara luas. Pengadaan kapal-kapal penangkap ikan yang modern harus segera

diwujudkan terlebih lagi bangsa kita telah memiliki kemampuan pembuatan atau perbaikan kapal yang dilakukan oleh PT PAL. Demikian juga dengan teknologi pengawetan sementara (*cold storage*), baik yang ada di kapal-kapal berbobot ringan, menengah dan berat maupun yang ada di pelabuhan-pelabuhan ikan harus segera diwujudkan sehingga ikan-ikan hasil tangkapan tidak berkurang kualitasnya hanya dalam hitungan jam hingga bisa menjatuhkan harga. Kalau saat ini baru sekitar 17% armada penangkapan yang modern, maka secara bertahap harus bisa ditingkatkan, katakanlah menjadi 50% dalam 10 tahun ke depan.

Kejayaan sektor kelautan janganlah hanya diartikan kemampuan mengeksploatasi hasil laut dengan optimal tetapi lebih dari itu adalah juga kemampuan mengibarkan armada angkutan laut baik untuk penumpang maupun barang (*cargo*). Seperti kita ketahui saat ini, perusahaan-perusahaan pelayaran yang memasuki wilayah perairan Indonesia lebih dari 95% adalah kapal berbendera asing. Hal ini berarti surplus atau keuntungan dari jasa angkutan yang melewati perairan kita, bukan menjadi milik kita tetapi milik asing. Padahal, barang-barang yang diangkut baik untuk impor maupun untuk ekspor berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat Indonesia. Apabila armada-armada nasional secara besar-besaran dapat diwujudkan, maka di tengah-tengah samudera yang bergelombang, bendera merah putih baik yang ditancapkan pada kapal-kapal nelayan modern maupun kapal-kapal angkutan akan terus berkibar menunjukkan kejayaan kita sebagai bangsa maritim.

4. Memberdayakan UKMK dan Membentuk PNB

Pemberdayaan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK), jangan diartikan sebagai usaha kedermawanan atau belas kasih kepada sektor tersebut. Sebaliknya, kita harus melihatnya sebagai tindakan yang strategis mengingat sektor ini telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar, serta penyedia berbagai kebutuhan langsung masyarakat. Karena itu, upaya pemberdayaan sektor ini tidak bisa dilakukan secara sambil lalu seperti yang selama ini dilakukan.

Pengembangan sektor ini harus masuk dalam perencanaan yang

terintegrasi atau terpadu dengan pengembangan sektor modern, sehingga pada saat yang sama, kegiatan di sektor modern ini bisa saling berkait dan membangun kemitraan dengan sektor UKMK. Jangan sampai seperti selama ini terjadi yaitu berkembangnya dualisme kegiatan ekonomi nasional. Di satu sisi terdapat sektor modern dan di sisi lain terdapat sektor UKMK yang bercorak informal dan tradisional.

Menurut data BPS Desember 1998, saat ini terdapat 39,8 juta unit usaha dengan komposisi sektoralnya adalah: pertanian 62,7%, perdagangan perhotelan dan restauran 22,67%, industri 5,7% dan jasa sebesar 3,9%. Dari komposisi volume usahanya, sebanyak 99,85% volume usahanya di bawah 1 miliar dan bahkan 96% dari kelompok ini omsetnya berada di bawah Rp. 50 juta setahun, sebanyak 0,14% berada di antara Rp. 1 miliar-Rp. 50 miliar setahun, dan hanya sebanyak 0,01% yang di atas Rp. 50 miliar setahun. Dari komposisi penyerapan tenaga kerja, kelompok pertama tersebut menyerap 88,66% dari seluruh tenaga kerja, kelompok kedua menyerap 10,78% dan yang ketiga menyerap 0,56% dari seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dengan strategisnya sektor ini terutama dari segi banyaknya tenaga kerja yang diserap, maka upaya pemberdayaan sektor ini akan langsung memberikan hasil nyata pada peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Di antara yang menjadi keluhan sektor UKMK selama ini adalah kelangkaan faktor modal, sehingga dalam perjalanannya sektor ini sulit untuk berkembang mengingat setiap keuntungan yang diperoleh langsung habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Padahal modal ini sangat diperlukan untuk mengembangkan volume usahanya. Karena itu, apabila sekarang portofolio kredit untuk sektor ini hanya sebesar 20% saja dari portofoilio kredit secara nasional, maka hal tersebut perlu ditingkatkan secara bertahap menjadi 50% dalam sepuluh tahun mendatang. Kekhawatiran akan adanya kemacetan, sesungguhnya merupakan hal yang terlalu dibuat-buat, karena dari data yang ada, sektor ini bahkan hanya mengalami kemacetan sekitar 3% saja. Sebaliknya para konglomerat dan usaha besar lainnya telah mengalami kemacetan hingga 70%, yang menyebabkan perekonomian nasional saat ini tertatih-tatih untuk dapat bangkit kembali.

Tersebarnya UKMK di daerah-daerah, sesungguhnya bisa didukung oleh permodalan dari dana masyarakat yang disimpan di bank-bank setempat, bila saja bank-bank yang sudah menerima dana masyarakat tersebut tidak melarikannya ke kantor pusat seperti selama ini terjadi. Dana masyarakat yang disimpan di bank-bank daerah harus diputarkan kembali di daerah tersebut secara maksimal, jangan hanya sebesar 30% saja seperti diperkirakan terjadi sekarang ini. Sehingga, bukannya dana tersebar ke daerah, tetapi justru sebaliknya, daerah meminjami pusat atau desa memodali kota!

Memang suatu hal yang lazim, apabila dalam proses penyaluran kredit diperlukan jaminan atau kolateral. Namun mengharuskan adanya jaminan kepada UKMK terlebih lagi untuk usaha mikro, kecil dan informal, itu sama artinya dengan tidak berniat memberikan kredit kepada kelompok usaha tersebut! Jauh lebih penting dari sekedar jaminan adalah dengan meninjau kelayakan usahanya serta menggembleng sektor ini dengan pendampingan manajemen modern, sehingga saat kredit dikucurkan mereka dapat mengelolanya secara profesional. Inilah yang harus menjadi tugas kaum nasionalis kerakyatan baik yang ada di pemerintahan dan sektor perbankan. Pemerintah dan kalangan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya harus bersikap pro-aktif dengan berkeliling dan meninjau sentra-sentra usaha industri dan perdagangan rakyat untuk memberi bantuan permodalan kepada mereka, sehingga jangan sampai tugas ini diambil alih oleh tengkulak, pengijon atau rentenir, yang jelas-jelas menekan rakyat!

Pengembangan UKMK untuk bidang industri, selain membutuhkan permodalan, juga memerlukan jaminan penyediaan bahan baku yang biasanya diproduksi oleh industri besar dan diperantarai oleh beberapa pedagang perantara. Dalam kaitan ini kita seringkali mendengar bahwa industri kecil kekurangan pasokan bahan baku atau kalaupun ada, harganya tinggi sehingga hasil akhir dari industri tersebut juga harganya tinggi dan sulit terjangkau oleh masyarakat. Dari kejadian ini, maka perlu dikembangkan suatu keterkaitan antara industri hulu sampai ke hilir di mana masing-masing kelompok memiliki posisi tawar yang sama. Cara ini bisa dilakukan misalnya dengan menghapuskan sistem pengua-

saan industri dari hulu hingga ke hilir oleh satu tangan. Dengan cara ini, maka produsen pada tingkat hulu yang biasanya menganakemaskan industri hilir miliknya juga dan menganaktirikan usaha hilir yang bukan miliknya, tidak akan terjadi lagi, karena mereka dilarang menguasai usaha dari hulu hingga hilir!

Sementara itu, kegiatan UKMK yang berkaitan dengan perdagangan eceran, hal utama yang harus mendapat perhatian adalah adanya lokasi atau ruang usaha yang memadai. Keberadaan sektor usaha ini yang biasanya bersifat informal seperti pedagang kaki lima atau pedagang dalam sebuah pasar tradisional, tidak perlu lagi diancam dengan penggusuran-penggusuran dengan dalih ketertiban kota atau peremajaan pasar. Kesemerawutan sektor ini sesungguhnya bermula dari perencanaan kota yang sejak awalnya tidak memberikan ruang kepada golongan ekonomi lemah ini. Dalam perencanaan kota, seringkali mereka dianggap non-faktor. Akibatnya, setelah tata ruang ditetapkan dan kemudian pembangunan kota dilaksanakan, mereka tidak memiliki ruang usaha yang memadai yang pada akhirnya secara alamiah mereka memenuhi ruang-ruang umum yang dianggap menguntungkan, walaupun harus dengan resiko ancaman dikejar-kejar petugas tramtib (ketentraman dan ketertiban) dari pemda.

Sementara itu, kita tahu pula bahwa dalam menetapkan tata ruang, seringkali aparat pemda tunduk kepada pemodal besar, sehingga kemauan pemodal besarlah yang menjadi utama dalam penentuan tata ruang kota. Karena itu, tidak heran apabila kita mendengar bahwa tata ruang telah berubah menjadi "tata uang". Siapa yang bisa memberikan uang lebih besar kepada penata ruang, maka tata ruang kota tersebut akan disesuaikan dengan keinginan si pemberi uang tersebut, walaupun akhirnya rakyat kecil termasuk sektor UKMK dan pedagang kaki lima akan semakin terpinggirkan dalam kota tersebut.

Praktek-praktek pembangunan pasar tradisional yang selama ini seringkali menimbulkan masalah karena tidak bisa menempatkan kembali pedagang lama, harus segera diakhiri! Karena itu, tidak boleh lagi ada alasan bahwa pedagang lama tidak mampu menempati pasar yang telah baru akibat harga kios yang melambung tinggi. Sebelum pasar

tradisional tersebut dibangun, maka harus dikembangkan suatu skema keuangan di mana pedagang lama yang tidak memiliki uang untuk membeli kios barunya, dapat dijembatani oleh lembaga keuangan. Skema keuangan ini harus dijadikan syarat mutlak sebelum pengembang (*developer*) mendapat izin meremajakan pasar tradisional tersebut. Dengan demikian, maka pembangunan pasar, bukan saja berarti mempercantik wajah kota tetapi juga memberdayakan sektor UKMK.

Sektor UKMK termasuk pedagang kaki lima, sesungguhnya adalah sektor yang sangat mandiri. Mereka hidup seringkali hanya mengandalkan modal sendiri, disertai dengan ketidakpastian usaha termasuk pasokan barang ataupun ruang usaha karena selalu dalam ancaman petugas tramtib dari pemda. Namun demikian, mereka tetap bertahan dan bisa memberikan nafkah untuk keluarganya. Dengan demikian, dapatlah kita simpulkan bahwa sesungguhnya pengusaha kecil dan menengah serta informal ini adalah pengusaha yang tangguh. Dapatlah dibayangkan, dengan keadaan serba sulit saja mereka dapat bertahan, apalagi jika mereka dibina, diberikan modal, ruang usaha dan sebagainya, maka semakin berjayalah pengusaha di sektor ini. Karenanya, kaum nasionalis kerakyatan tidak boleh sedikitpun merasa ragu untuk melibatkan diri dan mengembangkan sektor UKMK ini!

Perkembangan manajemen usaha yang semakin modern saat ini, telah mendorong tiap-tiap kegiatan usaha untuk berkonsentrasi pada keahliannya (*core competence*), sehingga beberapa kegiatan yang dianggap sebagai pendukung dari suatu industri bisa dilimpahkan kepada perusahaan lain dengan mengembangkan pola sub-kontrak. Dalam industri mobil misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan mesin (*engine*) dan rancang bangun adalah yang menjadi fokus utamanya.

Karena itu, pembuatan komponen-komponen di luar komponen mesin dan rancang bangunnya bisa dilimpahkan kepada perusahaan lain yang lebih kecil. Dengan demikian, maka semakin banyak perusahaan dapat ditumbuhkan dalam suatu kegiatan industri mobil tersebut. Ini berarti telah terjadi distribusi usaha yang berarti juga terjadi distribusi pendapatan bagi sektor usaha kecil dan menengah. Pola seperti ini memang di beberapa tempat telah berjalan, hanya saja secara nasional

masih bersifat setengah hati sehingga masih perlu terus dikembangkan dalam sebuah perencanaan industri yang terpadu.

Selanjutnya, upaya pemerataan pendapatan lainnya bisa dikembangkan melalui skema kepemilikan saham oleh rakyat melalui pembelian saham perusahaan-perusahaan baik langsung maupun melalui pasar modal. Saat ini, komunitas masyarakat yang telah bermain dalam kegiatan pasar modal sangatlah sedikit dibanding jumlah penduduk Indonesia, yaitu hanya sekitar 100.000 orang. Hal ini sangat jauh dibanding Malaysia yang berpenduduk 22 juta jiwa yang telah melibatkan sekitar 5 juta orang dalam kegiatan pasar modal (*retail investors*). Karena itu, diperlukan suatu lembaga yang dikontrol pemerintah yang dapat mengajak masyarakat untuk ikut serta menikmati kegiatan usaha melalui pembelian saham perusahaan langsung maupun melalui pasar modal.

Lembaga yang harus dibentuk ini adalah lembaga permodalan nasional bersama (PNB) yang tugasnya semacam pengelola dana masyarakat (*fund manager*) dalam skala nasional, yang bisa dikembangkan hingga tingkat kabupaten/kota diseluruh Indonesia (*over the counter*) melalui jaringan informasi teknologi yang saat ini telah berkembang. Lembaga ini harus memberikan penjelasan kepada masyarakat luas bahwa mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi yang menguntungkan dengan menanamkan uangnya pada lembaga tersebut, atau sebagai alternatif menyimpan di tabungan ataupun deposito.

Katakanlah PT TELKOM akan menjual sebagian sahamnya. Apabila PNB sudah berdiri, maka penawaran saham perdana atau IPO (*initial public offering*) bisa langsung dibeli oleh masyarakat luas katakanlah di antaranya para pengusaha wartel atau kiostel juga anggota Asosiasi Pengusaha Nasional Telekomunikasi (APNATEL), namun dengan jumlah pembelian yang dibatasi seperti misalnya maksimum Rp. 20 juta untuk tiap-tiap pengusaha. Dengan demikian, apabila terdapat 100.000 pengusaha yang menjadi investor, maka sudah terkumpul dana sebesar Rp. 2 trilyun. Demikian juga untuk masyarakat luas lainnya, baik itu petani di desa, nelayan, tukang pos, tukang warung, mahasiswa, KUD dan sebagainya bisa pula ikut serta membeli saham PT TELKOM ini. Dengan sistem demikian, maka asas pemerataan dalam kepemilikan

yang berakibat langsung pada pemerataan pendapatan akan terwujud!

Apabila dalam 6 bulan nilai saham PT TELKOM meningkat katakanlah sebesar 30%, maka keuntungan ini dapat dirasakan oleh ratusan ribu orang, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang yang mampu membeli saham PT TELKOM dalam jumlah yang sangat besar, terlebih lagi pembelinya adalah orang asing. Karenanya, dengan pembentukan PNB ini, maka selain dapat meningkatkan pemerataan pendapatan secara berarti, juga dapat mempertahankan kepemilikan usaha di tangan bangsa sendiri.

Penjualan perusahaan-perusahaan yang saat ini berada di BPPN, sekiranya PNB ini sudah berdiri, maka dapat langsung dibeli oleh masyarakat secara luas. Tidak seperti sekarang ini, penjualan perusahaan-perusahaan yang menguntungkan, dengan berbagai cara dapat dimiliki lagi oleh pemilik lama tetapi dengan harga seperempatnya saja atau kalaupun tidak, perusahaan-perusahaan itu dijual kepada investor asing. Dengan cara ini, maka surplus akan terakumulasi lagi pada segelintir orang atau bahkan dibawa ke negeri lain!

5. Menciptakan Satu Juta Pengusaha Baru

Sudah menjadi hukum besi sejarah bahwa sebuah bangsa akan maju bila komponen-komponen dalam masyarakatnya selalu ingin maju. Kehendak untuk maju biasanya dimiliki oleh mereka yang bergerak dalam kegiatan ekonomi, karena dalam bidang ini kemajuan bisa langsung dinikmati berupa keuntungan material yang nyata. Terlebih lagi pada saat ini, kegiatan usaha ekonomi memiliki horison kegiatan yang sangat luas baik dari spektrum sektoralnya maupun spektrum regionalnya, yang bahkan bisa melampaui batas-batas negara. Oleh karena itu, mendorong tumbuhnya pengusaha-pengusaha baru, di samping mengembangkan pengusaha-pengusaha yang telah ada adalah merupakan tindakan yang sangat strategis yang harus dimiliki oleh kaum nasionalis kerakyatan!

Menciptakan pengusaha baru ini, bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah baik yang distimulasi oleh APBN/APBD maupun BUMN/BUMD tetapi juga pihak swasta besar melalui sistem pola

sub-kontrak atau pengadaan barang (*vendor system*). Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi di sektor riil, akibat kebijakan kucuran permodalan yang diperbesar dan diperluas, maka dengan sendirinya akan menciptakan peluang-peluang usaha baru. Karena itu, kegiatan pengembangan permodalan ini pun harus dilakukan di berbagai sektor dan mencakup seluruh wilayah tanah air!

Dapatlah kita bayangkan sekiranya portofolio kredit untuk usaha perikanan yang tadinya hanya 0,02% ditingkatkan katakanlah menjadi 10%. Demikian juga permodalan pada sektor pertanian yang sebelumnya hanya berkisar 10% ditingkatkan menjadi 20%, serta pada UKMK yang sebelumnya sekitar 20% ditingkatkan menjadi 50%. Terlebih lagi jika dalam APBN maupun APBD kegiatan belanja pemerintah untuk sektor pembangunan diperbesar, maka semakin cepatlah usaha menciptakan pengusaha baru tersebut.

Peluang usaha tersebut tentunya harus didukung oleh permodalan yang memadai. Secara mudah saja kita bisa memperkirakan, apabila nilai portofolio kredit secara nasional ditingkatkan sebanyak Rp. 300 trilyun, dan katakanlah 30% dari nilai tersebut dimaksudkan untuk memberikan pinjaman bagi pengusaha baru sebanyak masing-masing Rp. 100 juta, maka akan tercipta sekitar 900 ribu pengusaha baru. Sehingga, untuk menciptakan sejuta pengusaha baru, maka sisanya bisa dipenuhi dengan dukungan modal sendiri, yang sesungguhnya sebagian masyarakat kita sudah memilikinya.

Tentunya upaya ini akan berjalan apabila setiap pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah khususnya para panyalur kredit perbankan, mau memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha baru, sambil melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat. Bidang kegiatan yang dilakukan tentunya bermacam-macam, baik yang ada di sektor pertanian, kelautan, industri kecil dan rumah tangga, termasuk usaha perdagangan. Upaya ini akan berhasil apabila semua pengambil kebijakan bekerja keras sekeras-kerasnya dengan tujuan mengabdi kepada kejayaan bangsa pada masa depan!

Sesungguhnya menjadi pengusaha di Indonesia tidaklah sulit asalkan mereka diberi peluang dan dorongan. Menjadi pedagang misal-

nya, tidak perlu harus mencapai gelar sarjana asalkan sudah bisa membaca dan menulis serta matematika yang sederhana seperti penjumlahan, perkalian, pembagian dan sebagainya. Adapun yang terpenting adalah bagaimana agar pasokan barang bisa tersedia dan peluang pasar tetap terbuka.

Secara sederhana, menjadi pedagang adalah membeli barang baik langsung dari pedagang atau produsen dan kemudian menjual barang tersebut kepada pedagang lagi atau langsung kepada konsumen akhir. Dari kegiatan jual beli ini, ditetapkanlah selisih antara nilai jual dan beli yang mana dari selisih itu sebagian untuk biaya tenaga kerja dan keperluan administrasi perusahaan. Dengan kata lain, menjadi pedagang bukanlah hal yang sulit dan sangat banyak orang Indonesia yang bisa melakukannya asalkan diberi kesempatan!

Demikian juga untuk menjadi industriawan, petani, peternak dan sebagainya bukanlah merupakan hal yang sulit. Kita seringkali menyaksikan berbagai kelompok pemuda yang telah mampu menggeluti dan mengembangkan suatu produk tetapi saat mereka ingin mengembangkannya tersendat oleh kelangkaan modal. Kelompok-kelompok kreatif seperti ini sesungguhnya berjumlah banyak, dan karenanya perlu terus didorong, baik dengan teknologi peningkatan kualitas produk, penerapan manajemen modern, perluasan pasar serta bantuan pinjaman modal yang memadai.

Dengan terciptanya satu juta pengusaha baru, sementara mereka mempekerjakan setidaknya 4 orang saja, maka sudah akan terserap 5 juta orang yang mendapat pekerjaan. Apabila tiap-tiap orang memilik seorang pasangan hidup dan dua anak, maka setidaknya 20 juta orang telah bisa hidup secara wajar. Dengan kata lain, martabat sosial-ekonomi mereka telah dapat terangkat dengan sangat berarti!

Apabila para pengusaha baru tersebut telah bisa sekali saja memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya, maka niscaya mereka akan terus terpacu untuk mendapatkan untung secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Karenanya, mereka pun akan terus belajar mempertahankan perusahaannya dengan mengembangkan penemuan-penemuan baru baik dalam pengembangan produk, perluasan pasar, jaringan bisnis baik

dengan swasta maupun dengan pemerintah dan sebagainya. Bahkan pada tingkat tertentu mereka juga akan mengembangkan sayap usahanya hingga melampaui batas negara terlebih lagi pada era sekarang, perdagangan bebas melalui AFTA maupun APEC telah di depan mata.

6. Menyejahterakan Buruh dan Melaksanakan ESOP

Dalam suatu analisis kelas, disebutkan bahwa antara buruh (pekerja) dan pemilik modal (pengusaha) akan selalu terjadi pertentangan kepentingan dan karenanya kedua kelompok ini selalu dikatakan bersifat antagonistis. Dalam suatu gerakan yang paling radikal, maka pertentangan ini terus dibesarkan sehingga diharapkan terjadi suatu revolusi sosial.

Dalam revolusi ini, buruh atau rakyat secara umum dapat memiliki seluruh alat produksi melalui kepemilikan oleh negara. Dengan demikian, negara atas nama rakyat, berhak menguasai seluruh alat produksi sementara kepemilikan pribadi ditiadakan. Karena cara ini dipandang harus dapat berjalan tanpa menunggu persetujuan seluruh rakyat, maka dijalankanlah sistem diktatur proletariat.

Dalam perkembangannya, sistem ini ternyata mengalami kebangkrutan dan ini bisa disaksikan dengan runtuhnya negara-negara komunis terutama Uni Soviet, Eropa Timur dan sebagainya. Cina tidak termasuk dalam kategori ini karena dalam perjalanannya telah membuka diri untuk menghormati kepemilikan pribadi dan juga secara pasti mengadopsi mekanisme pasar bebas secara terbatas, terutama di daerah-daerah pesisirnya.

Sebab utama mengapa sistem pasar bebas atau persaingan bebas dapat hidup (*survive*) di negara-negara Eropa dan Amerika, adalah karena dalam hubungan buruh-pengusaha telah terjadi suatu perubahan yang sangat fundamental, sehingga tuntutan untuk melakukan revolusi sosial dengan sendirinya terhempas. Berkurangnya hubungan yang antagonistis antara buruh dan pengusaha semakin cepat didorong karena dibolehkannya buruh mengorganisasikan diri.

Perkembangan peradaban manusia tidak saja menumbuhkan paradigma baru pada kaum buruh untuk memperkuat posisi tawarnya,

melainkan juga telah mengubah orientasi pengusaha dari yang bersifat eksploitatif menjadi kemitraan (*partnership*). Implikasinya adalah pengusaha dapat menghargai faktor manusianya yaitu buruh. Dalam paradigma baru ini, faktor manusia atau buruh adalah faktor terpenting dari sebuah kegiatan usaha.

Karena itu, di negara-negara yang beradab, kesejahteraan kaum buruh pun sangat diutamakan dan ternyata hal ini berakibat langsung pada peningkatan produktivitas usaha. Karena buruh merupakan bagian terbesar dari keseluruhan angkatan kerja, maka dengan peningkatan pendapatan buruh, menyebabkan peningkatan permintaan agregat dalam negeri sehingga memicu produksi dalam negeri secara lebih aktif. Keadaan ini akhirnya melahirkan keseimbangan baru (*new equilibrium*) dengan tingkat pemerataan yang lebih nyata!

Pada abad ke-18 di mana mulai berkembangnya kapitalisme industri di Eropa, perlakuan kepada buruh sangatlah menggetirkan. Pada saat itu, paradigma yang berkembang adalah dengan bisa menekan serendah-rendahnya upah buruh, maka akan diperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi pengusaha. Kaum buruh pada masa itu, tidak lebih seperti segerombolan binatang yang terlatih dan lebih mudah diperintah. Karena keadaannya yang sangat miskin dan terpenjara oleh rutinitas kerja, maka kesadaran kaum buruh untuk mengorganisasikan diri pun belum banyak berkembang.

Kebanyakan kaum buruh Indonesia sekarang ini, masih belum merasa penting untuk mengorganisasikan diri dalam suatu serikat buruh. Saat ini memang telah ada sekitar 62 federasi serikat buruh. Namun jumlah buruh yang tergabung dalam serikat buruh hanya sekitar 8% dari seluruh buruh yang ada. Keadaan yang serba sulit dan tertutup di tambah lagi dengan ancaman-ancaman dari pengusaha serta kekhawatiran di PHK bila mengorganisasikan diri, telah membuat buruh menjadi apatis. Karena itu, tidak berlebihan jika keadaan buruh di banyak tempat kerja di Indonesia, sama nasibnya dengan perkembangan awal kapitalisme di Eropa!

Dengan mengorganisasikan diri dalam serikat buruh, maka posisi tawar buruh akan jauh semakin meningkat. Karenanya buruh bisa

menuntut peningkatan kesejahteraan, baik berupa pendapatan yang layak serta jaminan kesehatan dan keselamatan di tempat kerjanya. Hal ini bisa dicapai secara bertahap dengan melakukan perundingan-perundingan dengan pengusaha. Karena itu, tugas utama dari kaum nasionalis kerakyatan adalah mengorganisasikan buruh agar memiliki posisi tawar yang seimbang dengan para pemilik modal!

Apabila peran serikat buruh ini telah tumbuh, maka dengan sendirinya peran pemerintah akan berkurang secara bertahap pula. Karena sesungguhnya, dalam suatu lingkungan kerja, unsur bipartitlah (buruh dan pengusaha) yang seharusnya memainkan peran utama. Kecuali ada hal-hal tertentu yang menyangkut peraturan-peraturan normatif yang dilanggar, maka barulah diperlukan peran atau intervensi pemerintah melalui wadah tripartit (bipartit + pemerintah).

Dalam perspektif gerakan buruh, usaha memanusiakan buruh haruslah datang dari buruhnya itu sendiri. Sangatlah berbahaya mengharapkan usaha memanusiakan buruh ini datangnya dari pengusaha, terlebih lagi budaya feodal bangsa Indonesia masih kuat melekat pada para pengusaha. Ditambah lagi watak dasar manusia yang selalu ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, maka akan sulitlah mengharapkan keasadaran pengusaha di Indonesia untuk secara sertamerta memanusiakan buruhnya. Dalam hubungan ini, maka gerakan buruh harus diarahkan bukan hanya untuk menyadarkan kaum buruh dalam rangka mendesakkan kepentingan-kepentingannya saja, melainkan juga untuk memberikan penyadaran kepada para pengusaha agar dapat mengapresiasi buruhnya secara lebih terhormat. Dengan kesejahteraan buruh yang tinggi, maka secara langsung dapat meningkatkan produktivitas usahanya. Hal ini sudah dibuktikan di berbagai negara maju termasuk juga di Asia seperti di Jepang dan Korea.

Belum banyak pengusaha di Indonesia yang menganggap buruh sebagai manusia yang juga memiliki eksistensi kemanusiaannya. Karenanya perlakuan mereka terhadapnya seringkali tidak manusiawi. Buruh tidak dianggap sebagai sumber majunya sebuah perusahaan, melainkan dianggap pelengkap dari suatu proses produksi. Hal ini berbeda dengan negara yang telah maju dan lebih beradab, di mana buruh atau karyawan

dinilai sebagai sumber daya yang nilainya paling tinggi. Dengan dasar itulah, maka dikembangkan tiga prinsip utama dalam hubungan buruh-pengusaha, yaitu meningkatkan etika manajeman yang berdasar solidaritas, mengharmoniskan hubungan kemanusiaan dalam perusahaan dan yang terakhir menyumbangkan kemajuan sosial-ekonomi masyarakat secara umum melalui perusahaan. Karenanya, tidaklah heran bila dalam perusahaan-perusahaan di negara tersebut, pertemuan antara manajemen dan buruhnya bisa dilakukan tiap bulan untuk mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan hubungan industrial.

Di Jepang misalnya, sebagai bukti bahwa buruh mendapat penghargaan yang tinggi, maka lembaga partner serikat buruh dipimpin oleh para pengusaha terkenal seperti *chairman* dari Toyota, Hitachi, Omron, Fujitsu, Fuji Bank dan sebagainya. Dengan demikian, segala keputusan yang menyangkut hubungan buruh-pengusaha dapat langsung dijalankan, karena mereka adalah orang-orang yang berwibawa dan pengambil keputusan tertinggi dalam perusahaannya masing-masing. Hal ini jauh berbeda dengan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), di mana pimpinannya bertindak seperti perantara para pengusaha, sehingga wajarlah jika APINDO masih belum berfungsi dengan optimal.

Memang sangat sulit untuk mengorientasikan pengusaha agar lebih manusiawi terhadap buruhnya. Hal ini di antaranya karena masih kurangnya pengetahuan mereka tentang ekonomi makro yang sesungguhnya bisa membuat perusahaan berhasil dalam jangka panjang. Kebanyakan dari pengusaha Indonesia masih berwawasan jangka pendek dan mau cepat ambil untung. Karena itu, seharusnya asosiasi pengusaha perlu memberikan pelatihan secara rutin dan berjenjang kepada para pengusaha tentang pentingnya menghargai buruh dalam rangka meningkatkan produktivitas perusahaan.

Kita memang tidak bisa begitu saja menempatkan semua kesalahan pada pengusaha dalam menyejahterakan buruh. Apabila ditanyakan kepada pengusaha mengapa mereka memperlakukan buruh secara tidak manusiawi, maka mereka menjawab, sesungguhnya mereka bisa memberikan lebih, tapi karena biaya-biaya siluman (*invisible cost*) yang harus mereka keluarkan sangat besar, maka biaya tersebut harus diambil dari

alokasi upah buruh. Biaya siluman ini di antaranya untuk menyogok para pejabat dan pengelola bank yang berkaitan dengan usaha tersebut. Saat mereka mendirikan usahanya dengan meminjam kredit dari bank, mereka telah me-*mark up*-nya sehingga beban bunga dan cicilan pokoknya harus dibayar dari kegiatan usaha yang menggunakan investasi, misalnya, setengah dari pinjamannya. Sementara sisanya, yaitu setengah dari pinjamannya dibagi-bagi kepada pengelola bank dan pejabat lainnya termasuk juga pengusahanya itu sendiri.

Banyak pengusaha di Indonesia terutama pada waktu lalu, yang apabila mereka meminjam kredit kepada bank terlebih dahulu menaikkan kebutuhan pinjamannya hingga dua kali dari kebutuhan sebenarnya bahkan bisa lebih dari itu. Apabila kebutuhan pinjamannya Rp. 1 trilyun, maka mereka meminjamnya Rp. 2 trilyun. Nilai Rp. 1 trilyun memang diperuntukan untuk kegiatan usaha, namun yang selebihnya dibagi-bagi kepada mereka yang terlibat dalam proses pinjam meminjam ini termasuk pengusahanya sendiri untuk keperluan pribadi, pengelola bank, pengawas serta pejabat pemerintah terkait yang sebagian ditukarkan dalam valuta asing khususnya USD dan kemudian disimpan di bank bank luar negeri. Inilah sesungguhnya yang menyebabkan pelarian modal dan sekaligus banyak terjadinya kredit macet saat ini! Saat perusahaan beroperasi, tentunya ada biaya untuk buruh serta biaya bunga dan pengembalian pinjaman. Karena uang yang dipinjam sebesar Rp. 2 trilyun, maka pokok dan bunga pinjaman ini harus dapat dibayar dari kegiatan usaha yang nilainya Rp. 1 trilyun. Dengan demikian, hak buruhlah yang terpaksa harus diambil untuk membayar pokok dan bunga pinjaman yang Rp. 2 trilyun itu. Karenanya, sangat dapat dimengerti jika upah buruh di Indonesia menjadi sangat rendah sekali!

Dapatlah dimengerti bila rata-rata biaya buruh (*labor cost*) di Indonesia hanya sekitar 7% saja dari biaya total produksi (*total cost of production*). Sementara di Asia Tenggara saja, nilai ini telah mencapai 21% sedangkan di negara-negara maju sudah bisa mencapai 30-40%. Karena itu, sesungguhnya upah buruh di Indonesia masih bisa dinaikkan hingga dua kali lipat atau lebih asalkan saja segala bentuk KKN dan inefisiensi lainnya bisa dihapuskan!

Adanya anggapan bahwa berkurangnya investasi karena gejolak perburuhan terutama karena menuntut upah yang tinggi, merupakan anggapan yang tidak benar. Terlebih lagi jika kita melihat data bahwa upah buruh Indonesia termasuk yang sangat rendah dibanding negara-negara Asia pada umumnya. Menurut survai yang dilakukan *Warner International* tahun 2000, untuk upah buruh industri tekstil, diperoleh data bahwa upah buruh di Singapura sebanyak 21 kali lebih tinggi dari upah buruh di Indonesia. Malaysia lebih dari 11 kali, Hong Kong lebih dari 22 kali, Thailand lebih dari 7 kali, Cina lebih dari 5 kali, Filipina lebih dari 5 kali, Pakistan lebih dari 2 kali dan bahkan Vietnam lebih dari 1,6 kali dibanding upah buruh di Indonesia!

Karena itu, untuk dapat meningkatkan kembali kegiatan investasi, maka harus dilakukan perjuangan untuk menghapus KKN yang dilakukan secara bersama antara buruh dan pengusaha, tentunya pengusaha yang bukan bermental maling. Karena itu, serikat buruh dan asosiasi pengusaha berkepentingan untuk mendesak pemerintah agar segera menghapus segala bentuk KKN, yang dimulai dengan membersihkan para pejabat tinggi negaranya serta pengelola lembaga keuangan dan perbankan pada umumnya yang berindikasi KKN. Di samping itu, hal terpenting untuk memacu investasi adalah perlunya meningkatkan stabilitas politik dan keamanan serta kepastian hukum, sehingga para investor tidak merasa bingung dan ketakutan seperti sekarang ini!

Untuk mengurangi antagonisme antara buruh dan modal, selain daripada memperkuat posisi tawar kaum buruh dengan membangun serikat-serikat buruh, kaum nasionalis kerakyatan juga harus memberikan kesempatan kepada kaum buruh untuk turut memiliki saham perusahaan dengan menjalankan ESOP (*employee stock ownership program*). Di negara-negara Eropa dan Amerika, pelaksanaan program ini telah berjalan dengan sangat memuaskan dan bahkan dapat secara langsung meningkatkan produktivitas kerja dan keuntungan perusahaan. Karenanya, sampai saat ini banyak perusahaan yang dengan sadar memberikan kesempatan kepada para buruhnya untuk segera memiliki saham, bahkan ada yang sampai menguasai 51% dari keseluruhan saham.

Untuk Indonesia, di mana saat ini sedang berlangsung penyitaan

asset-asset perusahaan oleh BPPN, sesungguhnya merupakan kesempatan yang baik untuk bisa melaksanakan program kepemilikan saham untuk kaum buruh ini. Demikian juga halnya dengan rencana privatisasi BUMN yang saat ini sedang berlangsung. Tentunya, akan lebih menggembirakan, bila perusahaan-perusahaan swasta dengan kesadaran penuh melaksanakan program ini semata-mata demi produktivitas, dan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang!

Program kepemilikan saham ini, tentunya bisa dilaksanakan secara langsung, yaitu perusahaan secara langsung melepaskan sebagian saham kepada buruhnya. Para buruh diminta untuk menyisihkan dari tabungannya untuk kemudian membeli secara langsung saham perusahaan tersebut. Kalaupun ternyata tabungan para buruh tidak mencukupi untuk membeli sebagian saham tersebut, maka bisa juga dilakukan dengan cara opsi, yaitu yang dibayarkan kemudian hari melalui dividen. Setelah katakanlah 5 tahun, maka para buruh tersebut telah memiliki saham secara penuh, sehingga pada tahun berikutnya bisa mendapatkan keuntungan perusahaan melalui dividen yang bisa dinikmati langsung oleh para buruhnya.

Untuk kasus perusahaan yang disita BPPN, sesungguhnya pemerintah bisa menetapkan agar diciptakan suatu persyaratan bahwa perusahaan yang akan dijual, sebagian sahamnya harus dilepas kepada para buruhnya, katakanlah 20% melalui skema opsi yang akan dibeli secara dicicil melalui hasil dividen. Apabila hal ini dilakukan, maka akan semakin banyak masyarakat yang memiliki perusahaan-perusahaan unggul, yang berarti pula merupakan upaya langsung untuk meredistribusikan asset-asset produktif kepada masyarakat luas. Dengan demikian, maka akan semakin banyak jumlah masyarakat yang meningkat pendapatanya. Karena itu, program ESOP ini adalah juga program strategis untuk meningkatkan pemerataan pendapatan!

7. Menyeimbangkan Kekuatan Pribumi dan Non-Pribumi

Mungkin hanya sedikit orang yang telah melupakan bahwa pada tanggal 13-14 Mei 1998, telah terjadi suatu kerusuhan yang kemudian

berkembang hingga bernuansa etnis. Berbondong-bondong masyarakat dari etnis Cina atau yang sering kita sebut nonpri lari meninggalkan tanah air dengan membawa berbagai asset yang masih mungkin bisa dibawa. Kejadian tersebut tentunya sangatlah menggetirkan dan mempermalukan kita sebagai bangsa. Karena secara individual, sesungguhnya mereka tidak bersalah. Namun demikian, telah menjadi suatu fakta sosial, bahwa kaum etnis Cina seringkali menjadi sasaran dari kemarahan rakyat. Hal ini bisa kita telusuri misalnya dari tahun 1960-an dan tahun 1980-an di mana kerusuhan bernuansa etnis ini terjadi.

Sebagian besar orang merasa ragu dan takut untuk membicarakan etnis Cina secara terbuka, karena khawatir dituduh mempersoalkan sara (suku, agama, ras dan antar golongan). Karena merasa takut, kita tidak pernah menyelesaikan ketegangan etnis tersebut sampai ke akar-akarnya, sampai akhirnya kita menyaksikan kasus-kasus kerusuhan sosial yang bernuansa sara tersebut. Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa persoalan sara selama ini telah ada tetapi kita selalu menyembunyikannya "di bawah karpet". Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang beradab dan modern, sudah bukan zamannya lagi kita menutup-nutupi persoalan yang memang sesungguhnya ada. Kaum nasionalis kerakyatan, tidak perlu merasa ragu mengungkap semua persoalan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat untuk selanjutnya mencarikan pemecahannya!

Apabila kita ingin mendalami akar permasalahan kerusuhan sosial di Indonesia, maka masalah utama yang harus kita selidiki adalah kesenjangan sosial-ekonomi di tengah-tangah masyarakat kita. Kesenjangan sosial-ekonomi ini akan berkait dengan perbedaan etnis atau ras, golongan dan bahkan juga perbedaan agama. Karena itu, untuk mencari penyelesaian dalam persoalan sara ini, maka tugas utama yang harus kita lakukan adalah memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi, sehingga dengan sendirinya akan mengurangi kecemburuan sosial. Karena itu, untuk memperlemah ketegangan potensial antara pribumi dan nonpribumi ini, diperlukan kerja keras semua pihak untuk menghilangkan kecemburuan sosial-ekonomi tersebut!

Tidak ada yang bisa membantah bahwa kekuatan bisnis kaum nonpri begitu tangguh, memiliki jaringan yang kuat serta solidaritas yang tinggi,

bahkan bukan hanya pada tingkat nasional tetapi juga regional dan internasional. Untuk kasus Indonesia, keberadaan bisnis kaum nonpri telah sangat berurat berakar sejak bangsa Indonesia masih jauh dari kemerdekaan. Pada zaman penjajahan tempo dulu, kaum nonpri merupakan komunitas masyarakat perantara dari penguasa kolonial kepada masyarakat pribumi dan sebaliknya, sehingga berbagai jaringan ekonomi produksi maupun distribusi telah lama terbangun dan dikuasainya.

Pengalaman yang begitu lama ini terus dipertahankan hingga bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Terutama saat Orde Baru berkuasa, komunitas nonpri tidak diperbolehkan masuk dalam gelanggang politik, bahkan secara sosial-budaya pun mereka dilarang untuk mengembangkannya, kecuali kegiatan bisnis. Karena itulah, pada masa itu kalangan nonpri identik dengan bisnis atau pelaku bisnis adalah nonpri. Kebijakan ini dengan sendirinya semakin memperkuat posisi kalangan nonpri dalam kegiatan ekonomi, sehingga komunitas nonpri yang berjumlah 4% dari jumlah penduduk Indonesia, bisa menguasai sekitar 80% dari seluruh kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

Kita juga menyaksikan, hampir seluruh daerah yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yaitu di kota-kota besar, selalu dipenuhi oleh kelompok usaha dari kalangan etnis Cina ini. Karenanya, apabila di negara-negara lain kita mengenal adanya China Town yang dibangun secara khusus, maka di Indonesia, kota-kota besarlah yang identik dengan China Town tersebut! Jakarta adalah China Town, Surabaya adalah China Town, Medan adalah China Town, Semarang adalah China Town, Bandung adalah China Town, begitulah seterusnya, sehingga tidak mustahil pada suatu saat Indonesia terkesan sebagai Chinese Country. Secara psikologis, keadaan ini telah menyinggung warga pribumi yang merasa nenek moyangnya telah hidup di tanah tersebut berabad-abad lamanya.

Peristiwa 13-14 Mei 1998 memang telah menampar wajah bangsa kita secara langsung. Namun apabila kita membandingkannya dengan kejadian serupa yang pernah berlangsung pada bulan Oktober 1740, maka peristiwa Mei tersebut relatif sangat kecil dan tidak terlalu mengerikan. Pada tahun 1740 tersebut, sekitar 10.000 warga nonpri di Batavia atau Jakarta sekarang, telah dibunuh secara keji oleh pemerintah

kolonial dengan memanfaatkan kalangan pribumi. Mereka bukan saja kaum lelaki tetapi juga perempuan dan anak-anak. Hal ini terjadi tidak lain karena kecemburuan sosial-ekonomi di mana warga nonpri saat itu sangat berhasil dalam perekonomian yang bahkan sampai menyaingi bangsa Eropa. Dengan tuduhan utamanya sebagai penyelundup (*smugglers*), maka sentimen kebencian etnis dapat dibangun hanya dalam beberapa hari saja!

Kita memang seringkali menganggap remeh bahwa peristiwa serupa tidak mungkin terjadi pada zaman yang telah beradab ini. Namun bila saja kita mau menengok sedikit ke belakang, beberapa peristiwa pembantaian ribuan bahkan jutaan manusia secara keji, benar-benar telah terjadi dan dicatat oleh tinta darah dalam sejarah peradaban manusia. Pembantaian lebih dari empat juta orang Yahudi di Jerman baru berselang 60 tahun, pembunuhan lebih dari satu juta manusia di Kamboja oleh kelompok Khmer Merah baru berselang 15 tahun, pembantaian ratusan ribu orang Indonesia pasca G30S/PKI baru berselang 35 tahun, bahkan pembunuhan puluhan ribu warga Boznia-Herzegovina di suatu tempat yang mengaku paling beradab yaitu di Eropa baru berselang 10 tahun. Karena itu, kaum nasionalis kerakyatan, jangan sekali-sekali menganggap remeh kemungkinan terjadinya peristiwa serupa kepada warga nonpri pada masa mendatang!

Berkembangnya era globalisasi ternyata semakin memperkokoh komunitas nonpri pada tingkat regional dan internasional. Jumlah komunitas Cina perantauan (*overseas chinese*) yang berada di seluruh dunia saat ini adalah 60 juta jiwa dan memiliki GDP sekitar USD 500 miliar yaitu suatu jumlah ketiga terbesar setelah Amerika Serikat dan Jepang. Dengan jaringan yang demikian tersebar di berbagai negara terutama di kawasan Asia Pasifik, maka sangatlah wajar jika komunitas ini yang akan tampil mengambil keuntungan terbesar dari setiap transaksi bisnis antar negara di kawasan ini. Terlebih lagi abad sekarang adalah abad Asia Pasifik.

Di satu sisi keadaan ini begitu menguntungkan, namun pada sisi lainnya akan bisa berakibat buruk apabila masyarakat pribuminya semakin jauh tertinggal. Karena itulah, harus ada upaya yang terpadu

agar posisi yang menguntungkan ini dapat pula menarik gerbong bisnis dari kalangan pribumi yang selama ini tertinggal. Kesadaran untuk menarik gerbong bisnis yang tertinggal ini, harus menjadi kesadaran kedua belah pihak yaitu kalangan pribumi dan nonpri sendiri, serta didorong oleh peraturan perundang-undangan yang memadai!

Gerakan asimilasi atau pembauran tidak boleh hanya diartikan dalam bidang sosial-budaya saja tetapi juga harus diterjemahkan secara nyata dalam bidang ekonomi. Berbagai keunggulan kalangan nonpri seperti misalnya keuletan, pantang menyerah, hemat sebelum benar-benar untung, serta menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis, harus pula dijadikan contoh oleh kalangan pribumi! Sebaliknya kalangan nonpri yang telah berhasil, harus pula melibatkan secara aktif kalangan pribumi dalam kegiatan bisnisnya atau dengan kata lain mereka harus secara sadar menularkan keberhasilannya kepada kalangan pribumi.

Pada zaman Orde Lama kita mengenal Politik Benteng yaitu proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Pada periode ini banyak bermunculan perusahaan Ali-Baba, di mana yang mendapat berbagai kemudahan adalah Ali sang pribumi tetapi yang menjalankan perusahaan adalah Baba sang nonpri. Saat ini, gerakan bisnis yang mungkin bisa kita jalankan adalah membentuk Baba-Ali, di mana Baba menggandeng beberapa Ali yang berniat terjun ke bisnis secara serius. Para Ali di sini, janganlah para pejabat, melainkan Ali yang berada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilakukan baik dalam rangka bisnisnya itu sendiri ataupun dalam rangka magang sebelum dapat berdiri sendiri.

Gerakan ini memang terkesan bukan gerakan ekonomi semata atau tepatnya gerakan ekonomi yang berbasis integrasi sosial. Dalam jangka panjang, gerakan ini akan menimbulkan stabilitas sosial yang bersifat lintas etnis. Keberhasilan ekonomi sebaik apapun akan menjadi kurang berarti bila suatu kelompok masyarakat, hidup di tengah-tengah kecemburuan sosial-ekonomi yang setiap saat bisa meledak dan berpotensi merugikan tidak saja harta benda tetapi juga jiwa dan raga.

Kaum nasionalis kerakyatan harus berada di barisan terdepan untuk menjaga jangan sampai setetes darah pun tumpah dari tubuh kalangan

nonpri akibat kecemburuan sosial-ekonomi ini! Namun demikian apa yang harus dikerjakannya bukanlah seperti pemadam kebakaran atau petugas keamanan. Sebaliknya, yang harus dilakukan adalah "membunuh" akar penyebab kesenjangan sosial-ekonomi tersebut. Kaum nasionalis kerakyatan yang berada pada sektor ekonomi di mana pun tempatnya, baik itu di pemerintahan, perbankan, bisnis sektor riil dan sebagainya, harus berjuang keras untuk memperkecil jurang perbedaan ekonomi antara kalangan pribumi dan nonpri ini!

Kita harus menyadari bahwa komunitas etnis Cina merupakan bagian yang nyata dari perjalanan sejarah masyarakat kita. Anggaplah mereka sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia. Mereka juga harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan kehidupan sosial-budayanya seperti juga kita memberi kesempatan kepada suku-suku lain untuk berkembang. Pendidikan-pendidikan berbasis etnis Cina, hari-hari besar bahkan keberadaan agama dan kepercayaan etnis Cina juga perlu dikembangkan secara wajar seiring dengan pengembangan sosial-budaya daerah-daerah lainnya.

Tindakan serupa yang harus dilakukan oleh kalangan nonpri adalah dengan membaur dan tidak membangun kehidupan yang eksklusif apalagi terkesan "menantang" di tengah-tengah kesulitan ekonomi sebagian besar kalangan pribumi. Tindakan-tindakan eksklusif yang cenderung diskriminatif harus segera diakhiri seperti misalnya pemberian upah yang lebih tinggi kepada pekerja nonpri dibanding pribumi di suatu perusahaan milik nonpri, padahal pekerjaan yang dilakukannya adalah sama dan sejenis. Demikian juga, kurangilah membangun perumahan-perumahan eksklusif dan mewah yang mayoritas penghuninya adalah kalangan nonpri, sementara hanya berjarak beberapa meter saja dari tempat itu, terdapat perkampungan kumuh yang masyarakatnya hidup serba kesulitan.

Apabila kedua belah pihak telah menyadari kelemahan dan kekuatannya masing-masing dan kemudian mencari sinerginya, maka akan terbentuklah suatu keseimbangan yang dinamis antara kekuatan pribumi dan nonpribumi. Dengan keseimbangan ini, maka ketentraman dan kepercayaan diri rakyat Indonesia dalam bidang bisnis secara umum akan meningkat,

sehingga pada saatnya akan siap menghadapi berbagai tantangan globalisasi dengan cara bergandengan tangan dan bahu-membahu!

3.2.3. Menegakkan Kewibawaan Hukum

Berkembangnya suasana anti hukum, saat ini bukan hanya milik mereka yang kurang berpendidikan. Tetapi justru mereka yang berpendidikan sangat tinggi, dengan berbagai cara, berusaha tidak mengindahkan aturan hukum. Hukum seperti seringkali kita saksikan telah menghamba pada kekuasaan dan materi sehingga kehilangan objektivitasnya. Mudahnya upaya menihilkan arti hukum ini, karena memang dalam aturan-aturan hukum yang saat ini kita miliki masih banyak yang mudah dimanipulasi, baik dalam materi atau substansinya, aparat penegaknya maupun kelembagaan hukumnya itu sendiri.

Pembenahan substansi hukum haruslah dimulai dari filosofi pendirian negara Indonesia. Filosofi pendirian negara yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945, setidaknya memerlukan penjabaran dalam bidang hukum yang meliputi tiga bidang utama yaitu yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan partisipasi politik, hukum ekonomi dan bisnis, serta pengembangan hukum adat.

Pengembangan materi hukum saja tidak dapat menjamin suatu aturan hukum dapat dilaksanakan bila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa, terlebih lagi jika tidak didukung oleh kelembagaan hukum yang memadai. Dalam kaitan ini, disamping diperlukan pengawasan oleh masyarakat secara langsung kepada para aparat tersebut, perlu juga dilakukan peremajaan aparat penegak hukum oleh mereka-mereka yang relatif belum terkontaminasi oleh mafia hukum atau mafia peradilan. Bagi para penegak hukum yang terindikasi telah terkontaminasi, harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk pensiun dini atau kalau memang diperlukan, segera dipensiunkan!

Sementara itu, yang berkaitan dengan kelembagaan hukum, harus dikembangkan suatu mekanisme yang jelas antar lembaga hukum, sehingga suatu proses hukum dapat berjalan dengan lebih pasti dan cepat. Kelembagaan hukum yang berkaitan dengan badan peradilan,

juga perlu dikembangkan agar tidak semua perkara harus masuk pengadilan. Kita mengetahui bahwa pengambilan keputusan suatu perkara yang masuk pengadilan, biasanya berjalan sangat lama terlebih lagi kalau harus melakukan banding dan kasasi. Karena itu, keberadaan lembaga arbitrase, negosisasi, mediasi dan konsiliasi perlu lebih dikembangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

1. Pengembangan Hukum HAM dan Partisipasi Politik

Hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia (HAM), setidaknya harus dapat merumuskan hal-hal seperti bebas dari rasa takut, bebas dari penyiksaan, bebas dari diskriminasi, serta secara khusus perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam bidang HAM ini, kita sebagai bangsa yang telah tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus menghormati dan melaksanakan butir-butir yang telah tercantum dalam *Universal Declaration of Human Right* tahun 1948. Selanjutnya juga, penelitian mengenai konvensi-konvensi yang telah dilahirkan oleh PBB maupun ILO (*international Labor Organisation*) yang berkaitan dengan HAM perlu dilakukan dengan cermat dan apabila memang dianggap sudah bersesuaian dengan keadaan bangsa kita, maka harus segera diratifikasi untuk selanjutnya dilaksaksanakan secara konsekuen!

Peningkatan perlindungan terhadap HAM dapat dilakukan dengan cara pembentukan lembaga pengawasan HAM tidak saja berada pada tingkat nasional seperti yang ada pada Komnas HAM tetapi juga harus diadakan sampai pada tingkat daerah atau lebih tepatnya tingkat kabupaten/kota. Hal ini diperlukan karena biasanya semakin jauh suatu masyarakat dari pusat pengawasan, semakin sering pelanggaran HAM itu terjadi. Keberadaan lembaga-lembaga pengawasan HAM di daerah ini dengan sendirinya bisa mengurangi beban Komnas HAM, sehingga secara umum penanganan pelanggaran HAM bisa berjalan dengan cepat tanpa perlu berlarut-larut seperti sekarang ini.

Di antara berbagai konvensi yang terpenting untuk dilaksanakan adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kita mengetahui bahwa budaya Indonesia pada umumnya adalah budaya patriar, yaitu

budaya yang menjadikan laki-laki sebagai mahluk superior di hadapan perempuan. Dengan budaya demikian, maka seringkali terjadi ekses-ekses yang berkaitan dengan kekerasan fisik terhadap perempuan dan juga anak-anak. Karena itulah kita perlu segera mengembangkan perangkat hukum yang bisa mengurangi ekses-ekses ini secara lebih berarti dan terasakan. Di samping itu, perlu juga dikembangkan semacam lembaga konsultasi akibat trauma (*Trauma Center*) bagi perempuan dan anak yang telah mengalami kekerasan fisik di berbagai wilayah.

Dalam kaitannya dengan pengembangan partisipasi politik rakyat, perlu diciptakan aturan hukum yang dapat menjamin kebebasan seseorang untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul, tanpa mendapat pembatasan-pembatasan yang berarti. Setiap orang harus diberi kebebasan untuk memilih aliran politik yang diyakininya, sejauh aliran politik tersebut tidak bertentangan dengan filosofi dasar pendirian negara-bansga ini. Partisipasi politik rakyat tidak boleh dihambat oleh peraturan-peraturan, terlebih lagi keadaan saat ini merupakan keadaan pancaroba atau transisi dari sistem yang otokratis menuju sistem yang lebih demokratis. Karenanya, peraturan-peraturan yang menghambat keikutsertaan rakyat untuk mendirikan partai politik dan mengikuti pemilu harus segera dihapuskan! Sebaliknya, biarlah rakyat sendiri yang akan melakukan penyeleksian secara alamiah terhadap partai-partai yang bertanding dalam pemilu.

Pembaruan hukum dalam bidang politik, juga harus dapat mendekatkan rakyat dengan para wakilnya. Oleh karena itu, secara bertahap sistem pemilu yang dilaksanakan harus dapat mengarah pada sistem pemilu distrik. Dengan sistem ini, diharapkan rakyat tidak akan lagi memilih wakil-wakilnya seperti memilih "kucing dalam karung", karena dengan cara ini rakyat akan langsung mengetahui siapa-siapa calon wakil mereka yaitu dengan mencantumkan foto atau nama calon legislatif mereka dalam kertas pemilihan. Seandainya memang pemilu mendatang belum dapat dilakukan secara distrik murni, maka setidaknya harus dilakukan dengan cara proporsional dengan stelsel terbuka, sehingga setidaknya para calon wakil rakyat sudah dapat diketahui oleh pemilih walaupun masih dibayang-bayangi oleh partai.

Demikian juga halnya dengan pemilihan para eksekutif di berbagai jenjang pemerintahan, rakyat harus secara langsung memilih para calon tersebut tanpa harus diwakili oleh anggota-anggota parlemennya. Kalau sekarang pemilihan presiden dan wakil presiden sudah bisa dilakukan secara langsung, maka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, juga harus bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hal ini di samping bisa lebih mendekatkan para eksekutif dengan rakyat pemilihnya, juga bisa menghindari KKN (*money politic*) antara calon eksekutif dengan anggota parlemen yang memilihnya, seperti yang biasanya dilakukan selama ini di daerah-daerah!

Selain pentingnya dikembangkan aturan hukum yang mengatur partisipasi politik rakyat, maka yang perlu juga diatur adalah partisipasi rakyat dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kritik tajam pada pemerintah Orde Baru adalah karena diberlakukannya dwi-fungsi ABRI, yaitu suatu peranan ABRI dalam bidang politik dan juga keamanan. Gerakan reformasi politik pasca lengsernya Presiden Soeharto, dengan keras menuntut agar dwi-fungsi ABRI dihapuskan sehingga seluruh kehidupan politik, diserahkan pada mekanisme yang demokratis dan profesional. Demokratis berarti semua keputusan harus diambil oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Jatah kursi bagi ABRI yang dulu mencapai 20% di DPR saat ini sudah dihapuskan sama sekali. Sementara itu profesional artinya, mengembalikan tugas ABRI dalam hal ini TNI sebagai alat negara yang bertugas di bidang pertahanan dan keamanan.

Namun demikian kita mengetahui bahwa dalam hal pertahanan dan keamanan ini, pada saat-saat tertentu seharusnya bukan saja menjadi tanggung jawab TNI, melainkan juga menjadi kewajiban seluruh rakyat atau yang kita sebut sebagai bela negara. Dalam kaitan inilah maka rakyat sipil apabila diperlukan harus bisa berfungsi sebagai pengaman negara. Dengan kata lain, maka sipil harus bisa berdwi-fungsi. Untuk fungsi pengamanan negara inilah, maka perlu dipertimbangkan adanya sistem hukum yang mengatur agar secara sukarela, rakyat dapat ikut dalam pendidikan dasar kemiliteran. Sehingga pada saat negara mendapat ancaman dari luar, maka tidak saja anggota TNI yang mampu

memanggul senjata tetapi juga rakyat sipil yang telah mendapat latihan militer tersebut. Pelatihan ini, tentunya harus dilakukan oleh pihak militer yang profesional!

2. Pengembangan Hukum dalam Kegiatan Ekonomi dan Bisnis

Pengembangan hukum nasional, secara umum juga harus dapat memacu pengembangan, pertumbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi masyarakat. Karena itulah, pengembangan hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis, terutama dalam menghadapi era globalisasi harus sesegera mungkin dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan agar jangan sampai berbagai potensi ekonomi dan bisnis di negeri kita tidak dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam kita, aturan hukum harus dapat menjamin agar surplus dari kegiatan ekonomi tersebut, khususnya yang dikerjasamakan dengan pihak swasta terlebih lagi swasta asing, dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Karena itulah, maka perlu dilakukan pembaruan UU Kontrak Karya dalam hal penambangan, serta pembuatan UU yang dapat mengintegrasikan kegiatan ekonomi masyarakat lokal!

Aturan hukum yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan seperti misalnya UU Pasar Modal, UU Perbankan, UU Leasing dan Sewa Beli, UU Modal Ventura, UU tentang Jaminan, UU yang berkaitan dengan pembiayaan secara syari'ah, dan sebagainya dalam beberapa hal perlu mengalami pembaruan yang pada intinya agar dapat memacu berkembangnya sektor riil, sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Namun demikian, aturan hukum tersebut harus juga dapat meningkatkan peran pengawasan sehingga jangan sampai terjadi kebocoran-kebocoran.

Pembaruan hukum juga sangat dibutuhkan sebagai instrumen pemerataan, terlebih lagi keadaan saat ini, menunjukkan adanya jurang lebar antara kaya dan miskin. Dalam kaitan ini maka yang terutama

perlu dikembangkan adalah UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, UU Pengembangan UKM, UU Koperasi, UU yang berkaitan dengan keterkaitan usaha (*sub contracting*) antara usaha besar, menengah dan kecil, UU yang mengatur jenis kegiatan usaha sehingga tidak adanya perangkapan kegiatan hulu sampai hilir oleh satu tangan pengusaha serta yang tidak kalah pentingnya adalah UU yang berkaitan dengan pengembangan sektor informal.

Selanjutnya, dalam rangka pengembangan hukum ini harus dikembangkan sistem perlindungan untuk sebagian besar masyarakat akibat kegiatan ekonomi dan bisnis . Jangan sampai, kegiatan ekonomi tumbuh dengan pesat, tetapi di sisi lain menimbulkan kerugian bagi sebagian besar rakyat. Dalam kaitan ini, maka pengembangan atau pelaksanaan UU Perlindungan Konsumen, UU Obat dan Makanan, UU yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja, serta UU Lingkungan Hidup dan sebagainya harus mendapat perhatian khusus!

3. Penerapan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Nasional

Kebhinekaan yang berarti keberagaman adalah suatu fakta dalam negara Indonesia modern. Mengelola kebhinekaan apabila tidak disertai dengan kearifan untuk menghargai adat dan budaya lokal, akan memunculkan ketidakpuasan dari berbagai entitas masyarakat adat itu sendiri. Hal ini telah terlihat di berbagai wilayah tanah air, di mana perlawanan masyarakat adat bukan lagi merupakan problem kecil tetapi sudah menjadi permasalahan yang merata di berbagai wilayah, terlebih lagi perlawanan tersebut, dalam era keterbukaan ini, dengan mudah dapat diketahui oleh berbagai kalangan, termasuk kalangan internasional. Sehingga, peminggiran dan pengingkaran terhadap hak-hak adat saat ini sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi.

Membangun kearifan dalam menyikapi masyarakat adat ini harus dilakukan dengan mengakui keberadaan mereka sebagai bagian sah dari republik ini dan mengakui adanya hukum-hukum termasuk hukum kepemilikan adat dan berbagai lokal jenius yang telah berkembang berabad-abad yang lalu. Kita tidak perlu takut untuk mengakomodasi

hukum dan kelembagaan masyarakat adat dalam pengembangan hukum nasional. Apabila keharusan ditegakkannya hukum adalah untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat, maka akomodasi terhadap pelaksanaan hukum adat adalah sesuatu yang wajar, jika teryata mampu memenuhi rasa keadilan tersebut.

Karena itulah, maka harus dapat diciptakan suatu sistem hukum yang dapat memberi ruang hidup terhadap hukum dan kelembagaan masyarakat adat ini. Penyeragaman yang pada akhirnya mematikan keberadaan masyarakat adat harus segera dihentikan, terlebih lagi hal tersebut telah dipakai alasan oleh mereka yang memiliki kekuatan modal untuk menggusur keberadaan mereka! Keberadaan hukum dan kelembagaan masyarakat adat, sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan filosofi berdirinya bangsa Indonesia, bukan saja harus tetap dipertahankan tetapi juga dikembangkan.

Berbagai peraturan hukum dan perundang-undangan yang berusaha menyeragamkan harus segera diperbarui seperti misalnya UU No.5 tahun 1979 yang menyeragamkan seluruh wilayah untuk dibentuk menjadi wilayah desa, sehingga menghilangkan keberadaan adat seperti nagari, marga dan sebagainya. Dengan pemaksaan diadakannya desa yang ternyata bukan saja sebagai pengakuan wilayah tetapi juga menyangkut hukum dan sistem administrasi, jelas telah menjadikan masyarakat adat menjadi terpecah-belah, tidak saja yang menyangkut kepemimpinannya tetapi juga hak-hak kepemilikannya. Hal ini diakibatkan karena peraturan-perundangan yang ada saat ini, mengharuskan wilayah desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakatnya, sementara itu hak milik berupa tanah adat secara otomatis menjadi milik negera.

Sistem hukum nasional yang arif terhadap keberadaan hukum dan kelembagaan masyarakat adat, dengan sendirinya akan memberikan ruang hidup dan medorong potensi lokal genius dari berbagai masyarakat adat. Sehingga, pada akhirnya kehidupan secara nasional pun akan terasa lebih semarak dalam kebhinekaan. Kaum nasionalis kerakyatan harus mengartikan Bhineka Tunggal Ika bukan sebagai penyeragaman, melainkan persatuan dalam keberagaman yang dinamis!

3.2.4. Menyempurnakan Identitas Sosial-Budaya Ke-Indonesia-an

Identitas ke-Indonesia-an bukanlah suatu benda mati, tetapi suatu proses yang hidup. Identitas sosial-budaya bangsa Indonesia terbentuk tidak saja karena interaksi dengan keadaan alamnya serta peninggalan feodalisme tetapi juga karena persamaan nasib saat kita mengalami penjajahan. Selanjutnya, pembentukan ini diperkaya dengan adanya interaksi budaya di dalam wilayah Indonesia serta interaksi dengan berbagai bangsa. Dengan telah berdirinya Indonesia sebagai suatu negara modern, maka nilai-nilai rasional juga turut membentuk identitas sosial-budaya bangsa Indonesia. Namun demikian, dari berbagai unsur pembentuk tersebut, haruslah disadari bahwa identitas sosial-budaya yang dominan pada bangsa Indonesia saat ini adalah yang dibentuk oleh proses penjajahan yang terlalu lama. Sehingga mental bangsa kita masih belum beranjak jauh dari mental orang terjajah!

Di antara yang terpenting akibat penjajahan ini adalah bahwa sebagian besar rakyat kita masih belum percaya diri dalam berbagai hal. Sikap yang selalu ingin didikte atau diperintah, sikap kurang kreatif, inovatif dan produktif adalah beberapa bukti mentalitas orang tertindas. Orang-orang tertindas sangat terbiasa bekerja berdasarkan perintah, sehingga pada akhirnya daya kreasi dan inovasi mereka secara bertahap berkurang dan bahkan mati sama sekali. Di tambah lagi dengan keadaan alam yang subur, maka semakin lengkaplah identitas sosial-budaya Indonesia, yaitu pemalas dan santai!

Dalam keadaan yang serba kurang siap ini, maka saat berinteraksi dengan berbagai budaya asing, rakyat kita tidak menangkap "apinya" melainkan "asapnya" atau dengan kata lain bukan saripatinya melainkan kulit luarnya saja. Pada bidang agama misalnya, rakyat kita lebih menyukai simbol-simbol yang diungkapkan dalam bentuk kegiatan seremonial atau upacara. Pada bidang ekonomi, bukan menekankan pada pengembangan produksi melainkan pada kegiatan pemburuan rente. Pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan pada penelitian dan pengembangannya tetapi pada usaha menjiplak. Pada

bidang gaya hidup, yang digali bukan sikap efisien dan rasional tetapi kemewahan dan konsumerisme. Dengan kata lain, yang menjadi "asap" dari budaya asing telah diserap dan menjadi "api" dalam budaya kita! Karena itulah kemudian bangsa Indonesia sangat sulit untuk maju.

Menyadari akan berbagai hal tersebut, maka, untuk mencapai Indonesia yang lebih maju dan modern, harus didorong oleh perubahan mentalitas sosial-budayanya. Kita masih memerlukan suatu proses pembelajaran dan penyadaran melalui pendidikan serta ketauladanan dari para pemimpin. Proses pendidikan harus disertai dengan ketauladanan, karena apabila tidak, nilai-nilai yang ditanamkan dalam ruang belajar akan dengan mudah menghilang. Dengan demikian, maka kita perlu mencari figur-figur pemimpin yang bisa menjadi tauladan. Kaum nasionalis kerakyatan, di berbagai lapisan masyarakat, haruslah mampu menjadi tauladan bagi masyarakatnya!

1. Menggali Nilai-nilai Luhur Sosial-Budaya Bangsa

Tiap-tiap daerah di Indonesia, memiliki keunggulan sosial-budayanya masing-masing dan ini merupakan bukti dari tetap hidupnya daerah dalam Indonesia modern. Di samping adanya keunggulan, tentunya terdapat juga kelemahannya. Dalam membentuk identitas sosial-budaya Indonesia, maka yang harus kita kembangkan adalah keunggulan-keunggulan budaya daerah. Namun kebudayaan daerah ini jangan diartikan sempit menjadi kesenian daerah.

Kebudayaan daerah harus dilihat dari bagaimana suatu masyarakat daerah bisa mempertahankan diri dan dapat maju. Misalkan saja, kita harus menyerap kebudayaan Minang yang tanguh dalam berdagang. Demikian juga kita harus menyerap budaya Bugis yang mandiri, sehingga berani merantau tidak saja dalam wilayah Republik tetapi bahkan hingga ke manca negara. Kita juga harus menyerap budaya Batak, yang relatif lebih terbuka dalam mengungkapkan suatu maksud, sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran. Kita harus menyerap budaya Jawa yang bekerja tekun. Tentunya kita juga harus menyerap budaya Sunda yang lemah-lembut tetapi pantang ditaklukan. Demikianlah seterusnya,

kita memiliki ratusan suku bangsa yang berbagai keunggulan budayanya bisa kita jadikan pembentuk indentitas sosial-budaya Indonesia!

Pembentukan identitas sosial-budaya ini tentunya sangat terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mengedepankan rasionalistas. Karenanya, dengan rasionalitas dan akal budi itulah penyeleksian nilai-nilai budaya luhur harus kita lakukan. Nilai-nilai budaya yang secara rasional tidak menunjang kemajuan kita sebagai bangsa, harus segera kita tinggalkan. Dengan demikian, maka transformasi masyarakat tradisional menuju masyarakat industri dapat berjalan secara terencana dan alamiah. Pada saatnya, kita akan menjadi masyarakat industri yang rasional, tentunya dengan ciri khas Indonesia. Sehingga, pada akhirnya kita akan mampu menjadi bangsa besar dan maju dengan tetap mempertahankan nilai-nilai sosial-budaya ke-Indonesia-an.

2. Menyerap Saripati Nilai-Nilai Budaya Asing

Globalisasi tidak saja berarti adanya kemudahan pertukaran barang, uang, dan lalulintas manusia, tetapi juga pertukaran budaya dan gaya hidup. Berkaitan dengan ini, maka bangsa Indonesia harus bisa mempersiapkan diri untuk berinteraksi atau "berdialog" secara budaya. Untuk melakukan ini, maka kita terlebih dulu harus mengambil "jarak" dengan kebudayaan asing, karena apabila tidak, yang terjadi adalah pencaplokan dan penggantian secara bulat-bulat, terlebih lagi bila budaya asing tersebut telah membangun hegemoni atau dominasinya dalam membentuk kebudayaan dunia.

Menghadapi keadaan ini, maka kaum nasionalis kerakyatan harus mempersiapkan secara matang suatu strategi kebudayaan. Mempersiapkan strategi kebudayaan bukanlah berarti menutup rapat-rapat dari pengaruh budaya asing, melainkan merencanakan suatu tahapan-tahapan agar jangan sampai yang diserap oleh bangsa kita justru yang menjadi ekses di negara-nagara pengimpor budaya tersebut. Kebebasan memperolah informasi memang merupakan hak setiap orang. Namun janganlah sampai informasi yang diperoleh tersebut dapat menumbuh-

kan kegiatan yang kontra-produktif atau bahkan destruktif bagi masyarakat kita. Karena itu, bagaimapun pahitnya, terutama ketika bangsa kita secara umum masih belum matang dan dewasa, maka kita masih perlu melakukan penyaringan informasi tersebut!

Kegiatan ini memang terlihat bertentangan dengan kebebasan memperoleh informasi. Namun apabila kita mau menyelidikanya lebih jauh, kegiatan seperti ini pun telah dilakukan oleh para orang tua modern terhadap anak-anaknya. Para orang tua modern terutama di negara-negara maju, memberikan pengertian kepada anak-anaknya dan bahkan sampai melarang untuk tidak melihat acara-acara televisi tertentu atau membaca buku-buku tertentu, karena dianggap belum waktunya. Analog dengan hal ini, maka tidaklah dapat disalahkan apabila suatu otoritas yang lebih tinggi, dalam hal ini negara, menyusun suatu strategi bersama-sama penyedia informasi lainnya, untuk memberikan porsi informasi yang tepat kepada masyarakatnya.

Sebaliknya, kita harus menyebarkan seluas-luasnya nilai-nilai sosial-budaya asing yang berupa saripatinya. Nilai-nilai etos kerja keras, pantang menyerah, kreatif, inovatif dan produkstif, jujur dan terbuka serta selalu ingin maju haruslah dapat dikemas menjadi sebuah informasi yang menarik sehingga dapat dengan mudah diserap oleh masyarakat. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka identitas sosial-budaya ke-Indonesia-an yang akan terbentuk akan jauh semakin sempurna. Di satu sisi kita menyerap nilai-nilai luhur budaya daerah dan di sisi lain kita juga menyerap nilai-niliai luhur budaya asing. Dengan demikian, niscayalah akan terus terjadi penyempurnaan identitas sosial-budaya ke-Indonesia-an yang dapat mendorong bangsa Indonesia menjadi bangsa besar dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia!

3.2.5. Menerapkan Pendidikan, SDM dan Teknologi yang Terpadu

Sudah menjadi bukti, bahwa suatu bangsa yang unggul dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusianya (SDM), juga akan selalu unggul dalam suatu kompetisi global. Lebih jauh lagi,

pertumbuhan ekonomi suatu bangsa yang berbasis SDM ini akan dapat bertahan dan sinambung dalam jangka panjang, mengingat SDM adalah sumberdaya yang selalu terbarukan (*renewable resources*), yang berbeda dengan sumberdaya alam yang pada waktu tertentu akan habis. Dengan demikian, maka perencanaan pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia, yang juga dikaitkan dengan penguasaan teknologi, harus menjadi bagian terpenting dalam perencanaan pembangunan nasional.

Harus diakui, bahwa bangsa kita tidak memiliki perencanaan yang terpadu dalam bidang pendidikan, pengembangan SDM dan penguasaan teknologi, sehingga secara perlahan, bangsa kita tertinggal oleh bangsa-bangsa Asia khususnya di Asia Tenggara yang pada sekitar tahun 1960-an sesungguhnya sejajar atau bahkan berada di belakang kita. Ketidak-seriusan dalam perencanaan ini di antaranya bisa dilihat dari anggaran pendidikan yang selalu berjumlah kecil dalam tiap-tiap penyusunan APBN, kurikulum pendidikan yang tidak berbasis kebutuhan masyarakat dan kompentensi, serta kurangnya kepedulian terhadap inovasi teknologi dalam kerangka penelitian dan pengembangan. Berkaitan dengan inovasi teknologi, hal ini merupakan keharusan, karena kita tahu bahwa transfer teknologi dari negara maju adalah hal yang sangat langka dan selalu dipersulit dengan berbagai alasan.

1. Pengembangan Pendidikan dan SDM

Pendidikan memang bukan proses membuat manusia menjadi tukang, melainkan suatu proses pembudayaan melalui penanaman nilai-nilai. Selanjutnya, nilai-nilai yang telah didapat akan lebih berdayaguna jika setelah menempuh pendidikan, seseorang mampu menerapkan pengetahuannya dalam bentuk kerja nyata. Karena itulah, pendidikan dan kerja dapat pula kita sebut suatu proses pembudayaan yang tiada henti. Strategi pendidikan yang harus kita kembangkan adalah yang mampu menangkap peluang-peluang atau kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat!

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan, kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada faktor modal. Telah terbukti bahwa di antara terjadinya stagnasi pembangunan eko-

nomi saat ini adalah karena kita terlalu menggantungkan kepada faktor modal ini. Ketika modal menjadi langka akibat krisis, maka secara langsung pertumbuhan ekonomi merosot, dan terutama masyarakat yang tidak dibekali oleh keterampilan yang cukup, langsung jatuh miskin. Sebaliknya, jika saja pertumbuhan ekonomi didukung oleh keunggulam SDM serta penguasaan teknologi yang memadai, maka krisis yang menimpa bangsa kita tidak akan berdampak sedemikian parah seperti sekarang ini.

Dengan SDM yang unggul maka dengan sendirinya akan menciptakan produktivitas masyarakat secara keseluruhan yang lebih tinggi. Keadaan ini berarti masyarakat akan memiliki daya beli yang juga cukup, karena pendapatan sebelumnya yang cukup tinggi. Dengan daya beli yang cukup ini, maka akan tetap memacu produksi nasional, terlebih lagi apabila industri yang dikembangkan adalah industri yang tidak menggantungkan pada bahan baku impor. Dengan kata lain, maka momentum pertumbuhan, walaupun akan terganggu tetapi tidak akan terlalu lama seperti sekarang ini. Dalam perspektif makro, pengembangan SDM ini berarti juga upaya mempertahankan momentum pertumbuhan sekaligus dengan pemerataan!

Untuk mendapatkan SDM yang unggul dan berakhlak mulia, kita bukan saja harus mengembangkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi tetapi justru saat bayi masih berada dalam kandungan perut ibu. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil, pemenuhan gizi yang cukup serta pembinaan dalam keluarga dan ketauladanan para pemimpin merupakan syarat utama untuk bisa beranjak ke jenjang pendidikan berikutnya. Tahap selanjutnya, barulah kita menetapkan jenis dan jenjang pendidikan apa saja yang harus dikembangkan agar secara makro, pembangunan bangsa dapat berlangsung.

Di antara yang menjadi permasalahan selama ini adalah kurangnya tenaga kerja kita yang berketerampilan cukup. Hal ini diakibatkan karena secara umum porsi peserta pendidikan dalam bidang keteknikan termasuk dalam bidang pertanian, masih jauh dibanding dengan bidang sosial. Padahal kita tahu bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan dalam masyarakat, terlebih lagi dalam menghadapi era globalisasi adalah yang memiliki keterampilan untuk berproduksi. Oleh karena itu, dengan tidak

bermaksud mengecilkan kegiatan pendidikan pada bidang sosial, maka pendidikan keteknikan harus mendapatkan porsi jumlah peserta yang cukup. Strategi demikianlah yang sesungguhnya telah diterapkan oleh negara-negara yang saat ini telah berkembang dan maju di wilayah Asia.

Selanjutnya, yang juga menjadi permasalahan penting dalam bidang pendidikan dan pengembangan SDM ini adalah terjadinya jurang yang lebar antar jenjang pendidikan. Saat ini, di satu sisi kita memiliki tenaga kerja yang berketerampilan sangat rendah (*low skilled labor*) dan di sisi lainnya terdapat tenaga kerja yang sangat trampil bahkan hingga jenjang S3 dalam jumlah yang cukup. Sementara itu yang berketerampilan menengah berjumlah sedikit. Hal ini disebabkan karena jenjang pendidikan menengah kita masih bersifat tanggung, sehingga belum mampu mengisi pasar kerja baik di dalam maupun luar negeri. Karena itulah, tidak heran jika para TKI/TKW yang dikirim ke luar negeri kebanyakan bekerja setingkat pembantu rumah tangga!

Memahami hal ini, maka kaum nasionalis kerakyatan harus dapat mengembangkan sistem pendidikan yang tidak saja untuk meningkatkan pengetahuan akan nilai-nilai tetapi juga dalam kerangka pengembangan SDM yang unggul. Karenanya, pendidikan harus memiliki relevansi yang jelas dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan pada masyarakat pertanian dan kelautan misalnya, harus lebih mengedepankan teknik-teknik budidaya, pemeliharaan, penangkapan dan juga teknologi proses. Demikian juga pendidikan yang harus dikembangkan pada masyarakat kehutanan, haruslah yang berkaitan erat dengan pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan. Demikianlah seterusnya, sehingga hasil dari pendidikan dapat langsung bermanfaat bagi proses produksi, di samping tentunya mereka yang telah bekerja tersebut akan bisa memperoleh penghasilan.

Kekosongan pada tingkat keterampilan menengah selama ini harus diisi dengan memperbanyak pendidikan kejuruan (*vocational education*) yang berlanjut pada tingkat politeknik. Di samping itu, dalam rangka menghadapi era globalisasi, maka pendidikan bahasa asing khususnya Inggris, harus menjadi pelajaran wajib, agar setiap lulusan pendidikan tingkat menengah dan politeknik ini sudah mahir berbahasa asing. Dengan demikian, maka kualifikasi tenaga kerja terampil yang dihasilkan

akan dapat diserap tidak saja oleh pasar dalam negeri tetapi juga luar negeri, yang nyata-nyata bisa menjadi sumber devisa yang besar!

2. Penguasaan Teknologi untuk Kemandirian Bangsa

Revolusi industri di Eropa terjadi tiada lain adalah karena telah ditemukannya teknologi mesin uap, sehingga kecepatan produksi dengan kualitas yang baik dapat terjadi berkali-kali lipat. Dari penemuan tersebut, kemudian memacu berbagai usaha penemuan teknologi baru lainnya di berbagai bidang dalam rangka persaingan antar bangsa. Dengan kata lain, semakin maju sebuah bangsa dalam penguasaan teknologi, semakin maju pula bangsa tersebut secara umum. Karenanya, maju dan mundurnya sebuah bangsa sangat tergantung dari penguasaan teknologinya.

Penguasaan teknologi menjadi keharusan apabila bangsa Indonesia ingin bangkit dan mandiri. Proses penguasaan teknologi ini memang harus dilakukan secara bertahap serta dikaitkan dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat. Walau demikian, tidak menutup kemungkinan pula kita mengembangkan teknologi yang bersifat padat modal seperti misalnya teknologi dirgantara, perkapalan, otomotif, elektronika dan semikonduktor dan sebagainya, sejauh hal tersebut tidak mengganggu alokasi sumberdaya ekonomi bagi rakyat.

Bagi Indonesia yang sebagian masyarakatnya berada di pedesaan yang berarti bergelut dalam pertanian dan kelautan, maka pengembangan teknologi pada sektor ini harus dikembangkan secara sangat serius. Teknologi pembibitan, pemeliharaan dan teknologi proses atau manufaktur, harus dikembangkan dengan berbagai cara. Dengan penguasaan teknologi di sektor ini, maka berbagai potensi yang selama ini terpendam dapat segera digali, sehingga bernilai ekonomi tinggi. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi secara besar-besaran mengimpor barang-barang hasil pertanian seperti selama ini, karena memang hal itu tidaklah pantas bagi bangsa yang subur seperti Indonesia!

Kaum nasionalis kerakyatan harus melawan suatu pendapat para ahli khususnya yang berkolaborasi dengan negara-negara industri maju, bahwa pembagian kerja internasional haruslah menempatkan negara-

negara berkembang seperti Indonesia hanya bertugas menyediakan bahan mentah dan tidak perlu mengembangkan teknologi. Pendapat semacam inilah yang sesungguhnya telah menjerumuskan bangsa kita pada kehancuran dan ketergantungan seperti sekarang ini! Kita mengetahui, bahwa nilai tambah dari suatu proses teknologi bisa mencapai tidak saja dalam hitungan puluhan tetapi juga ratusan dan bahkan rubuan kali.

Bangsa kita saat ini telah mampu membuat pesawat terbang yang memiliki sekitar 70 ribu komponen. Dengan kemampuan ini, tentunya bukanlah suatu kesulitan untuk membuat suatu produk yang jumlah komponennya jauh dibawah itu. Misalkan saja industri mobil, karena mobil canggih pun hanya terdiri dari sekitar 20 ribu komponen. Demikian juga dengan sepeda motor dan berbagai alat angkutan baik darat maupun laut. Apabila hal ini dapat dipenuhi, maka kita tidak perlu lagi harus dibanjiri barang-barang impor sejenis yang tentunya sangat menguntungkan negara produsen. Demikian juga halnya untuk alat-alat pertanian dan nelayan yang nyata-nyata digunakan secara massal oleh rakyat Indonesia, kita sesungguhnya tidak perlu lagi secara besar-besaran mengimpornya apabila kita serius mengembangkan teknologi tersebut.

Dengan semakin mampunya kita menciptakan dan mengembangkan teknologi, maka dengan sendirinya bangsa kita akan secara bertahap terlepas dari ketergantungan kepada negara-negara industri maju. Bahkan pada tahap berikutnya, bukan saja kita mampu melepaskan ketergantungan ini, tetapi kita juga akan mampu bersaing dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa tersebut. Hal ini telah dibuktikan dengan nyata oleh negara-negara yang telah menjalankan strategi pengembangan teknologi ini, terutama yang berada di Asia Timur dan beberapa negara di Asia Tenggara.

3.2.6. Melaksanakan Hubungan Internasional yang Pro-Aktif

Berakhirnya perang dingin menandai berakhirnya ketegangan dunia yang dipicu karena ketegangan ideologi yang berbasis material yaitu

antara blok sosialis-komunis dan blok kapitalis. Secara kasat mata, negara-negara blok kapitalis memang terkesan memenangkan pertarungan ideologis ini. Namun, apabila kita cermati lebih jauh, sesungguhnya hal tersebut tidaklah demikian, mengingat negara-negara Barat yang sebelumnya menganut sistem kapitalisme ortodox, saat ini telah berubah menjadi kapitalisme yang lebih bercorak kemanusiaan. Namun sifat perikemanusiaan ini masih terbatas pada hubungan dalam internal masyarakatnya. Sedangkan dalam kaitannya dengan hubungan antar negara, wajah perikemanusiaan ini tidak nampak dan bahkan masih tidak terlalu berbeda dengan sifat-sifat imperialisme beberapa abad lalu!

Karena itulah, dalam era pasca perang dingin ini, blok-blok yang kemudian muncul adalah antara negara-negara Utara yang dulunya bekas penjajah dengan negara-negara Selatan yang dulunya bekas terjajah. Hubungan antara kedua blok negara ini, pada umumnya menyangkut masalah kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, adalah sangat relevan apabila perjuangan negara-negara blok Selatan diarahkan secara khusus pada membangun keseimbangan ekonomi dengan blok Utara. Di antara yang harus diperjuangkan adalah penghapusan kemiskinan negara-negara Selatan yang disebabkan karena jeratan hutang luar negeri!

Bagi Indonesia, hubungan internasional yang telah terjalin cukup lama adalah dengan negara-negara Barat, mengingat pasca G30S/PKI, orientasi hubungan internasional kita lebih utama di arahkan pada blok tersebut. Bahkan dengan negara-negara Timur dapat dikatakan hubungan itu sengaja tidak dihidupkan. Karenanya, adalah sangat wajar apabila saat ini, ketergantungan kita terhadap Barat begitu kuat, termasuk dalam kaitannya dengan pembiayaan luar negeri, baik melalui hutang maupun investasi langsung maupun tidak langsung. Kita dapat mengatakan bahwa selama ini kita telah salah mengelola hubungan dengan Barat sehingga kita tidak mampu merencanakan secara bertahap untuk lepas dari ketergantungan terhadapnya. Masalah ketergantungan ini di antaranya dalam pembiayaan luar negeri, perdagangan, penguasaan teknologi bahkan juga dalam kebudayaan.

Hubungan perekonomian yang demikian kuat dengan Barat, menyebabkan Barat sangat berkepentingan dengan keamanan regional di

kawasan Asia khususnya Asia Tenggara, tentunya dalam rangka kepentingan nasional atau tepatnya kepentingan ekonomi negera-negara Barat tersebut. Dalam kaitan inilah, maka kita bisa menyaksikan bagaimana politik luar negeri Barat yang dalam hal ini dikomandani Amerika Serikat begitu agresif ikut serta dalam keamanan regional di kawasan Asia. Bahkan, kawasan ini telah menjadi zona terbuka bagi operasi intelejen negara-negara Barat. Melihat demikian kuatnya cengkeraman Barat baik dalam bidang prekonomian maupun keamanan, maka tentunya kita harus berusaha mengurangi pengaruh tersebut karena terbukti bahwa hubungan yang dibangun selama ini tidak mampu memperkokoh sendi-sendi kehidupan politik dan ekonomi bangsa kita. Hal ini terbukti dari begitu dahsyatnya krisis yang kita alami dan tidak kunjung berakhir!

1. Membangun Poros Asia

Kalau dulu ideologi komunisme dijadikan "monster" bagi Barat sehingga mereka dengan berbagai cara menanamkan pengaruhnya kepada kita, maka sekarang, setelah monster komunisme hancur, diperlukan lagi monster yang lain yaitu "terorisme internasional". Walaupun kita sangat sulit mengidentifikasi siapa sesungguhnya teroris internasional tersebut, namun yang pasti, akibat dari beberapa kejadian terorisme tersebut khususnya di negara kita, telah kembali menguatkan keyakinan masyarakat kita untuk tetap berorientasi kepada "pahlawan" anti terorisme yang tiada lain adalah Barat itu sendiri. Karena itulah, kaum nasionalis kerakyatan harus bisa memberikan penjelasan kepada semua pihak agar tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan khususnya berupa teror, karena buah dari teror ini adalah semakin mengkristalnya hubungan tak seimbang antara bangsa kita dengan Barat. Dengan kata lain, adanya terorisme di negeri kita dapat menjadi legitimasi baru bagi upaya memperkokoh hegemoni Barat terhadap bangsa kita!

Kita memang tidak perlu memutus hubungan dengan Barat apalagi membencinya. Namun demikian, jangan pula kita menjadikan Barat sebagai prioritas utama dalam setiap hubungan internasional yang kita jalankan, sehingga melupakan berbagai potensi wilayah dunia lainnya.

Berkaitan dengan ini, kita harus meyakini bahwa memperkuat hubungan internasional dengan negara-negera Asia adalah suatu keharusan dalam rangka membangun kemandirian dan kewibawaan regional, sebagai salah satu cara untuk memperkuat kemandirian nasional.

Di antara upaya pro-aktif untuk mengurangi hegemoni Barat di kawasan Asia, adalah dengan membangun kekuatan Asia. Bagi Indonesia, sebelum melangkah pada negara-negara Asia lainnya, maka penguatan hubungan dengan ASEAN perlu dilakukan. Kita harus menjadikan ASEAN sebagai modal bagi hubungan internasional yang lebih luas. Jangan sampai justru hubungan internasional kita yang lebih luas dapat terganggu oleh konflik internal di tubuh ASEAN itu sendiri. Oleh sebab itu, kita harus saling mengingatkan negara-negara anggota bahwa ASEAN tidak boleh dipecah belah oleh kekuatan eksternal. Sehubungan dengan ini, maka berbagai potensi konflik di tubuh ASEAN harus segera diselesaikan secara damai, termasuk yang menyangkut sengketa wilayah seperti pulau Sepadan-Ligitan, Kepulauan Spratty serta masalah tenaga kerja migran yang sempat menghebohkan baru-baru ini.

Setelah kekuatan ASEAN dianggap kokoh, maka langkah berikutnya adalah membangun Poros Asia yang meliputi Jakarta, Beijing, Tokyo, Seoul, New Delhi serta Islamabad. Beijing mewakili Asia Daratan, Tokyo dan Seoul mewakili Asia Timur sedangkan New Delhi dan Islamabad mewakili Asia Selatan. Dengan membangun hubungan yang lebih kokoh dengan negara-negara tersebut, maka dengan sendirinya hubungan dengan negara-negara Asia lainnya akan terbangun. Poros Asia ini sangat penting, karena di samping negara-negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang besar dan di antaranya juga memiliki sumberdaya alam yang melimpah yang tentunya potensial secara ekonomi, mereka juga memiliki keunggulan SDM dan teknologi yang tidak bisa dianggap enteng oleh dunia Barat. Dalam hal ini adalah juga teknologi persenjataan modern termasuk teknologi nuklir.

2. Mengembangkan Diplomasi Dagang

Telah kita sadari bersama bahwa dinamika internasional saat ini

lebih ditandai oleh perkembangan dinamika ekonomi dibanding dinamika politik. Pendekatan-pendekatan diplomasi yang selama ini dijalankan, karenanya juga harus mengalami perubahan. Kalau pada waktu lalu, diplomasi suatu bangsa biasanya hanya dilakukan oleh negara, maka pada saat ini, diplomasi itu bisa juga dilakukan oleh individu, LSM, perusahaan dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Kalau pada waktu lalu diplomasi biasanya hanya berkisar pada wilayah politik dan HAM, maka saat ini, yang harus kita kembangkan adalah diplomasi dagang. Hal ini berarti menuntut penyempurnaan pengetahuan dan sikap khususnya para diplomat pemerintah.

Perwakilan resmi Republik Indonesia baik berupa kedutaan besar maupun konsulat jenderal yang tersebar di berbagai negara sahabat, harus mendapatkan revitalisasi atau penyegaran dalam mengembangkan diplomasi dagang. Dengan kata lain, harus ada langkah-langkah khusus semacam pelatihan-pelatihan kepada para diplomat untuk mengetahui lebih jauh seluk-beluk perdagangan dan investasi. Para diplomat harus dibekali dan diberi kemampuan menjelaskan mengenai seluruh potensi ekonomi Indonesia. Potensi ini, bisa berupa peluang-peluang investasi di Indonesia, komoditi-komoditi unggulan yang bisa dipasarkan serta kemampuan SDM yang bisa dimanfaatkan oleh negara-negara sahabat.

Mengembangkan sistem informasi yang bersifat *on-line* yang menghubungkan antara perwakilan-perwakilan RI di seluruh dunia, saat ini bukanlah suatu pekerjaan yang sulit. Namun demikian, yang terpenting dari sistem ini adalah keseriusan kita untuk selalu memperbarui informasi, sehingga setiap kebutuhan informasi yang diminta oleh pembeli atau investor potensial bisa segera kita berikan. Lebih jauh dari itu, para diplomat kita yang resmi, juga harus bisa menjadi pelobi dalam bidang bisnis. Setiap diplomat harus bersikap pro-aktif tidak saja untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan politik dan citra bangsa, tetapi lebih dari itu juga harus pro-aktif mencari peluang-peluang untuk menempatkan TKI terampil, peningkatan perdagangan, investasi, dan sebagainya!

Kita tahu, bahwa setiap negara biasanya memiliki anggaran pembangunan yang diumumkan setiap tahunnya. Dalam kaitan ini, maka para diplomat kita harus bisa mencermati setiap anggaran pembangunan

negara-negara sahabat tersebut, dan mencari peluang proyek-proyek pembangunan yang bisa dikerjakan oleh putra-putri Indonesia. Dengan demikian, maka pengusaha-pengusaha Indonesia akan terlatih untuk tidak saja dapat berbisnis di dalam negeri tetapi juga di manca negara. Hal ini sesungguhnya juga sudah dan sedang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia, namun saja kita masih perlu mendorong dan membantunya sehingga volume usahanya bisa jauh meningkat.

3.2.7. Menerapkan Otonomi Berbasis Sosio-Kultural

Dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah agar daerah bisa mengatur rumah tangganya sendiri dengan lebih leluasa, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat daerah. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan di daerah haruslah pula sesuai dengan wawasan umum pembangunan nasional. Karena itu, sutau otonomi yang berjenjang sangatlah diperlukan agar tiap-tiap daerah tidak membangun wawasannya sendiri-sendiri.

Dalam kaitan ini, pengembangan otonomi daerah seharusnya didasarkan pada basis sosio-kultural masyarakatnya. Sementara itu kita ketahui, bahwa basis sosio-kulural di Indonesia adalah berupa suku bangsa, yang apabila dikaitkan dengan wilayah adalah sebesar propinsi atau keresidenan yaitu gabungan dari beberapa kabupaten. Karena itu, titik berat otonomi daerah seharusnya bukanlah di kabupaten/kota melainkan pada tingkat propinsi. Sehubungan dengan ini, kita juga harus memberikan kesempatan kepada beberapa grup kabupaten untuk membentuk suatu propinsi sendiri. Karenanya, bisa saja propinsi yang akan terbentuk mencapai 40 sampai 50 wilayah.

Dengan otonomi pada tingkat propinsi ini, maka wawasan pembangunan nasional, bisa diimplementasikan secara lebih bertanggungjawab dengan terlebih dahulu disesuaikan dengan kekhasan daerah masing-masing. Sementara itu, otonomi daerah pada tingkatan berikutnya yaitu di kabupaten/kota dilaksanakan dengan menyerap wawasan nasional secara umum dan wawasan propinsi secara khusus. Dengan demikian, maka proses pembangunan akan tampak serasi dan harmonis. Demikian

juga halnya dengan pembagian dari hasil kekayaan alam, seharusnya bagian terbesar bukanlah untuk kabupaten/kota tetapi untuk propinsi yang bersangkutan. Mengingat, jumlah penduduk di propinsi tersebar di berbagai kabupaten/kota.

Pelaksanaan otonomi yang berjenjang dengan titik berat di tingkat propinsi, bukan saja akan mengurangi konflik antara kabupaten dan propinsi atau antar kabupaten dengan kabupaten lainnya, melainkan juga dapat memelihara dan mengembangkan dengan lebih terpadu keunggulan-keunggulan sosio-kultural masyarakat di berbagai bidang. Karena itulah, apabila otonomi ini telah berkembang dalam beberapa waktu, maka akan tampak adanya kekhasan masing-masing daerah dalam mengelola pembangunan daerahnya. Pada tingkat kabupaten, hal ini tidaklah tampak, karena basis sosio-kultural beberapa kabupaten tidaklah berbeda.

Banten, memisahkan diri dari propinsi Jawa Barat, adalah karena masyarakat Banten secara sosio-kultural berbeda dengan masyarakat Sunda. Karena itu, adalah wajar pula seandainya wilayah Cirebon dan sekitarnya, akan melepaskan diri dari Jawa Barat, karena mereka merasa memiliki basis sosio-kultural yang berbeda dengan masyarakat Sunda. Untuk Jawa Tengah misalnya, adalah wajar bila kemudian hari masyarakat Keresidenan Banyumas di daerah selatan akan membentuk propinsi sendiri, karena mereka merasa berbeda dengan masyarakat dalam Keresidenan Surakarta. Demikianlah seterusnya, juga terjadi di beberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya.

Dalam perspektif SDM, kualitas SDM pada tingkat propinsi akan lebih baik dibanding pada tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, kita tahu bahwa pelaksanaan pembangunan haruslah didukung oleh SDM yang unggul, sehingga bisa meningkatkan efisiensi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, proyek-proyek yang tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat tidak perlu diada-adakan atau dipaksakan ada seperti yang terjadi di daerah-daerah kabupaten/kota selama ini!

Dalam kaitannya dengan skala ekonomi, pembangunan pada tingkat propinsi lebih memiliki skala ekonomi yang memadai. Misalkan saja

dalam sebuah pengusahaan hutan, perkebunan atau pertanian, hal ini biasanya meliputi beberapa kabupaten, sehingga apabila otonomi berada pada tingkat propinsi, maka koordinasi dalam pelaksanaannya akan jauh lebih mudah. Demikian juga dalam pembangunan infrastruktur, misalkan saja pembuatan jalan antar kabupaten, pembuatan waduk atau bendungan untuk keperluan beberapa kabupaten dan sebagainya, koordinasi akan lebih mudah dan terpadu apabila dilakukan pada tingkat propinsi. Tentu saja, dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang melibatkan beberapa kabupaten/kota ini, maka otoritas pada tingkat propinsi harus pula mempertimbangkan masukan-masukan dari tingkat di bawahnya.

Otonomi daerah yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota, bukan malah meningkatkan kemandirian daerah tetapi justru menciptakan ketergantungan daerah kabupaten/kota langsung kepada pusat. Mereka menganggap bahwa kekuasaan tertinggi berada di tingkat pusat. Karena itu, wajarlah bila kemudian penghargaan para bupati/walikota kepada gubernur sangat berkurang, mengingat dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, gubernur dan bupati/walikota dianggap memiliki hirarki yang sama. Di satu sisi para bupati/walikota tidak menghargai gubernur, di sisi lain mereka mengemis-ngemis kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang langsung disalurkan melalaui APBN. Karena itulah, dapat dikatakan bahwa otonomi daerah seperti ini bernuansa *devide et impera* atau memecah-belah untuk kemudian dikuasai!

Sementara itu, apabila titik berat otonomi berada di tingkat propinsi, maka wilayah propinsi akan memiliki posisi tawar yang lebih baik kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat pun dengan sendirinya akan lebih menghargai, karena para gubernur, selain sebagai kepala dari suatu daerah yang lebih luas juga karena mereka merupakan kepala dari suatu basis sosio-kultural suatu masyarakat, yang memang perlu mendapat perhatian dalam rangka menjaga kebhinekaan dan persatuan.

Kekhawatiran akan adanya separatisme apabila otonomi berada pada tingkat propinsi, adalah suatu kakhawatiran yang tidak berdasar, mengingat kegiatan otonomi tersebut jelas-jelas telah diatur untuk tidak me-

nyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas pemerintah pusat, seperti politik luar negeri, kebijakan fiskal dan moneter, serta bidang pertahanan dan keamanan. Sementara itu, dalam bidang hukum dan peradilan, harus dipertimbangkan adanya kekhasan masing-masing wilayah karena mereka memiliki basis sosio-kultural yang berbeda. Karena kepolisian sangat erat kaitannya dengan bidang hukum dan peradilan, maka perlu pula dipertimbangkan agar kepolisian berada dalam koordinasi daerah, walaupun untuk kasus-kasus tertentu terdapat juga aktivitas kepolisian pada tingkat nasional.

Kaum nasionalis kerakyatan harus menyadari bahwa dengan memberikan penghargaan secara memadai kepada suatu entitas sosio-kultural di tingkat propinsi tersebut, maka masyarakat pada wilayah tersebut tentunya akan merasa lebih hidup dan berkembang. Dengan cara ini, maka tiap-tiap wilayah akan menggali nuansa potensi unggulan daerahnya masing-masing tentunya dengan sedikit nuansa persaingan dengan wilayah-wilayah propinsi lain dalam rangka memberikan sumbangan yang terbaik untuk mewujudkan Indonesia Raya!■

LAMPIRAN:

GARIS BESAR PENGELOMPOKAN KEKUATAN POLITIK BERDASARKAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

KELOMPOK / ORIENTASI	*KEKUATAN KESATU* ***Nasionalis Sekuler*** dengan Lokomotif PDIP dan sebagian GOLKAR	*KEKUATAN KEDUA* ***Nasionalis Religius*** dengan Lokomotif Partai-partai Islam di POROS TENGAH	*KEKUATAN KETIGA* ***Nalonalis Kerakyatan*** dengan Lokomotif Kaum Muda (Nasionalis dan Muslim) bersama Kelompok Sektoral yang terpinggirkan.
DEMOKRASI	Ultra-Liberal dalam pengertian terlalu menekankan bahwa demokrasi hanyalah politik dan pemilu serta kehidupan kemasyarakatan yang berorientasi duniawi.	Liberal-Religius dalam pengertian bahwa demokrasi adalah pemilu, namun pelaksanaan kemasyarakatan ditekankan pada *Hablumminallah.*	Sosial-Religius dalam pengertian bahwa demokrasi politik terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat serta keseimbangan aspek religius dan keduniawian.
EKONOMI	Pasar bebas dengan bergantung pada modal asing demi mengejar pertumbuhan.	Pasar bebas dengan orientasi pemberlakuan syari'ah secara terbatas dan mengejar pertumbuhan.	Pasar bebas dengan orientasi pada pertumbuhan dan pemerataan serta melaksanakan syari'ah secara terbatas (*welfare society*).
PERAN PEMERINTAH	Minimal baik dalam bidang moral, ekonomi dan keagamaan	Maksimal baik dalam bidang moral dan agama tetapi minimal dalam bidang ekonomi.	Optimal baik dalam bidang moral, agama maupun dalam bidang ekonomi.

HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORIENTASI SOSIAL-BUDAYA	Pro Barat dalam berbagai aspek kehidupan terutama hubungan sosial-budaya dan ekonomi	Anti Barat dalam pengertian sosial-budaya namun tidak tegas pendirian dalam bidang ekonomi.	Kesejajaran dan kemandirian dengan Barat baik dalam sosial-budaya maupun ekonomi dan penguatan hubungan kepada Asia.
SUMBERDAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI	Sangat bergantung pada asing karena disesuaikan dengan permintaan pasar dalam pembagian kerja internasional sehingga teknologi dipandang sebagai faktor eksogenus.	Sangat bergantung pada asing karena disesuaikan dengan permintaan pasar dalam pembagian kerja internasional sehingga teknologi dipandang sebagai faktor eksogenus.	Membangun kemandirian yang dikombinasi dengan sumberdaya asing serta teknologi dipandang sebagai faktor endogenus.
OTONOMI DAERAH	Kembali ke sistem sentralistik dengan berlindung di balik Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Otonomi luas dan penerapan otonomi khusus bagi daerah-daerah tertentu.	Otonomi luas yang berbasis pada wilayah sosio-kultural setingkat propinsi atau keresidenan.
SUMBER KETOKOHAN	Karisma yang dibangun atas dasar garis keturunan (feodal).	Karisma yang dibangun atas dasar moralitas keagamaan (feodal).	Karisma yang dibangun atas dasar moralitas dan program nyata.